PENDIDIKAN JALAN UTAMA KEBANGKITAN BANGSA

BERITA INDONESIA®

Edisi 09/Th.I/10 - 23 Maret 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

www.beritaindonesia.co.id

TokohINDONESIA

Majalah Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia

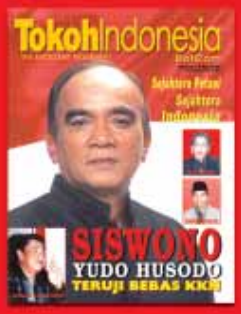

www.tokohindonesia.com

The Excellent Biography

Sampul:
Eri Irawan

Foto:
Wilson Edward

Edisi No.09/Th.I/**10 - 23 MARET 2006**

Dari Redaksi **4**
Surat Komentar **5**
Highlight/Karikatur Berita **7**
Berita Terdepan **12**
Visi Berita **13**

BERITA UTAMA
TNI DALAM TANTANGAN
Ada tiga hal utama yang akan dibenahi dan diperjuangkan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia ke depan **14**

Serah Terima Jabatan Panglima TNI **16**
Upayakan Tiga Prioritas Utama **17**
Harapan-harapan **18**
TNI dari Masa ke Masa **19**
Ketika Tentara di Bilik Suara **20**
Tergusurnya Lumbung Militer **24**
Penuhi Kebutuhan TNI **25**
Alutsista TNI, Merangkak Mengikuti Anggaran **26**

BERITA WAWANCARA
Letjen TNI (Pur) H. Budi Harsono **30**

BERITA OPINI
Juwono Sudarsono **32**

BERITA PROFIL
Drs. H.Harun Al Rasyid **46**

LENTERA
PENDIDIKAN JALAN UTAMA KEBANGKITAN BANGSA
Lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu **34**

BERITA POLITIK
Pilpres-Pilkada Serentak **48**

BERITA NASIONAL
TIB Atasi Penyelewengan Paspor **50**

BERITA HUKUM
Kebebasan yang Mencengangkan **52**
Syaf di Balik Jeruji **53**

BERITA DAERAH
Posisi Tawar Riau Menarik Investor **54**

BERITA MANCANEGARA
Pemerintah Hamas di Ujung Tanduk **56**
RI-Rusia Makin Erat **57**

BERITA EKONOMI
Udang Indonesia Terancam Suspensi **58**

BERITA PEREMPUAN
Dua Perempuan Mencari Keadilan bagi Suaminya ... **59**

BERITA OLAHRAGA
Mimpi Buruk Tim Uber **60**

BERITA IPTEK
Google Sensor Situsnya di China **61**

BERITA AGAMA
Kaharingan Menanti Pengakuan **62**

BERITA HUMANIORA
Memboikot Asap di Ibukota **63**

BERITA HUMANIORA
Menyoal Belajar Aktif **64**

BERITA MEDIA
Majalah Urban di Sudut Kafe **65**

BERITA BUDAYA
Serat Centhini **66**

BERITA TOKOH
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto **28**

BERITA FEATURE
Rancangan Panas di Senayan **40**

BERITAINDONESIA

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang
Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang
Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto
Anis Fuadi
Redaktur Pelaksana:
Anna Diponegoro
Mangatur Lorielcide Paniroy (Website)
Sekretaris Redaksi
Retno Handayani
Kepala Litbang dan Pusat Data:
Suryo Pranoto
Staf Redaksi:
Haposan Tampubolon
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruasas
Christian Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga
Hotman L Gaol
Wartawan Foto:
Wilson Edward
Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorielcide Paniroy
Desainer:
Eri Irawan, Esero Design
Biro Redaksi:
Medan: H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang **Purwakarta:** Benhard Sihite
Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT Citraprinsip Publisitas Indoadprint
Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang
Direktur/ Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang
Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri
Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno
Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorielcide Paniroy
Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang
Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)
Percetakan:
PT Temprint
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871
E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com
Website:
www.beritaindonesia.co.id

DOK BERINDO

KONFERENSI PERS: Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto saat memberikan keterangan di Mabes TNI Cilangkap.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Pembaca yang budiman!

Sebagaimana kami janjikan, mulai Edisi 08, majalah ini akan terbit dua kali satu bulan atau dwimingguan, namun karena masalah teknis (internal) Edisi 09 ini baru bisa hadir di tangan pembaca saat ini. Sehubungan dengan itu, kami mohon maaf. Kami juga menjadikan gangguan masalah teknis tersebut sebagai pelajaran yang amat mahal dan berharga. Sehingga disiplin, dedikasi, tanggung jawab dan kepekaan naluri jurnalistik kami, setiap orang (kru) pada semua lini, mutlak harus semakin tinggi.

Memang, bekerja pada lembaga pers, sebagai lembaga pelayanan informasi kepada publik (media massa, milik publik) membutuhkan profesionalisme secara total. Tidak bisa setengah-setengah. Terutama bagi jajaran redaksionalnya, harus bekerja dengan segenap akal budi, segenap hati, jiwa, naluri, raga (kekuatan) dan segenap waktu (24 jam setiap hari).

Itulah prasyarat sehingga media ini dapat hadir setiap saat sesuai jadual dengan ***fit to print***, baik dari aspek nilai berita maupun norma hukum, agama, etika pers (wartawan) dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat pembacanya. Ini pulalah yang ditekankan oleh manajemen untuk dipedomani setiap kru media ini.

Pembaca! Pada edisi ini, untuk pertama kali, kami menampilkan sosok seorang tokoh di sampul depan, yakni Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto. Sebelumnya kami selalu menampilkan sampul dalam bentuk karikatur dan kompugrafi. Hal ini menunjukkan apresiasi, dukungan dan komitmen kami kepada TNI (semua jajarannya) dalam mengemban tugas sebagai abdi negara yang mengawal keutuhan NKRI dan menegakkan Indonesia yang kuat di tengah pergaulan dan persaingan antarbangsa. Kami juga menyambut hangat dengan segenap hati dan akal budi, reorientasi peran TNI yang sudah dilakukan TNI secara internal. Marilah berhenti menghujat TNI!

Demikian pembaca, kiranya majalah ini bermanfaat dan bermakna!
Selamat menikmati sajian kami.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sbb:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
  Telp. (021) 70930474
  (021) 83701736
  Fax. (021) 9101871

Selalu Membaca Situs BI

Saya selalu membaca situs *Berita Indonesia* dari internet dan saya senang. Saya mau usul berita kriminalitas seperti yang disiarkan di Buser, Patroli dan Sergap juga dimuat di internet. Saya harap itu bisa terjadi, karena kami di Australia juga ingin tahu berita seperti itu. *Good Luck* BI.

Hendra Humiang,
hhumiang@bigpond.net.au

Salut atas Keberanian Probosutedjo

Meskipun kasasinya ditolak dan dijatuhi vonis empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung atas kasus penyelewengan dana reboisasi yang dituduhkan kepadanya, saya dengan tulus menghargai dan salut atas keberanian Pak Probo mengorbankan hartanya 16 milyar untuk menjebak para penegak hukum dalam aksinya memperjualbelikan hukum di negeri ini. Selamat Pak Probosutedjo!

Keberanian dan kepahlawanan Bapak akan tercatat dalam sejarah dan akan terbaca sepanjang masa oleh generasi setelah kita. Biarlah sejarah yang berkata siapa yang Pelawan dan siapa yang Pahlawan.

Endang Supriatna,
Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang

BI Menjalin Hubungan dengan Universitas

Saya usulkan BI menjalin hubungan ramah dan mesra dengan institusi pendidikan terutama dengan universitas, sehingga majalah BI akan dikenal luas oleh masyarakat pendidikan. Yaitu dengan mengadakan seminar, pelatihan, bazaar, diskusi nasional, dan lain-lain. Sehingga pemasarannya akan cepat menyebar ke seantero negeri.

Wahib E,
wahib_effendi@yahoo.co.id

Kenaikan TDL Timbulkan Masalah Baru

Seperti yang kita tahu pemerintah berencana untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Dengan seenaknya Menteri Perindustrian berkata bahwa kenaikan TDL tak akan berpengaruh banyak terhadap sektor industri. Tetapi pernahkah Bapak Menteri berpikir bahwa setelah kenaikan BBM banyak industri (khususnya tekstil) gulung tikar?

Apalagi sekarang pemerintah berencana menaikkan TDL. Kemungkinan besar banyak industri-industri menengah ke bawah yang akan gulung tikar juga. Apakah Bapak pernah berpikir berapa banyak pengangguran yang akan bertambah bila kenaikan TDL berlangsung?

Ya mungkin bapak-bapak yang ada di atas tidak akan begitu merasakan dampaknya. Tetapi orang-orang kecil? Seharusnya urus dulu masalah intern yang ada di PLN dengan banyaknya masalah yang ada. Jangan seenaknya membebankan kerugian yang dialami oleh PLN kepada masyarakat.

Saya yakin kalau masalah-masalah yang terjadi di dalam tubuh PLN dapat dibenahi, masalah akan berkurang. Dan lebih baik cari alternatif lain

BUNG WARTO

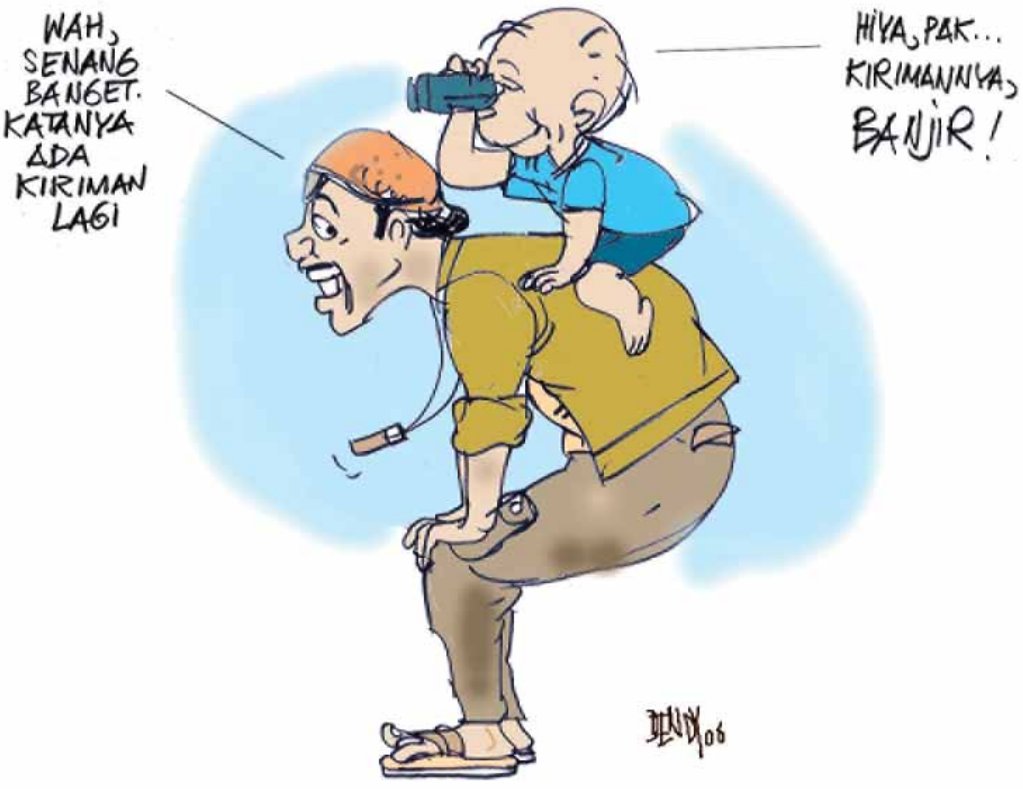

daripada menaikan TDL, yang pasti akan menyengsarakan masyarakat luas.

Mungkin bapak-bapak yang di atas harus merasakan dahulu penderitaan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil, baru dapat memahami bagaimana sulitnya untuk menghadapi kenaikan TDL.

Thomas Sutanto,
Thomas_Sutanto86@hotmail.com

Larangan Merokok di Tempat Umum

Diberlakukannya larangan merokok di tempat umum efektif 4 Februari 2006 adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat pemerintah. Kita menginginkan generasi yang sehat dan kuat demi mencapai masa depan negara Indonesia yang lebih baik.

Saya tidak pernah menemukan sisi positif dari merokok. Kebiasaan ini sangat merugikan dari segala segi. Mulai dari segala macam penyakit dan kanker yang ditimbulkan, sampai pemborosan uang yang mustinya bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting.

Saya tinggal di negara Kanada, dan program antirokok di sini bisa diacungi jempol. Jumlah persentase perokok di Kanada sangat rendah. Pemerintah sangat membantu program berhenti merokok dan sudah pasti merokok di tempat umum tidak diperbolehkan.

Satu hal lagi ialah, anak-anak di bawah umur 19 tahun tidak diperbolehkan membeli rokok di manapun! Jika ketahuan bisa ditahan pihak berwajib. Mereka diwajibkan memperlihatkan kartu identitas sebagai bukti bahwa mereka setidaknya berumur 19 tahun. Ini bisa menjadi salah satu langkah pertimbangan untuk pemerintah dalam menerapkan peraturan-peraturan dalam beberapa tahun ke depan.

Selama 27 tahun saya hidup di Indonesia, sudah menjadi hal umum untuk menyuruh anak atau adik ke warung dan membeli rokok. Itu salah satu cara orang dewasa memperkenalkan rokok ke anak-anak. Saya sangat mencintai Tanah Air Indonesia. Saya berdoa untuk negaraku Indonesia setiap saat. Saya hanya ingin yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Saya dukung sepenuhnya program pemerintah ini.

Jeannette Defant,
jean251@yahoo.com

Peringatan dari Tuhan

Menjalani kehidupan di Indonesia sejak "Reformasi" membuat saya semakin tidak bisa bicara karena rakyat kecil dan minoritas seperti saya tak akan mungkin terdengar apalagi didengar.

Saya sungguh prihatin karena sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia banyak yang mengaku beragama tetapi mungkin tidak ber-Tuhan, sehingga terjadilah keadaan yang sangat kacau balau di segala bidang seperti sekarang ini. Dan kita tidak tahu lagi kerusakan yang mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Bencana-bencana, wabah penyakit, yang tak kunjung berhenti, haruslah kita cermati sebagai peringatan dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan memberi hukuman yang lebih dahsyat lagi setelah tsunami tahun 2004 yang lalu. Salam kasih dan rahayu.

Retno Gunawan,
retnogunawan@kapribaden.org

Tidak Usah Terlalu Berwacana

Presiden tidak perlu buka situs pribadi untuk menerima masukan atau kritikan. Setiap hari baca koran dan nonton berita di tv pasti tahu bagaimana kondisi rakyat negeri ini. Tidak usah terlalu banyak berwacana, silahkan lihat betapa untuk makan sehari-hari banyak orang yang harus jungkir balik, korban bunuh diri karena putus asa akibat hidup susah bertambah lagi. Pemerintah harus bertindak, susun prioritas kerja. Lakukan hal-hal penting terlebih dahulu.

Hero Justin,
justin@oto.co.id

Semoga BI Berkembang Pesat

Saya tertarik dengan keberadaan majalah BI. Semoga bisa berkembang pesat dan tersebar luas di toko toko buku. Sehingga sejajar dengan majalah Tempo, Gatra, dan lain-lain. Saya juga mengusulkan liputan tentang kerjasama dan kunjungan ke berbagai instansi dan tokoh-tokoh penting.

Wisnu Setiaji,
bumipar@yahoo.com

PASTIKAN
TARIF IKLAN BERITA INDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Jalan Cucakrawa No.14A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736 Fax. 9101871

01/02/2006

RI dan OKI Protes Denmark

Pemerintah RI, bersama negara-negara anggota OKI beberapa kali telah menyampaikan protes kepada pemerintah Denmark dan surat kabar Jillands-Posten atas pemuatan beberapa karikatur Nabi Muhammad SAW. Menurut Juru bicara Deplu RI Yuri Thamrin, Indonesia bersama negara-negara OKI langsung melakukan proses diplomatik kepada kementerian luar negeri dan kantor perdana menteri.

02/02/2006

Anggota DPR Ade Nasution Dipukul

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Ade Daud Nasution, dianiaya tidak lama setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Panglima TNI Djoko Suyanto, di Gedung DPR. Begitu turun dari eskalator, Ade langsung didatangi tiga orang tak dikenal. Salah satunya langsung menyerang dan memukul Ade. Akibat pemukulan itu kening Ade robek dan berdarah.

03/02/2006

Anjasmara Tersangka Kasus Pornografi

Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan bintang sinetron Anjasmara dan model Isabel Yahya ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi yang melanggar Pasal 282 ayat 1 dan 2 KUHP. Pasal ini terkait dengan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan gambar atau benda di muka umum yang melanggar perasaan kesopanan. Foto telanjang Anjas dan Isabel ditampilkan dalam pameran CP Biennale 2005 di Museum Bank Indonesia, September tahun lalu.

04/02/2006

Larangan Merokok Mulai berlaku

Pemprov DKI memberlakukan larangan merokok di tempat umum. Ada tiga kawasan yang dijadikan percontohan yakni Jl. Sudirman, Jl. MH Thamrin, dan Kawasan Monas. Untuk mendukung kebijakan itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) DKI akan melakukan pemantauan dan pengawasan lapangan di kawasan larangan merokok, seperti stasiun, mal, tempat kerja, lembaga pendidikan, kesehatan dan angkutan umum. Selain larangan merokok, Perda No.2 Tahun 2005 juga mengatur soal kewajiban uji emisi untuk kendaraan bermotor roda empat (umum dan pribadi), sedangkan untuk kendaraan roda dua akan dilaksanakan secara bertahap.

05/02/2006

Temu Mega, Gus Dur, Try

Dua mantan Presiden RI, yaitu KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, mengajak semua elemen bangsa dan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsekuen dan berani. Tanpa itu, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Pandangan itu disampaikan keduanya dalam seminar bertajuk "Membangun Peradaban Indonesia" yang diadakan Nusantara Bangkit Bersatu di Jakarta. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara itu seperti mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

06/02/2006

Bintang Kehormatan untuk Kapolri dan Para Kepala Staf

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap menyematkan tanda kehormatan kepada Kapolri dan ketiga Kepala Staf Angkatan. Mereka menerima bintang jasa berdasarkan Keppres No.092, 093, 094 dan 095/TK/Tahun 2005 tanggal 18 Desember 2005. Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menerima Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. KSAD Jenderal Djoko Santoso menerima Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. KSAL Laksamana

KarikaturBerita

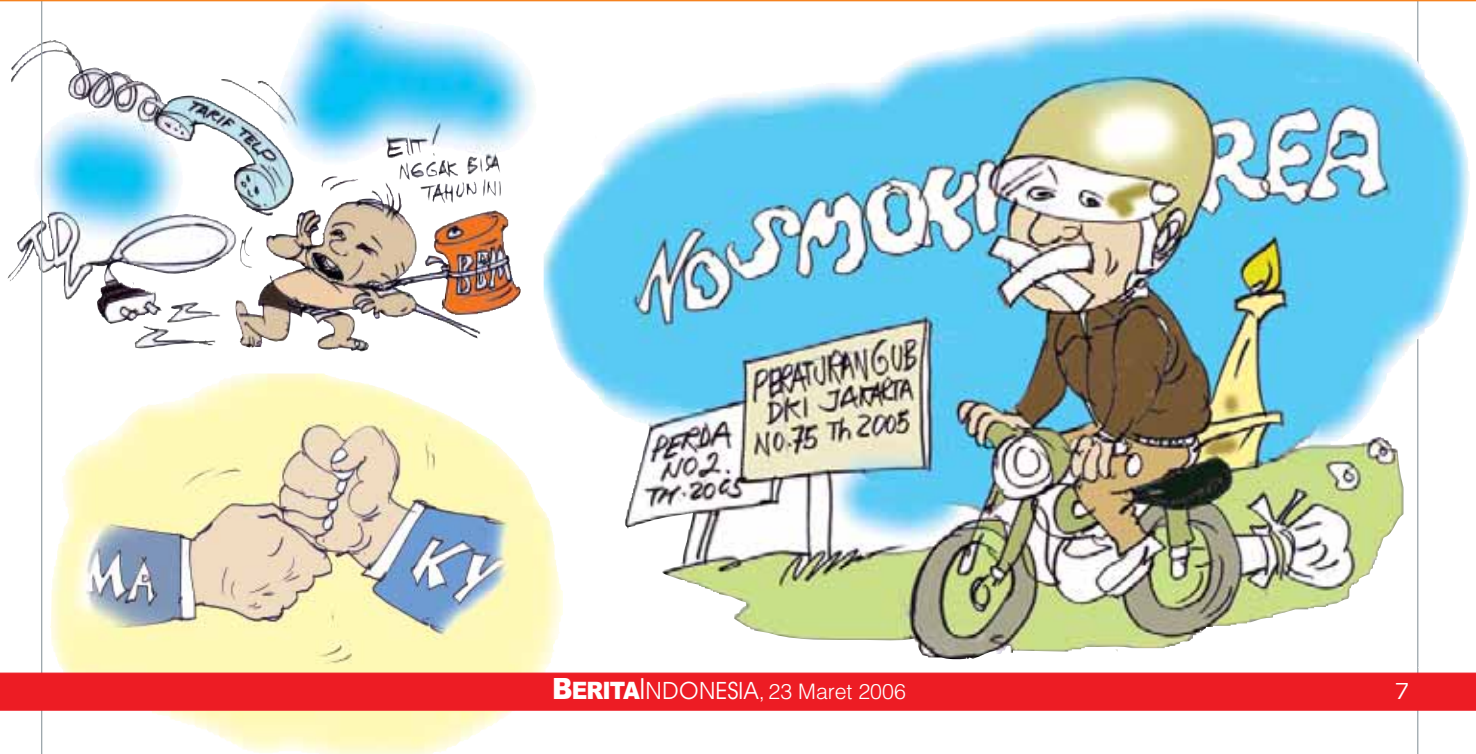

Slamet Soebijanto menerima Bintang Kartika Eka Paksi Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. Sedangkan KSAU Marsekal Djoko Suyatno menerima Bintang Kartika Eka Paksi Utama dan Bintang Jalasena Utama.

07/02/2006

DPR Diawasi Intel

Kalangan anggota DPR menilai Polda Metro Jaya melecehkan sekaligus berupaya mengintimidasi parlemen. Ini terkait surat Direktur Intelpam Polda Metro Jaya Kombes Pol. S. Handoko yang memerintahkan lima anggotanya menyelidiki gerak langkah tim investigasi impor beras yang dibentuk F-PKS dan F-PDIP DPR. "Saya protes kenapa sebuah proses politik yang demokratis dan konstitusional harus ditindaklanjuti dengan tindakan penyelidikan intel," kata anggota F-PAN Alvin Lie dalam rapat paripurna DPR. Dua hari kemudian (9/2) Mabes Polri mencopot Kombes S Handoko dari jabatannya.

08/02/2006

Semua Operator GSM Raih 3G

Tiga operator seluler GSM, yaitu Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo Pratama, memperoleh masing-masing satu blok frekuensi seluler generasi ketiga (3G) setelah menang dalam lelang. Dengan kemenangan itu, tiga operator seluler tersebut memiliki kesempatan untuk meneruskan evolusi teknologinya dari GSM/GPRS menuju Wideband CDMA. Pada hari kedua lelang frekuensi 3G yang pertamakalinya digelar di Indonesia itu, Telkomsel mengajukan penawaran Rp 218 miliar untuk satu blok frekuensi selebar 5 MHz. Sedangkan Indosat mengajukan Rp 160 miliar dan Exelcomindo Rp 188 miliar untuk satu blok.

09/02/2006

MA Menangkan Bambang Harimurty

Mahkamah Agung (MA) membebaskan Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Tempo Bambang Harimurty dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tingkat Kasasi. Putusan tersebut berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agung Bagir Manan, Harifin A Tumpa, dan Djoko Sarwoko sebagai hakim anggota yang berlangsung di Gedung MA Jakarta.

10/02/2006

Flu Burung di Nigeria Meluas

Kekhawatiran akan meluasnya virus H5N1 flu burung di Nigeria meningkat. Pemerintah kembali menemukan kasus flu burung di beberapa negara bagian di Nigeria, yaitu Kano dan Plateau. Hanya dalam waktu satu bulan saja telah terdapat 40.000 ayam dan unggas yang mati mendadak akibat virus mematikan itu. Afrol News menyebutkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar niara (atau sekitar Rp 107 miliar) bagi siapa pun yang ayam maupun unggasnya dimusnahkan.

11/02/2006

Tes CPNS Serentak di Indonesia

Puluhan ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak mengikuti tes di seluruh Indonesia. Di Medan sekitar 20 ribu calon pegawai negeri sipil mengikuti ujian yang dipusatkan di Stadion Teladan, Medan. Jumlah ini jauh di atas daya tampung tempat ujian yang hanya untuk 14 ribu orang. Akibatnya, para peserta berdesak-desakan ketika mengerjakan tes. Di Bandung, Jawa Barat, ujian CPNS diikuti oleh 14.000 orang, atau berkurang 4.000 dari 18.000 peserta yang lolos seleksi administrasi, karena tidak mengambil kartu ujian. Ujian dikonsentrasikan di Fair Ground PT Dirgantara Indonesia, Bandung.

12/02/2006

Presiden Naik Motor di Jalan Tol Menuju Sentul

Kemacetan sepanjang sekitar lima kilometer menjelang Sirkuit Sentul akibat ramainya pengunjung yang ingin menonton A1 Grand Prix membuat rombongan Presiden ikut terjebak di dalamnya. Karena harus membuka salah satu sesi balapan di Sirkuit Sentul pukul 15.00 dan tidak ada tanda jalan bebas hambatan semakin lancar, Presiden keluar dari sedan, menumpang motor besar yang mengawal di depannya. Beberapa menit sebelum sesi balapan dimulai, Presiden tiba di sirkuit.

KarikaturBerita

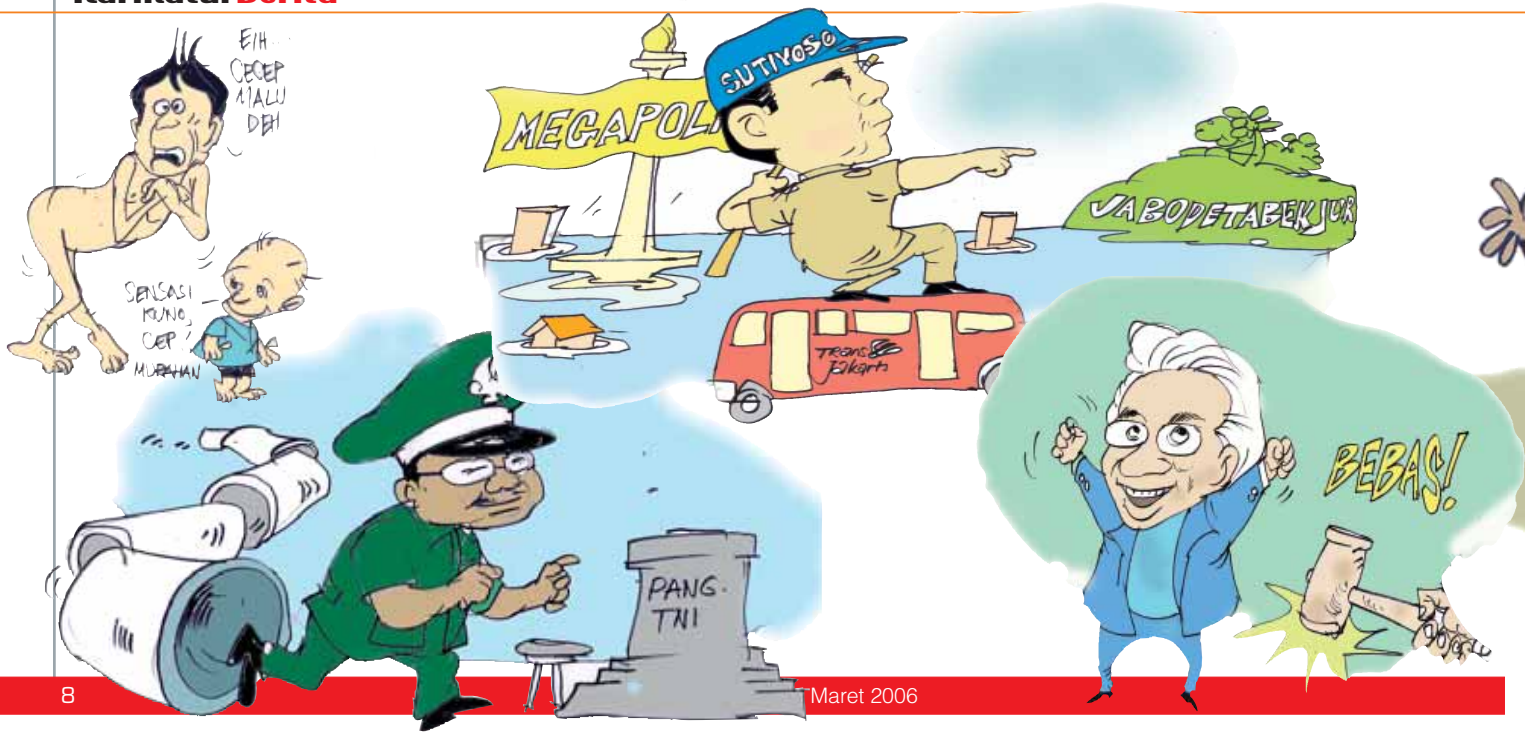

13/02/2006
Panglima TNI Djoko Suyanto Dilantik

Presiden SBY akhirnya melantik dan mengambil sumpah Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, SBY melantik dan mengambil sumpah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Herman Prayitno. Sebelum dilantik, Djoko melewati jalan perdebatan yang cukup alot di gedung DPR.

14/02/2006
Presiden SBY Punya Situs Resmi

Setelah mengudarakan acara *President on Radio*, mengumumkan PO BOX 9949 Jakarta 10000, dan menyebarkan nomor pesan SMS 9949, SBY meluncurkan situs internet www.presidensby.info. Situs yang berisi informasi aktivitas Presiden, Ny Ani Yudhoyono, dan Istana Kepresidenan ini membutuhkan biaya operasional bulanan hingga Rp 44,638 juta.

15/02/2006
Amien : DPR "Tukang Stempel"

Mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan, DPR kembali menjadi seperti "tukang stempel" bagi setiap kebijakan pemerintah. "DPR menjadi lembaga yang"*yes man* dan *yes woman*. Saya melihat legislatif sekarang ini sepertinya melemah. Ini tentu tidak sehat bagi demokrasi yang kita bayangkan," ujarnya di Jakarta.

16/02/2006
Real Madrid Geser MU sebagai Klub Terkaya

Klub sepak bola terkemuka Spanyol, Real Madrid, mengambil alih posisi Manchester United (Inggris) sebagai klub terkaya di dunia. Real Madrid bercokol di posisi teratas dalam daftar Football Money League, sebuah laporan independen yang dikeluarkan firma akuntan Deloitte, Kamis (16/2). Sejak laporan independen itu dirilis sembilan musim lalu, MU selalu menduduki posisi teratas sebagai klub paling kaya. Pendapatan Real Madrid meningkat 17 persen menjadi 328 juta dollar AS pada musim kompetisi 2004-2005. Real Madrid mencetak pendapatan komersial lebih tinggi 62 juta dollar AS dibandingkan MU dan 74 juta dollar AS lebih banyak dibandingkan seteru abadinya di liga domestik, Barcelona.

17/02/2006
Razia Unggas Dimulai

Sehari setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para gubernur dari enam provinsi (Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan) bersiap menata peternakan unggas di wilayah mereka. Razia unggas dan pemusnahannya di DKI dimulai Jumat (24/2). Gubernur Sutiyoso menjamin, pemilik yang unggasnya dimusnahkan akan mendapatkan kompensasi. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengimbau dinas peternakan mengajak rakyat mengandangkan ayam mereka.

Peserta ujian CPNS sedang mengerjakan soal-soal ujian. Sebagian besar dari peserta optimistis ujian kali ini bersih dari praktik KKN.

18/02/2006
Liverpool Akhirnya Mengalahkan MU

Liverpool berhasil meraih kesuksesan yang tertunda selama 85 tahun setelah memukul Manchester United 1-0 langsung pada babak kelima Piala FA di Anfield. Gol kemenangan Liverpool dicetak si jangkung Peter Crouch lewat sundulan. Sukses ini tidak saja meruntuhkan perjalanan waktu 85 tahun Liverpool tidak pernah mengalahkan MU di kancah Piala FA, tetapi juga membalas

kekalahan "The Reds" dari "Red Devils" di Divisi Utama. Kemenangan atas MU bukanlah di partai puncak, tetapi kepuasan pendukung Liverpool rasanya sulit terlukiskan. Bagi mereka, yang terpenting adalah MU sudah bisa dikalahkan dan itu terjadi di Piala FA yang merupakan ajang keramat bagi Liverpool dalam perjumpaan dengan MU sejak 1921.

19/02/2006

Haniya PM Palestina

Seperti telah diperkirakan, Hamas memilih Ismail Haniya sebagai perdana menteri Palestina. Hamas juga akan meminta Abbas mendeklarasikan pemerintahan baru. "Hamas secara resmi mengumumkan bahwa kandidat kami untuk menempati kursi perdana menteri adalah Ismail Haniya," tegas deputi Hamas, Salah al-Bardawil. Sejauh ini, Haniya termasuk salah satu pemimpin terkemuka Hamas yang dikenal bersikap lebih moderat.

Unggas yang dinyatakan positif terinfeksi virus flu burung dimusnahkan.

20/02/2006

ECW Neloe Dkk Divonis Bebas

Pengadilan Jakarta Selatan, menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga mantan direksi Bank Mandiri, mantan Direktur Utama ECW Neloe, mantan Direktur Manajemen, I. Wayan Pugeg, dan mantan EVP Coordinator Corporate and Government M.Soleh Terripan, dalam kasus pengucuran kredit bank tersebut. Hakim menilai ketiganya tidak terbukti memenuhi dakwaan primer maupun subsider. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum Baringin Sianturi mengatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Putusan itu melengkapi penerimaan laporan pertanggungjawabannya dalam RUPSLB awal 2005.

21/02/2006

Pekerja Berunjuk Rasa, PT Maspion Lumpuh Total

Proses produksi PT Maspion lumpuh total akibat ditinggalkan sekitar 18 ribu pekerjanya untuk berunjuk rasa menuntut upah minimum kabupaten (UMK) 2006 di Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Hampir seluruh pekerja dari empat unit perusahaan, yakni PT Maspion I, II, III dan IV serentak turun ke jalan. Pekerja PT Maspion I, II dan III berunjuk rasa di kantor Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pekerja PT Maspion IV berdemontrasi di kantor Disnaker Kabupaten Gresik dan DPRD Jawa Timur (Jatim). Unjuk rasa akhirnya berakhir (28/2) setelah manajemen PT Maspion Group memenuhi tuntutan mereka.

22/02/2006

Lee Jumpai Soeharto

Mantan PM Singapura yang kini menjadi menteri senior, Lee Kuan Yew, mengadakan kunjungan kepada mantan Presiden Soeharto di kediamannya Jl. Cendana, Jakarta. Dalam kunjungan ini Lee disertai isterinya dan Dubes Singapura Edward Lee. Sedangkan Pak Harto didampingi putrinya Siti Hardiyanti Rukmana dan Siti Hediati Prabowo. Sebelumnya Lee juga mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Megawati di kediamannya Jl.Teuku Umar, Jakarta.

23/02/2006

Uganda Memilih Presiden

Walau dibayang-bayangi kekacauan, pemilu pemilihan presiden tetap digelar di Uganda. Dua kandidat utama adalah Presiden Yoweri Museveni dan Kizza Besigye. Ada tiga calon presiden lain, yakni John Ssebaana Kizito dari Partai Demokratik dan Abed Bwanika (calon independen) yang menjanjikan pinjaman untuk mahasiswa jika menang. Calon presiden lain adalah Miria Obote dari Partai Kongres Rakyat Uganda, yang menjadi wanita Uganda yang pertama mengajukan diri sebagai calon presiden di

KarikaturBerita

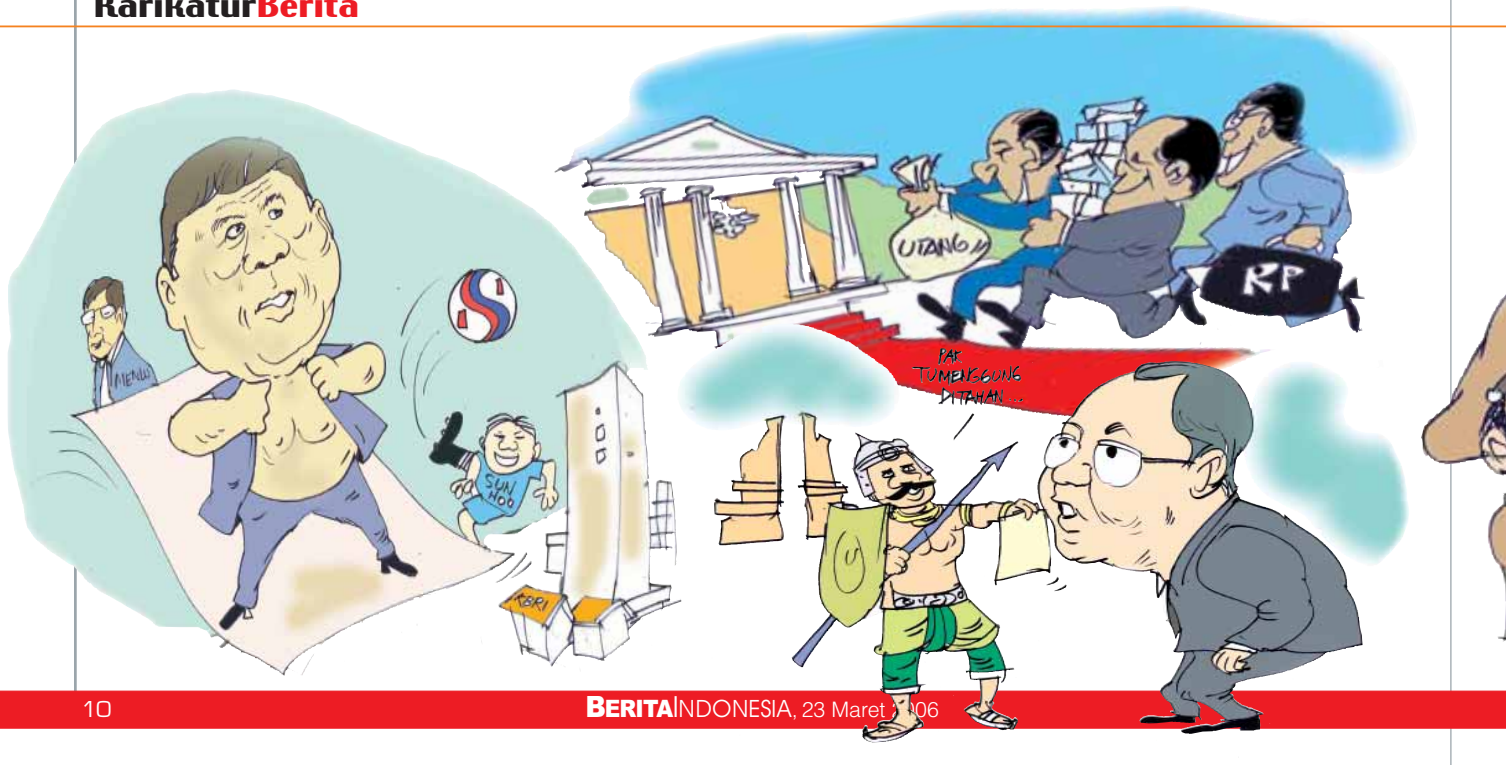

negara yang merdeka dari Inggris pada tahun 1962 itu. Pemilu kali ini bisa dikatakan menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Uganda. Setelah 26 tahun, baru kali ini Uganda menyelenggarakan pemilu presiden dengan sistem multi partai.

24/02/2006

Presiden Resmikan Satelit 2 Telkom

Presiden SBY meresmikan pengoperasian Satelit 2 Telkom di Stasiun Pengendali Utama di Desa Klapanunggal, Gunung Putri Cibinong, Jabar. Dalam kesempatan itu Presiden mengadakan telekonferensi dengan Pj. Gubernur NAD Mustafa Abubakar di ujung barat Indonesia, Banda Aceh, dengan pejabat di Kep. Mianggas di ujung utara Indonesia, dengan Gubernur NTT Piet A Tallo dan Uskup Atambua di ujung selatan Indonesia serta dengan Sekda Kab Merauke, Umar, di ujung Timur Indonesia.

25/02/2006

Pawai "People Power" Gagal

Rencana rakyat Filipina melakukan unjuk rasa besar-besaran menentang Presiden Gloria Macapagal Arroyo sekaligus memperingati 20 tahun tergulingnya pemerintahan Ferdinand Marcos melalui kekuatan rakyat (*people power*) tak terlaksana. Pemberlakuan keadaan darurat oleh Arroyo dan pelarangan seluruh bentuk protes membuat jalan-jalan di Filipina lengang. Pemerintah Arroyo juga menangkapi sejumlah tokoh oposisi serta memberangus media-media yang mendukung oposisi. Keadaan darurat diberlakukan hari Jumat (24/2) setelah Arroyo menyebut adanya "konspirasi sistematik" terhadap dirinya oleh kelompok oposisi, kubu komunis, dan sejumlah "petualang militer".

26/02/2006

Kasus Flu Burung Pertama di Jenewa

Switzerland, mengkonfirmasikan kasus pertama flu burung yang ditemukan pada seekor bebek yang mati di pusat kota Jenewa di dekat air mancur terkenal "d'Eau Fountain". Swiss secara resmi mengatakan belum jelas burung liar yang ditemukan mati tersebut terinfeksi oleh rangkaian H5N1 (flu burung) yang dapat menyakiti manusia.

27/02/2006

PIN Putaran IV

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran IV dengan sasaran 23,6 juta balita di 33 provinsi kembali digelar guna mencegah penularan virus polio liar. Khusus untuk Provinsi Papua, Irjabar, Maluku dan Maluku Utara, pada PIN polio kali ini akan disertakan imunisasi campak. Hal ini dilakukan karena angka kematian balita akibat virus campak di empat provinsi tersebut cukup tinggi. Setelah pelaksanaan PIN IV, maka akan dilanjutkan dengan PIN V pada tanggal 12 April. Biaya PIN polio 27 Feb dan 12 April 2006 itu mencapai Rp 230 miliar yang berasal dari APBN.

Pelaksanaan PIN merupakan rekomendasi ahli kesehatan Indonesia dan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) sebagai upaya memberikan kekebalan tubuh pada balita di Indonesia agar tidak tertular virus polio liar.

28/02/2006

Unjuk Rasa Anti-Freeport Meluas

Aksi unjuk rasa yang meminta dihentikannya kegiatan PT Freeport semakin meluas. Selain di Jakarta, Manado dan Jayapura, aksi unjuk rasa juga terjadi di Semarang. Dalam berbagai unjuk rasa tersebut, demonstran menyatakan, 49 tahun lebih telah terjadi proses pencurian hak rakyat Papua. Kehancuran ekologis menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup rakyat Papua. Sebanyak 13.000 hektar ekosistem di lingkungan penambangan tersebut rusak berat dan akan terus bertambah. Mereka menuntut pemerintah segera membuka dialog nasional yang melibatkan seluruh unsur masyarakat adat Papua demi kesejahteraan dan keadilan rakyat Papua.

Sudi-kah yang Tergelincir?

Rencana peremajaan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Seoul meluncur jadi kemelut. Persoalan pokok menyimpang jauh dari substansinya.

Terkatung-katung sejak era mendiang Duta Besar Sarwo Edhie Wibowo, ayah Ibu Negara Christiani Susilo, rencana pemugaran gedung Kedubes RI di Seoul tertimbun kontroversi. Yang mencuat jadi polemik; surat *katebelece* Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk PT. Sun Hoo, sebuah perusahaan *engineering* Korea Selatan. Dubes RI di Seoul Jacob Tobing, eks fungsionaris PDIP yang menjabat sejak era Presiden Megawati, datang melapor ke Wapres Yusuf Kalla (dua pekan lalu). Dia dicecar oleh para wartawan dengan berbagai pertanyaan, hanya membenarkan adanya rencana peremajaan tersebut.

Bangunan kumuh yang terletak di jantung kota megapolitan Seoul itu, telah menjadi wacana pemugaran puluhan tahun, dan sekarang malah lari dari substansinya. Rencana itu memang muncul sejak era Presiden Soeharto, waktu itu (1970-an) Dubesnya Sarwo Edhie. Sampai empat presiden berganti, rencana tersebut terkatung-katung karena alasan keterbatasan dana. Padahal sosok Kedubes cerminan martabat bangsa di luar negeri.

Rencana pemugaran mengkristal kembali pada pemerintahan Presiden Susilo. Sayang, rencana itu tergelincir menjadi sebuah kemelut. Kenapa? Pemicunya, dua pucuk surat Sudi (20/1 dan 12/2-2005) yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda. Isi surat Sudi intinya meminta Hassan merespon dan menerima pemaparan PT. Sun Hoo berkenaan dengan proposalnya untuk merenovasi kompleks Kedubes RI di Seoul.

Kontroversi muncul ketika surat itu beredar—entah bagaimana bisa jatuh ke tangan wartawan dan politisi—dan mendorong Komisi II DPR memanggil Sudi ke Senayan (23/2). Sudi dicecar para anggota Komisi II dengan berbagai pertanyaan yang cukup memojokkan. Sudi pun menjelaskan; manajemen Sun Hoo menemuinya sekitar November atau Desember 2004. Mereka disarankan ke Deplu. Karena belum tembus juga, mereka datang lagi ke Seskab, Januari 2005. Ketika itu Sudi berniat melayangkan surat ke Menlu, tetapi urung. Keinginan Sun Hoo, lantas dilaporkan ke Presiden SBY, Februari 2005. Tak lama kemudian, Sudi membuat surat baru ke Menlu, 12 Februari 2005.

Kata kunci Sudi kepada Komisi II: surat yang beredar di publik, palsu, karena rekomendasinya tidak seperti itu. Namun setelah didesak Komisi II, Sudi tidak bisa menunjukkan suratnya yang asli. Belakangan, Sudi melaporkan kasus pemalsuan surat ke Mabes Polri.

Sudi pun menjadi bulan-bulanan pers. Sejumlah harian ibukota, terutama *Suara Karya* dan *Media Indonesia* yang pro Partai Golkar, menurunkan berita utama di halaman satu dan tajuk rencana pada hari yang bersamaan (24/2). *Jalan Pintas Gaya Seskab,* judul tajuk harian *Suara Karya.* Tulis harian itu: "Masyarakat akhirnya hanya bisa tersenyum sinis mengikuti proses penyelesaian skandal surat Seskab ke Menlu Hassan. Sudi melaporkan ke Mabes Polri bahwa suratnya ke Menlu sudah dipalsukan. Tidak jelas siapa yang dilaporkan Sudi." Tekateki di tajuk *SK*, diperjelas oleh aktivis Prodemokrasi, Julianson: "Dalam kasus ini, Sudi menjadikan sekretarisnya, Kolonel Aziz Achmadi sebagai tumbal."

Suara Karya memberi judul berita utamanya: *Waspadai Solusi Viktimisasi*. Harian ini mengutip anggota Komisi II, Anshori Saleh, mengasumsikan langkah Sudi hanyalah untuk mengalihkan perhatian dan menghindari tanggung jawab. "Kalau merasa ada pemalsuan mengapa tidak dilaporkan sejak awal, ini *menclamencle* namanya, karena dia terdesak," kata Anshori.

Harian *Media Indonesia* (24/2), menurunkan berita utama, berjudul; *Komisi II DPR Minta Surat Asli: Sudi Tak Bisa Tunjukkan.* "Sudi bersikukuh surat itu palsu, tetapi tidak bisa menunjukkan surat asli, "*MI* mengutip Komisi II. Sudi beralasan bahwa setiap surat yang keluar darinya hanya ditembuskan ke Presiden, tidak ke pihak Sun Hoo seperti yang tertera di dalam surat yang beredar. *MI*, dalam judul tajuknya, mengeritik: *Sudi Mencari Kambing Hitam.* Tulis *MI*: "Semakin gencar Sudi mencari kambing hitam, semakin terkuak berbagai kejanggalan, justru menguatkan kian pentingnya Sudi diperiksa secara intensif."

Sudi Silalahi Diperiksa di Istana, judul berita utama halaman depan *Kompas*, harian independen yang beredar luas dan sangat berpengaruh (22/2). "Kapolri Jenderal Sutanto mengirim tim dari Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk memeriksa Sudi di ruang kerjanya di Istana Presiden (21/2)." Melihat cara Polri menangani laporan Sudi, publik pun harus maklum ke mana kasus itu berujung.

Padahal masyarakat menunggu sebuah kebenaran—betapa pun pahit—diungkap dengan sejelas-jelasnya. Andaikan surat Sudi itu benar, berarti dia telah menjual "murah" kredibilitas sebuah lembaga yang mestinya dihormati. Kalaupun terbukti palsu, ini jadi cerminan kerapuhan sistem pengamanan administrasi di jantung pemerintahan Presiden SBY.

Lantaran akan berbuah *simalakama*, kenapa Seskab bermain api? ■ SH

HAK PILIH PRAJURIT

Siapa bilang TNI mutlak memegang garis komando. Rapat para pimpinan militer di Mabes Cilangkap pekan lalu, mendobrak kemutlakan tersebut. Keputusan Rapim, antara lain, menyelenggarakan jajak pendapat di kalangan prajurit—meskipun secara acak—untuk menakar pandangan mereka tentang perlutidaknya ikut Pemilu 2009.

Kontroversi tentang posisi politik TNI bergulir kembali sejak munculnya ide memberi hak pilih pada lebih kurang 400.000 prajurit TNI. Memang para prajurit TNI pernah menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 1955. Padahal Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman sudah memberi garis yang tegas: Garis politik TNI adalah garis politik negara.

Sebelum memberikan justifikasi pada ide yang sedang bergumul antara pro dan kontra tersebut, ada baiknya kita sejenak menengok ke belakang. Dinamika politik negara bisa dibagi ke dalam empat era yang menggambarkan pasang dan surut peran politik TNI. Era demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), demokrasi Pancasila (1966-1998) dan era reformasi (1998-sekarang).

Era demokrasi parlementer memberi hak pilih bagi tentara, tetapi mengucilkannya dari politik kekuasaan. Pada paruh pertama era tersebut kehidupan politik diguncang oleh aksi polisional Belanda dan pelbagai pemberontakan, baik oleh kelompok sipil maupun militer. Dengan sendirinya perhatian TNI terfokus pada pemberantasan pemberontakan. Karena itu peranan politiknya tidak sampai mencuat ke permukaan.

Namun gejolak politik pasca-Pemilu 1955 yang bersumber dari kegagalan para politisi sipil untuk menuntaskan kemelut konstitusi, menyeret keberpihakan sejumlah perwira militer pada politik partisan. Ada yang berkiblat ke PNI, PKI dan Masyumi. Banyak juga perwira militer yang mempertahankan netralitas mereka. Kelompok inilah yang mendukung Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit 5 Juli

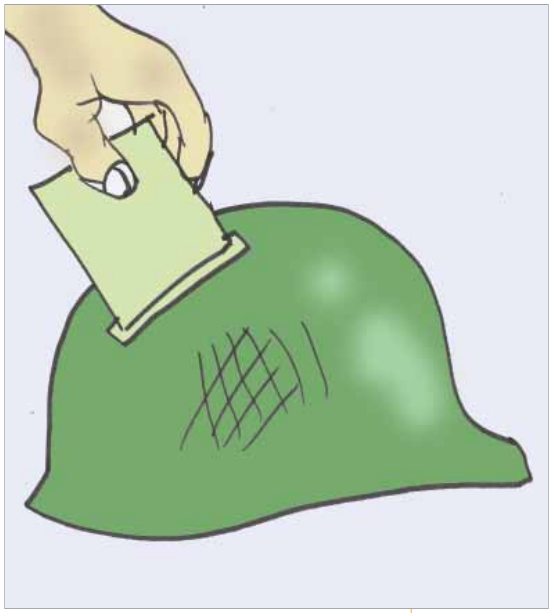

1959, intinya kembali ke UUD 1945.

Pasca dekrit, kehidupan politik Indonesia memasuki era baru; demokrasi terpimpin. Garis komando tertinggi dipegang oleh Soekarno selaku Kepala Negara, Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI. Kehidupan politik negara—parlemen, eksekutif dan militer—dikendalikan oleh Bung Karno yang ditetapkan MPRS sebagai presiden seumur hidup.

Benih keberpihakan tentara pada garis politik partisan tumbuh kembali di bawah bayang-bayang kebesaran Bung Karno. Dominasi politik oleh PKI, dan empati Bung Karno yang berlebihan pada kelompok ini, merongrong keutuhan ABRI. Karena ada sekelompok perwira yang mengambil garis partisan—mendukung kelompok kiri yang dipandang revolusioner, dan memusuhi kelompok perwira netral yang dituding reaksioner.

Akibatnya, bayangan perpecahan ABRI menjadi nyata, menajam, dan titik kulminasinya, tragedi berdarah—pembunuhan tujuh perwira tinggi AD oleh gerakan militer "revolusioner" yang didukung PKI, dinihari 1 Oktober 1965.

Situasi ini memberi justifikasi pada ABRI untuk terlibat di dalam kancah dinamika politik masyarakat. ABRI dengan konsep Dwi Fungsinya masuk jauh ke dalam kehidupan sosial politik; membangun jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) untuk melanggengkan pemerintahan yang berkuasa. Lebih dari 30 dekade, peranan sospol ABRI benar-benar sangat eksesif.

Di tengah dominasi seperti ini pun, di dalam tubuh ABRI sendiri lahir friksi—dikenal dengan faksi Jenderal Faisal Tandjung, faksi Jenderal Benny Moerdani dan faksi Jenderal Wiranto. Sejak Oktober 1997, sekitar 24 perwira tinggi yang disebut Menhan Juwono Sudarsono termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang presiden), menggulirkan gagasan "redefinisi, reposisi dan reaktualisasi" peran ABRI di dalam tatanan politik Indonesia. Maka kemudian (1998) lahir gerakan reformasi yang menggulung habis peran sosial politik ABRI.

Juga menurut Juwono (*http://www.tni.mil.id*), tiga perwira tinggi TNI—Jenderal Susilo, Laksamana Widodo AS dan Jenderal Endriartono, sejak Mei 1998 berperan besar di dalam mengawal transformasi politik Indonesia. Memang agak bersebrangan. Setelah duduk di kursi presiden, Susilo memberi pesan penting kepada Panglima baru, Marsekal Djoko Suyanto, tentang peran TNI: jaga netralitas, jangan bermain api di kancah politik praktis, hormati reformasi dan demokrasi.

Karena itu kembalikan posisi politik TNI pada komitmen: "Garis politik TNI adalah garis politik negara." Kalau ingin TNI berperan proporsional, maka komitmen ini mestinya disikapi secara dinamis oleh para politisi sipil di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.

Mungkin ide hak pilih prajurit perlu disikapi seperti itu. Yaitu; memberi TNI tempat yang tepat dan aktual di dalam dinamika politik negara: tidak berlebihan, tetapi juga tidak diremehkan. Bukan lantaran adanya udang di balik batu. ■

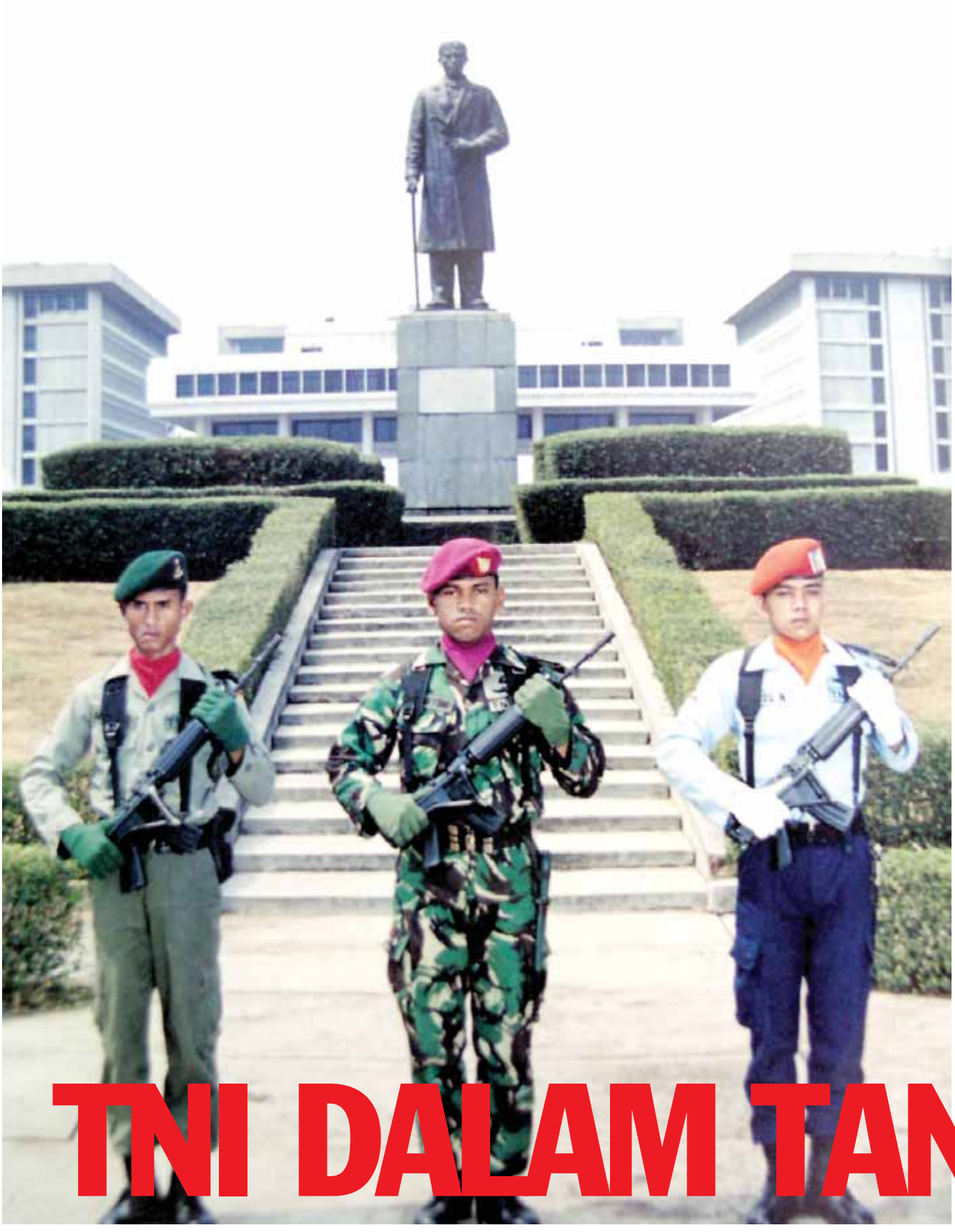

TNI DALAM TAN

Peringatan yang dilontarkan Panglima Soedirman tersebut masih sangat relevan dengan keinginan rakyat, TNI yang tidak terkotak-kotak oleh politik partisan dan politik kekuasaan. Soedirman melihat kondisi politik dan keamanan di era 1949, bisa menyeret bangsa Indonesia ke jurang perpecahan. Ini dampak dari pemberontakan PKI (1948), aksi polisional Belanda (1948-1950), pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan krisis konstitusi yang berkepanjangan dari 1955 sampai 1959. Yang dicemaskan Panglima Soedirman, hanyutnya para perwira TNI di dalam krisis politik partisan, akibat dari kegagalan demi kegagalan kepemimpinan sipil di era demokrasi parlementer (1949-1959).

Tantangan buat TNI saat ini; masih berkembangnya keinginan sekelompok orang di sejumlah daerah kaya untuk memisahkan diri (gerakan separatis, baik secara tersembunyi dan terang-terangan). Sekarang sedang berkembang gagasan untuk melibatkan para prajurit TNI di arena politik, memberikan mereka hak pilih di dalam Pemilu 2009. Gagasan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Jadi, peringatan Panglima Soedirman tersebut bisa menjadi titik tolak penempatan posisi politik TNI. Saat ini, TNI selaku alat negara di bidang pertahanan, masih menghadapi klaim dan "pencurian" pulau-pulau dan kekayaan laut oleh pihak-pihak asing. Selain itu ketahanan negara diuji oleh berbagai bencana alam (setelah malapetaka tsunami) di Aceh, tanah longsor, banjir, krisis pangan, kelaparan dan kurang gizi, wabah penyakit, krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama akibat kenaikan harga BBM, dan ledakan pengangguran. Juga dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat sipil dan militer.

Dalam kondisi negara seperti itulah, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Jenderal Endriartono Sutarto. Endriartono meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi Djoko, perlu-tidaknya prajurit TNI memberikan hak pilih pada Pemilu 2009. Djoko memulai PR-nya dengan melakukan jajak pendapat pada sejumlah prajurit tentang hak pilih mereka.

"Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan satu-satunya milik republik yang harus tetap utuh."
(Panglima Besar Jenderal Soedirman)

TANGAN

Kesejahteraan dan Hak Politik

Dengan jajak pendapat tersebut TNI ingin mengisi reformasi internalnya dengan membuka kran *bottom up*, bukan semata-mata dengan garis komando (*top down*). Komitmennya terhadap penegakan HAM juga merupakan bagian terpenting reformasi internal TNI. Memang ke depan TNI harus profesional dalam posisi politik yang proporsional, sejalan dengan doktrin Panglima Soedirman: "Garis politik TNI adalah garis politik negara."

Ketika TNI tengah berupaya menegakkan profesionalisme, berkembang wacana pengambilalihan bisnis TNI. Wacana ini memunculkan pro dan kontra. Awalnya, adanya bisnis TNI tak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup prajurit. Berperang membela bangsa adalah tugas utama prajurit TNI sebagai patriot bangsa. Tetapi pengorbanan jiwa raganya tak diimbangi dengan kelayakan hidup. Anggaran negara yang terbatas dan mahalnya peralatan membuat TNI harus membagi alokasi dana secara cermat.

Akibatnya gaji prajurit pun sangat minim. *Liputan 6 SCTV* (20/2) melaporkan, gaji prajurit kurang dari Rp 1 juta. Bahkan gaji seorang jenderal hanya sekitar Rp 2,2 juta. Realitas inilah yang memunculkan pikiran para petinggi TNI untuk mengembangkan bisnis.

Awalnya, bisnis TNI hanya seadanya. Tapi di masa Orde Baru bisnis yang dinaungi oleh sejumlah yayasan ini menggurita ke berbagai sektor kehidupan hingga mencapai kurang lebih 219 unit jumlahnya.

Namun banyaknya suara *miring* tentang usaha-usaha yang dikelola dan dimiliki TNI, yang konon hanya menguntungkan beberapa elit militer ini, membuatnya harus ditinjau kembali.

Secara obyektif, keterlibatan TNI di dunia politik mesti dilihat dari konteks historis TNI dan aspek dinamika internal kontemporernya. Historisnya, keterlibatan militer Indonesia dalam bidang politik telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Selama masa Orde Baru, ABRI dengan peran Dwi Fungsinya pernah mendominasi kehidupan sosial politik kekuasaan yang cukup dominan, bahkan eksesif.

Cukup banyak kajian yang menghasilkan kesimpulan keterlibatan militer Indonesia dalam aktivitas politik kekuasaan lebih banyak mudlaratnya dibanding manfaatnya.

TNI terus menerus menjalani proses reformasi internal, karena ini pekerjaan besar yang memerlukan waktu panjang. Namun semangat reformasi yang berlebihan semestinya tidak mengucilkan TNI dari masalah-masalah politik, terutama politik negara, yakni yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara.

Di tengah proses reformasi yang berkesinambungan tersebut, akankah TNI terseret kembali ke gelanggang politik kekuasaan, seperti yang dikomentari oleh sementara pihak yang kurang sepakat terhadap pemberian hak memilih kepada prajurit TNI. Menurut mereka, tugas utama menjaga dan melindungi pertahanan dan teritorial negara sudah merupakan tantangan dan tugas yang amat berat diemban TNI.

Akan tetapi, kalangan yang mendukung dari perspektif bahwa anggota TNI adalah warga negara yang dijamin negara akan hak-hak politiknya. Yang pasti, Mabes TNI –berdasarkan Rapim TNI (27/2)– telah mengambil keputusan untuk menggelar jajak pendapat secara *sampling* kepada prajurit TNI sekitar April/Mei 2006. Tujuannya, menampung aspirasi awal untuk kemudian mengambil keputusan akhir, apakah TNI akan menggunakan hak memilihnya pada Pemilu 2009 atau tidak.

Ternyata, memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi TNI ke depan. Waktu yang akan menilai kehebatan 'tangan dingin' Djoko Suyanto menata TNI, baik secara institusional maupun fungsional, menyongsong setiap tantangan zaman. ■ AD, SH

Serah Terima Jabatan Panglima TNI

Serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto kepada Marsekal Djoko Suyanto dilaksanakan pada 20/2 lalu. Jenderal Endriartono berharap, TNI harus mempertahankan netralitasnya.

Suasana cerah pagi itu melingkupi kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Sejak dari pintu gerbang utama, petugas telah berjaga-jaga menyambut para tamu yang sengaja diundang dalam acara Sertijab Panglima TNI. Sedikit demi sedikit, halaman parkir Markas Besar TNI mulai dipadati kendaraan. Tak jauh dari pintu halaman parkir, para prajurit yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dengan seragam khas mereka berjajar di kanan kiri jalan.

Suasana terasa agak berbeda, ketika di ujung barisan tersebut puluhan senjata laras panjang para prajurit ditata rapi, seolah-olah memberi ucapan selamat datang. Para tamu undangan pun dengan tertib berjalan memasuki tempat acara. Ada yang masih mencari-cari kode dan nomor tempat duduk yang telah disediakan, namun ada yang sudah siap mengikuti jalannya upacara.

Derap langkah pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diikuti oleh barisan Pegawai Negeri Sipil TNI memasuki lapangan utama Markas Besar TNI Cilangkap. Defile itu mengawali proses acara serah terima jabatan tersebut.

Tugas dan Tanggungjawab TNI

Dalam pidato serah terima jabatan tersebut, Jenderal Endriartono Sutarto lebih banyak menyinggung tentang tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Selama 3 tahun 8 bulan ia memangku jabatan sebagai Panglima TNI, dan selama 34 tahun menjalani kehidupan sebagai prajurit TNI, Endriartono merasa telah banyak menjalani masa-masa pengabdian yang panjang.

Maka ia mengaku sangat bersyukur dengan apa yang telah dilakukan prajurit TNI selama ini.

"Saya sangat mensyukuri apa yang telah dilakukan prajurit TNI selama ini, yang telah mampu membuka mata dan bukan hanya di kalangan masyarakat dalam negeri namun juga diakui secara Internasional," ungkapnya. Pencabutan embargo oleh kalangan barat menjadi bukti semua itu. Artinya, TNI telah mendapat apresiasi dan penghargaan secara internasional.

Namun ia juga menegaskan bahwa pencabutan embargo bukanlah tujuan. Tujuan utamanya adalah kesadaran yang telah dilakukan prajurit TNI untuk bangsa ini. "Apresiasi dan penghargaan internasional itu hanya dampak atas prestasi prajurit yang dilandasi oleh loyalitas," kata Jenderal bintang empat itu.

Lebih jauh Endriartono menambahkan, TNI harus tetap menjaga jatidirinya sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, prajurit nasional dan prajurit profesional. Itulah maka ia kembali menekankan untuk mempertahankan netralitas. "Pertahankan sikap non partisan. TNI bukan milik golongan atau kelompok, tetapi milik bangsa Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dalam sambutannya juga menyadari bahwa di tengah-tengan dinamika kehidupan dan perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya, TNI dihadapkan pada tugas-tugas seperti tertuang dalam UU 34/2004, "Tidak ada cara lain bagi kita keluarga besar TNI kecuali dengan bekerja keras dalam semangat kebersamaan yang solid dan mantap. Agar segala bentuk tantangan tugas, betapa pun beratnya akan dapat kita selesaikan sebaik-baiknya," harapnya.

Lebih lanjut Djoko juga mengatakan, bahwa kebijakan yang telah disusun Panglima TNI menuju jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional harus menjadi landasan TNI untuk melangkah ke depan "Dengan demikian, momentum dan kesinambungan dinamika pembinaan dan penugasan TNI yang telah berjalan dengan baik selama ini, akan senantiasa terpelihara kontinuitasnya."

Pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI didasarkan pada Keputusan Presiden No. 7/TNI/2006. Serahterima jabatan Pangima TNI dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto kepada Marsekal TNI Djoko Suyanto ditandai dengan penyerahan tongkat komando, Panji-panji TNI, penandatanganan naskah serahterima jabatan dan penyerahan memorandum dari pejabat lama kepada pejabat baru. Selain itu pejabat lama juga menyerahkan kepada pejabat baru berupa prasasti yang berisi amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Hadir dalam acara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Herman Prayitno, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, dan sejumlah pejabat lain seperti para anggota DPR RI, khususnya Komisi I, para duta besar dan atase militer negara sahabat serta mantan panglima ABRI/TNI seperti Try Soetrisno, Feisal Tanjung, Widodo AS dan Wiranto.

Acara Sertijab panglima TNI ini juga sekaligus diikuti dengan serah terima jabatan Ibu-ibu Dharma Pertiwi, dari Ibu Endriartono Sutarto kepada Ibu Djoko Suyanto. Satu acara yang gagal dilaksanakan adalah acara tradisi pelepasan Panglima lama. Setelah upacara serah terima jabatan selesai, Panglima lama diantar Panglima Baru sampai ke pos jaga pintu keluar. Para prajurit berjajar di kanan – kiri jalan hingga pintu pos jaga. Di sana sudah menunggu mobil yang siap menjemput Panglima lama untuk keluar. Namun sayang, acara tersebut gagal dilaksanakan karena tiba-tiba hujan lebat mengguyur arena upacara. ■ AD, AM, SP, SB

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto

UPAYAKAN TIGA PRIORITAS UTAMA

Ada tiga hal utama yang akan dibenahi dan diperjuangkan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia ke depan.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya memprioritaskan tiga hal utama yang akan dibenahi dan diperjuangkan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia yang profesional dan dedikatif, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit.

"Ada beberapa hal pokok yang akan diperjuangkan dan menjadi prioritas untuk membentuk TNI yang profesional," katanya. Djoko menjelaskan, tiga prioritas utama yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit, melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI sesuai anggaran yang tersedia dan hubungan baik antara Mabes TNI, ketiga angkatan dan dengan Departemen Pertahanan (Dephan).

Ketiga prioritas utama tersebut menurut Djoko, juga telah dibahas dalam Rapat Pimpinan TNI (Rapim) yang dilaksanakan pada 27/2 lalu. Lebih lanjut Djoko menjelaskan, untuk menjadikan prajurit TNI yang profesional, pemerintah harus dapat menjamin tingkat taraf hidup yang layak bagi prajurit. Sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan tambahan selain tugas pokoknya yang sudah cukup berat. "Untuk itu, saya bersama teman-teman Komisi I DPR akan meminta pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang layak bagi para prajurit. Taraf hidup layak tersebut mencangkup sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

TNI, tambahnya, sudah tidak mungkin lagi mencari pemasukan lain untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit karena sesuai UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI tidak diperbolehkan lagi berbisnis. "Satu-satunya ya melalui APBN. Karena itu saya berharap pemerintah, DPR dan departemen terkait lain memahami dan mengerti, seberapa besar tingkat taraf hidup yang layak bagi seorang prajurit, dengan tugas pokok yang begitu berat," kata Panglima TNI.

Ditambahkan, kesejahteraan prajurit tidak semata-mata masalah gaji melainkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan kenaikan uang lauk-pauk. "Itu adalah komponen-komponen yang akan kita perjuangkan kepada pemerintah," tambahnya.

Prioritas kedua, lanjut Djoko adalah melengkapi alutsista TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang sebagian besar kini berada dalam kondisi kurang memadai, untuk mendukung tugas pokok TNI. "Peningkatan kesiapan dan kekuatan TNI masih sangat tergantung pada seberapa besar anggaran yang dapat diberikan oleh pemerintah. Prediksi ke depan memang sulit untuk mencapai tahapan yang ideal dalam tiga hingga enam tahun ke depan," ujarnya. ■ AD, SB

HARAPAN-HARAPAN

Jenderal Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI)

Jangan Pernah Berubah Sampai Kapan pun

Pergantian pucuk pimpinan TNI sebagaimana yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, merupakan *event* penting yang memiliki nilai strategis pada institusi TNI. Karena pergantian ini mengandung makna, bahwa pembinaan organisasi TNI dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berlangsung secara konsisten atas dasar kaderisasi dan regenerasi.

Ini juga sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam tubuh organisasi TNI, secara periodik terjadi pergantian pimpinan TNI. Namun, satu hal pasti bahwa jati diri TNI sebagai rakyat, sebagai tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional tidak pernah dan jangan pernah berubah sampai kapan pun dan siapa pun pimpinannya. Karena jati diri inilah yang merupakan sumber kekuatan moral bagi segenap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pengabdiannya.

Saya ucapkan selamat dan saya merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Marsekal untuk memimpin TNI. Saya yakin dan percaya di bawah pimpinan Marsekal TNI Djoko Suyanto, TNI dapat berbuat lebih optimal, lebih banyak dalam setiap langkah pengabdiannya kepada bangsa dan negara NKRI. ■ AD

Theo L Sambuaga (Ketua Komisi I DPR RI)

Empat Aspek Harus Ditingkatkan

Dalam perjalanannya, TNI memang mengalami banyak tantangan. Tapi, kami yakin Panglima Marsekal Djoko Suyanto akan dapat memimpin TNI dengan sebaik-baiknya. Sebab harapan-harapan rakyat sangat besar kepada TNI. TNI adalah aset nasional milik negara yang melaksanakan fungsi pertahanan.

Saya kira beberapa tugas pokok yang mendatang dihadapi oleh TNI adalah tantangan dari dalam, dalam upaya terus menerus meningkatkan kinerja TNI secara profesional. Dengan latihan dan pendidikan yang harus terus ditingkatkan, sehingga TNI menjadi tentara yang kuat dan profesional. Kemudian meningkatkan jati dirinya sebagai pejuang dan tentara rakyat, tentara nasional dan tentara profesional.

Aspek lain yang mesti diperhatikan adalah meningkatkan kesejahteraan para prajurit. Kita tahu, bahwa kesejahteraan prajurit masih jauh dari sangat memadai, sehingga masih perlu terus ada perbaikan.

Aspek ke tiga adalah meningkatkan kemampuan alutsista yang memadai. Di tengah-tengah kondisi keuangan negara yang masih sangat terbatas, kami (DPR-red) juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit, peningkatan latihan dan profesionalisme TNI serta upaya peningkatan kemampuan alutsista.

Aspek keempat yang harus terus di tingkatkan adalah reformasi internal TNI. Ini harus terus menerus dilakukan sejalan dengan kontribusi, guna mendukung reformasi dan demokratisasi. Saya kira ini empat hal yang kami harapkan. Panglima TNI yang baru dengan bersinergi dengan KSAD, KSAL dan KSAU, yang mendukung tugas-tugas beliau maka kami optimis, upaya-upaya itu akan dapat diwujudkannya. ■ AD

TNI dari Masa ke Masa

Lahir dan dibesarkan oleh rakyat. TNI lantas tumbuh menjadi alat pertahanan negara yang profesional, tetapi selalu bergelut dengan dunia politik.

Awalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanyalah sekelompok laskar dan barisan keamanan rakyat. Meskipun sudah merdeka (17 Agustus 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Laskar rakyat dan BKR baru memiliki senjata seadanya, meskipun sejumlah anggotanya telah terlatih secara militer di dalam pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945). Senjata-senjata itu mereka rampas dari tentara Jepang yang dilucuti oleh Pasukan Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu yang diboncengi tentara Belanda (NICA), September 1945, menimbulkan bentrokan bersenjata antara laskar rakyat dan BKR yang berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Memang anggota laskar dan BKR, sebagian besar tidak trampil menggunakan senjata dan berperang, tetapi mempunyai semangat juang yang tinggi. Mereka menggunakan senjata seadanya untuk melawan tentara Sekutu yang dilengkapi persenjataan canggih.

Waktu itu muncul persoalaan tentang kedudukan BKR sangat otonom di bawah komite nasional daerah. Ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi dan pengawasan. Senjata-senjata juga banyak jatuh ke tangan para pemuda yang bukan anggota BKR.

Atas berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), angkatan bersenjata yang berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat untuk mempertahankan NKRI. Sebagai tentara nasional, TKR menyatukan bermacam-macam badan perjuangan atau laskar-laskar rakyat. Tanggal lahirnya TKR ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya TNI.

Dari masa ke masa TNI seringkali terseret di dalam kehidupan politik negara. Nama kekuatan militer Indonesia pun berubah-ubah—dari TKR ke TNI, APRI, ABRI dan kembali ke TNI.

Dalam peran politiknya, untuk menjaga kekompakan di dalam tubuh TNI, Panglima Besar Jenderal Soedirman mencetuskan doktrin: "Garis politik TNI adalah garis politik negara." Pengamat militer Anhar Gonggong mengemukakan sejak awal TNI sudah berpolitik. Panglima Sudirman, katanya, ikut merumuskan program minimum persatuan perjuangan. Tetapi ini bukan dalam konotasi negatif, kata Anhar, karena dalam kaitan perjuangan.

Di dalam pemilihan umum tahun 1955, para prajurit TNI dan anggota Polri ikut memberikan suara. Saat itu, meskipun TNI ikut memilih, kekuasaan pemerintah sepenuhnya berada di tangan para pemimpin sipil. Namun situasi politik dan keamanan terus bergejolak akibat pemberontakan-pemberontakan, dan kegagalan Badan Konstituante menetapkan UUD baru menggantikan UUD RIS.

Keadaan ini memaksa TNI, terutama Angkatan Darat, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Bung Karno memerintah dengan dekrit, dan ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup.

Di era demokrasi terpimpin, konflik politik menajam, terutama antara PKI dan partai-partai Islam. Gejolak politik yang terus memanas, memberi jalan bagi sekelompok perwira berafiliasi pada partai politik, terutama mereka yang disanjung-sanjung PKI sebagai perwira progresif revolusioner untuk melawan para perwira reaksioner.

Puncak keterlibatan tentara di dalam panggung politik melahirkan tragedi berdarah, pembunuhan tujuh perwira tinggi TNI, 1 Oktober 1965 oleh para perwira yang didukung PKI.

Tragedi ini mengundang TNI secara terang-terangan terjun di panggung politik praktis lewat doktrin Dwi Fungsi ABRI. Lewat jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar), TNI mendominasi kehidupan sosial-politik selama 32 tahun. Memang terjadi banyak ekses, misalnya, pengkerdilan demokrasi dan pelanggaran HAM.

Kehadiran ABRI di dalam kehidupan sosial-politik juga mengalami titik balik. Gerakan reformasi yang menggelora tahun 1998, mengguncang dan meruntuhkan sendi-sendi Dwi Fungsi ABRI. Setelah ABRI berpisah dengan Polri, dan namanya dikembalikan menjadi TNI, tetapi dikucilkan sama sekali dari panggung politik.

Sekarang muncul gagasan untuk melibatkan para prajurit di dalam pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2009.

Inikah pertanda kembalinya TNI di dalam kehidupan politik praktis dan kekuasaan? Anhar tidak melihatnya sejauh itu. Tetapi dia mengisyaratkan adanya kekuatan tertentu yang mau menggunakan TNI untuk tujuan politiknya. ■ SH, AD

KETIKA TENTARA DI

TNI akan mengadakan jajak pendapat kepada seluruh prajurit untuk menyerap aspirasi tentang Hak Pilih Pemilu 2009.

Pada Pemilu (legislatif dan eksekutif) 2004, anggota TNI aktif tidak menggunakan hak memilihnya. Ketentuan itu tercantum secara eksplisit dalam Pasal 145 UU No.12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 102 UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Anggota TNI berpeluang untuk berada di balik bilik suara pada Pemilu 2009 sebab dua UU itu tidak menyebutkan secara jelas. Selain karena tidak dicantumkan dalam dua UU tadi, terbukanya keran bagi anggota TNI pada Pemilu 2009 lantaran UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI juga tidak memuat aturan yang melarang setiap anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Pasal 39 UU TNI menyebutkan, prajurit TNI dilarang terlibat dalam (1) kegiatan menjadi anggota partai politik, (2) kegiatan politik praktis, (3) kegiatan bisnis, dan (4) kegiatan untuk dipilih untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Satu bulan terakhir ini, isu hak memilih anggota TNI kembali menggelinding begitu deras sebagai wacana menyusul pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal **Endriartono Sutarto** (15/2): prajurit TNI siap menggunakan hak memilihnya pada Pemilu 2009.

Sutarto menilai, hak memilih anggota TNI adalah bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ia bahkan mengakui ketika melarang anggota TNI menggunakan hak pilih pada Pemilu 2004, sebenarnya ia melanggar HAM dan mencederai demokrasi.

"Hak pilih pada dasarnya bukan hak institusi. Itu hak individu setiap warga negara tanpa memandang profesi," kata Sutarto seraya menegaskan bahwa TNI akan tetap solid meski prajurit memiliki aspirasi politik yang berbeda pada Pemilu 2009. Justru pelanggaran HAM bila prajurit dihalangi masuk bilik suara.

Selain itu, masih kata Sutarto, hak pilih itu tidak akan bertentangan dengan amanat Presiden SBY, pada acara pelantikan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto dan KSAU Marsdya TNI Herman Prayitno, di Istana Negara (13/2), agar TNI tidak berpolitik praktis.

Seperti dipahami, selain mengingatkan para perwira tinggi TNI di tiga angkatan (jenderal, marsekal, laksamana) akan masih banyaknya godaan memasuki daerah politik di masa transisi ini. Agar tidak berpolitik praktis, Presiden SBY juga meminta TNI tetap netral dan tidak berpihak dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPD/DPR/DPRD, dan pemilihan Presiden/Wapres.

Bagai bunga dikerubuti kumbang, pernyataan Sutarto menuai berbagai silang pendapat dengan sudut pandang argumentasi: hak asasi, kesiapan TNI, kekhawatiran tarik-menarik politis antar-Parpol, termasuk trauma pada masa lalu bahwa militer akan berkuasa lagi; yang berujung pada dua kubu pendapat.

Kubu pertama menilai anggota TNI memang berhak ikut memilih pada 2009. Kubu kedua melihat kondisi saat ini belum kondusif bagi anggota TNI menggunakan hak pilihnya pada 2009.

Pada kubu pertama, antara lain, Ketua MPR-RI **Hidayat Nurwahid** dan Ketua

BILIK SUARA

DPR-RI, **H.R. Agung Laksono**. Nurwahid menilai wajar bila prajurit TNI menggunakan hak pilihnya. Dengan begitu, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, TNI akan ikut mewarnai perkembangan bangsa ke depan lewat mekanisme demokrasi, sekaligus TNI harus ikut bertanggung jawab terhadap hasil dari proses demokrasi itu sendiri. Nurwahid yakin, keterlibatan TNI tidak akan menghidupkan kembali jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar).

"Saya tidak yakin ke arah itu (munculnya kembali ABG) karena semua telah berubah. Dulu Golkar memang sangat dominan sehingga PNS, birokrat dan TNI dimasukkan ke situ," tandasnya.

Secara terpisah, setuju adanya hak memilih prajurit TNI, Agung mengingatkan keberhasilan demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan memberikan hak politik kepada TNI. Karena itu, katanya, sudah saatnya hak pilih TNI diberikan pada Pemilu 2009 dengan aturan main yang jelas dan transparan.

"Adalah sebuah prestasi yang luar biasa kalau TNI bisa memberikan hak suaranya pada Pemilu 2009, apalagi jika Pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil, aman dan tertib," tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, di gedung DPR, Jakarta (20/2), seperti dikutip *Pelita* (21/2).

"Kalau itu terjadi, anggapan TNI tidak demokratis seperti yang disebut-sebut selama ini, dengan sendirinya akan pupus."

Pengamat politik **DR. J. Kristiadi**, menilai situasi saat ini sudah kondusif untuk memberikan peran kepada TNI menyalurkan aspirasinya. "Tahun 2009 harus sudah dimulai militer dilibatkan memberikan suara," komentarnya di *Indopos* (19/2).

UU 12/2003 tidak memberi ruang kepada TNI memberikan suara pada Pemilu 2004, menurutnya, karena ada kekhawatiran stabilitas nasional terganggu.

"Kekhawatiran seperti dulu tidak perlu muncul sebab dalam UU 34/2004 tentang TNI telah ditegaskan militer akan tunduk di bawah supremasi sipil. Artinya tidak ada lagi aturan yang mengekang hak-hak sipil warga negara, karena mempunyai profesi sebagai tentara," Kristiadi berargumentasi.

Pendapat Lain

Berseberangan pendapat dengan Endriartono Sutarto adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prof. **Juwono Sudarsono** dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) **Prof. Muladi.**

Keduanya punya pendapat senada, anggota TNI belum saatnya menggunakan hak pilihnya pada 2009, sebaiknya ditunda hingga Pemilu 2014, karena kondisi sosial-ekonomi saat ini belum kondusif dan belum berada pada titik ideal.

"Kita sepakat pada 2009 TNI diberikan hak pilih, tapi saya pribadi mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemungkinan ada tarik-menarik dari luar lebih suka kalau ditunda tahun 2014," ucap Menhan.

Dengan sudut pandang yang relatif sama, dua orang mantan KSAD masing-masing Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dan Jenderal Ryamizard Ryacudu cenderung tidak setuju pemberian hak pilih Pemilu kepada anggota TNI.

Dalam kacamata **Tyasno Sudarto**, seperti dituturkannya kepada *Suara Karya* (16/2), seluruh prajurit TNI malah seharusnya tidak dibolehkan terlibat dalam politik praktis dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Tyasno mengingatkan, politik TNI adalah politik negara dan bukan politik Parpol. TNI itu adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional Indonesia yang komitmennya hanya untuk membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya.

"Jika ikut memilih pada Pemilu, misalnya Pemilu 2009 atau Pemilu 2014, berarti TNI sudah terlibat dalam politik praktis karena menggunakan hak suaranya memilih Parpol tertentu," kata mantan Kepala BAIS itu.

Akan halnya **Ryamizard Ryacudu**, dia beranggapan belum saatnya bagi anggota TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Alasannya, kedewasaan berpolitik di Indonesia belum mantap.

"Partai-partai politik sekarang masih rentan terhadap pengelompokan-pengelompokan, karena itu TNI seharusnya belum menggunakan hak pilihnya," ujar Ryamizard.

Merespons pembenaran bahwa hak memilih adalah hak setiap warga negara, termasuk TNI, Ryamizard menegaskan hak prajurit sebenarnya sudah diberikan kepada bangsa dan negaranya dengan mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),"**DR. Indria Samego**, juga berpendapat perlu dikaji secara serius apakah TNI sudah siap menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 atau tidak.

Sebagai warga negara, Samego menambahkan, anggota TNI berhak menggunakan haknya jika dikaji secara hukum dan undang-undang. Tapi, kapasitas TNI berbeda dengan sipil, yakni TNI memegang senjata sedangkan sipil tidak.

Harian sore *Sinar Harapan* (23/2) mewawancarai **Begi Hersutanto**, pengamat militer dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), seputar hak pilih prajurit TNI.

Pemilihan Presiden/Wapres.

Dalam hemat Begi, kekhawatiran akan implikasi negatif dari penggunaan hak pilih TNI pada Pemilu 2009 bisa dijawab dengan pengaturan mekanisme.

Di Amerika Serikat dan Filipina, anggota militer yang masih aktif dimungkinkan turut serta memberikan suara dalam Pemilu. Hanya saja, faktor kedewasaan politik di kedua negara membuat anggota militer aktif dipandang tidak bermasalah bila ikut memberikan suara dalam Pemilu.

Di Amerika Serikat, anggota angkatan bersenjata memiliki pola pikir bahwa tiap-tiap warga negara termasuk mereka, memiliki hak memberikan suara. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki pola pikir berkewajiban melindungi warga negara. Mereka pun mendukung penuh siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu.

Di Filipina, anggota militer aktif memberikan suaranya sebelum Pemilu berlangsung, sehingga pada saat Pemilu pada personel militer melakukan tugas pengamanannya.

"Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang hiruk pikuk dan hingar-bingar sejak kampanye. Yang dikhawatirkan, manakala terdapat anggota TNI yang ikut dalam kampanye. Akan sangat berbahaya jika angggota TNI terlibat dalam tindak kekerasan antarkelompok mengingat kapasitas anggota TNI memiliki senjata," jelas Begi.

"Bukan tidak mungkin, ada pihak-pihak yang menggunakan sejumlah dana untuk menggerakkan anggota TNI untuk mendukung salah satu pihak. Sulit dipungkiri anggota TNI tidak akan termanipulasi dalam kampanye dan dalam Pemilu dengan sejumlah dana mengingat anggota TNI memiliki tingkat kesejahteraan yang terbatas."

Fenomena di Indonesia, kata Begi, masih belum menunjukkan indikasi memadai bagi anggota TNI aktif untuk ikut Pemilu. Karenanya, dia menyarankan sebaiknya dipersiapkan beberapa kondisi yang tidak hanya menjamin kebebasan anggota TNI memberikan suara tapi juga mengatur keikutsertaan mereka dalam Pemilu.

Mekanisme itu, antara lain, harus dengan jelas melarang anggota TNI ikut ambil bagian dalam kampanye yang mendukung salah satu pihak.

Mantan Panglima ABRI/Menko Polkam, **Jenderal TNI (Purn) Wiranto**, mengaku bisa memahami bahwa anggota TNI bisa mengikuti Pemilu sebagai wujud hak asasi WNI.

"Keikutsertaan anggota TNI dalam Pemilu harus mempertimbangkan apakah mengganggu stabilitas nasional atau tidak. Hanya saja, personil TNI itu kan juga mengemban tugas teritorial, yang harus dihapus, sehingga tidak dimanfaatkan untuk memperalat masyarakat," ujar Wiranto.

RYAMIZARD RYACUDU

Pemberian hak pilih bagi anggota TNI, kata Wiranto, juga harus mempertimbangkan waktu yang tepat serta dampak baik-buruknya. Ia mengaku belum bisa memastikan waktu paling tepat bagi anggota TNI mengikuti Pemilu. "Tahun 2009 atau kapan hendaknya tergantung dari hasil survei yang idealnya dilakukan dulu," tandasnya.

Republika (20/2) menurunkan tulisan opini dari **Munafrizal Manan**. Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia itu berpendapat, terlalu sederhana memaknai pemberian hak memilih anggota TNI sebagai wujud pelaksanaan HAM kepada WNI. TNI sebaiknya tetap fokus pada proses reformasi internalnya. Karena itu, tidak perlu lagi ditambah kesibukan dalam aktivitas politik.

Sebab, sekali TNI dilibatkan atau melibatkan diri dalam aktivitas politik, sulit memastikan itu tidak akan menyuburkan impuls naluri intrinsik TNI yang ingin berperan jauh dalam arena politik.

"Arena politik dan demokrasi akan menjadi tidak sehat jika yang terlibat dalam rivalitas politik itu ada unsur yang memiliki kekuatan senjata dan terampil melakukan *management of violence*," tulis Manan.

Jajak Pendapat Prajurit

Apa tanggapan Mabes TNI sendiri? Mengantisipasi terbukanya peluang prajurit TNI menggunakan hak memilih pada Pemilu 2009, Mabes TNI akan menggelar pogram jajak pendapat secara *sample* terhadap sebagian anggota TNI.

Program jajak pendapat prajurit TNI yang diputuskan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Cilangkap (Mabes TNI), 27 Februari

2006, itu akan dilaksanakan pada Maret atau April tahun ini.

"Hasilnya bukan hanya akan dijadikan acuan dan pedoman TNI dalam mengambil sikap, tapi juga untuk menyusun aturan internal yang akan membatasi dan mengatur norma prajurit dalam menggunakan hak pilihnya," cetus **Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto**, usai Rapim.

Djoko menambahkan, jajak pendapat itu akan bersifat *bottom-up* dan *top-down*. Setiap panglima komando utama (Pangkotama) di daerah akan diinstruksikan untuk mengambil sampel prajurit sebanyak-banyaknya di wilayahnya guna mengetahui aspirasi prajurit tentang hak pilih.

"Seluruh pimpinan aparat teritorial TNI akan diinstruksikan untuk menyusun sebuah kajian tentang kesiapan prajurit dalam menggunakan hak memilihnya," lanjut Djoko.

Bila sudah terkumpul aspirasi dari bawah (mekanisme *bottom up*), fungsi *top down* Mabes TNI akan mengakomodasi poin-poin tersebut dalam sebuah peraturan internal.

Akan tetapi, Panglima TNI menggarisbawahi, "Aturan internal itu tidak akan kami susun sebelum pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kembali hak pilih TNI (melalui amandemen UU 12/2003 tentang Pemilu Legislatif dan UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden, *red*)".

Ada tiga landasan yang akan digunakan TNI dalam menyikapi Pemilu. *Pertama*, TNI akan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam mengaplikasikan aspirasi politiknya.

Kedua, TNI konsisten pada sikap netralitas. *Ketiga*, TNI harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan institusi.

Seminggu sebelumnya, usai acara Sertijab Panglima TNI, di Mabes TNI Cilangkap (20/2), Djoko mengatakan pihaknya bersama-sama tiga kepala staf angkatan masih punya waktu 2-3 tahun untuk mengkaji soal hak pilih tersebut.

Institusinya masih belum memutuskan dalam waktu dekat apakah prajurit TNI akan diberi hak atau tidak untuk memilih dalam Pemilu 2009.

"Saya belum memutuskan, jadi tidak ada keputusan TNI sudah memilih atau belum. Saya harus memastikan dulu bagaimana keadaan prajurit, bagaimana tingkat kematangan politik, termasuk apakah sejauh mana perundang-undangan yang dibuat pemerintah dan DPR bisa menjamin bahwa menggunakan hak politik itu tidak akan merusak soliditas TNI. Itu yang paling penting," papar Panglima TNI.

Ihwal relasi antara hak pilih anggota TNI dan Soliditas TNI sebelumnya pernah ditekankan oleh Djoko Suyanto saat dirinya mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di hadapan Komisi I DPR (1/2), selaku calon Panglima TNI. Mantan KSAU itu mengatakan, pemberian hak pilih kepada anggota TNI pada Pemilu 2009 jangan sampai menggangu soliditas TNI.

"Jika penggunaan hak pilih pada 2009 bagi prajurit TNI lebih banyak memberikan kontribusi positif maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika penggunaan hak pilih ternyata lebih banyak mudaratnya, sebaiknya ditunda saja," tegas Djoko.

Mabes TNI akan mencermati dan mengkaji terlebih dahulu tiga komponen sebelum menentukan prajurit TNI boleh memilih atau belum. Ketiga komponen itu adalah kesiapan prajurit TNI sebagai individu, kesiapan partai politik, dan aturan perundang-undangannya. "Harus ada sinergi dari ketiga komponen itu," ujar Djoko.

Bila anggota TNI diperbolehkan menggunakan hak memilih pada Pemilu 2009, salah satu syarat mutlaknya adalah revisi atas UU No. 12/2003 dan UU No. 23/2003. Intinya, ada penyesuaian terkait dengan ketentuan pasal 145 UU 12/2003 dan ketentuan pasal 102 UU No. 23/2003.

Menteri Dalam Negeri, **M. Ma'ruf**, membenarkan logika bahwa harus ada aturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum anggota TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009.

Mendagri mendukung pemberian hak pilih bagi anggota TNI pada Pemilu 2009 karena itu hak setiap warga negara, termasuk TNI. Karena itu, lanjutnya, yang harus disiapkan saat ini adalah piranti lunak untuk menyongsong hal itu, yakni revisi UU Pemilu. Perubahan itu juga sangat bergantung sejauh mana rumusan DPR yang tengah disiapkan.

"Kalau mereka (TNI) ingin memilih pada Pemilu 2009 nanti, harus kita hormati itu. Ini kan negara demokrasi, semua orang memiliki hak pilih," ujar mendagri.

Dalam analisis J. Kristiadi, setidaknya ada tiga poin yang harus dimasukkan dalam revisi UU 12/2003 tentang Pemilu, yakni Pilkada adalah pemilu, calon independen harus diakomodasi, dan TNI diberikan hak untuk memilih.

Dimintai komentar oleh *Berita Indonesia*, sejarahwan dan pengamat militer **DR. Anhar Gonggong** berargumen, aturan dan tata main harus lebih dulu dibuat dengan kepastian dan betul-betul disepakati semua pihak sebelum hak memilih diberikan kepada anggota TNI. Tugas DPR, pemerintah, dan internal TNI untuk merumuskan aturan itu. Ia juga menepis kekhawatiran sementara kalangan pada hak politik TNI.

Baginya, apakah diterapkan pada 2009 atau 2014 tidak jadi masalah, yang terpenting ada aturan tentang hak perpolitikan prajurit TNI.

"Tidak usah takut dengan hak politik TNI. Justru pertanyaannya sekarang, mampukah DPR merumuskan aturan yang benar-benar menopang TNI agar berdiri tegak diatas netralitasnya?" urai Anhar Gonggong dengan nada retoris.

Apabila sampai 2009 belum juga disiapkan aturan itu, imbuhnya, jangan dipaksakan sebab itu bukan salah TNI. Kesalahan ada pada DPR.

"Harus ada aturan itu. Nanti kalau ada apa-apa TNI lagi yang disalahkan! Padahal yang salah itu partai-partai yang menarik TNI. Partai harus profesional *dong*, jangan hanya menuntut profesionalisme dari TNI. Harus ada pendidikan politik di atara partai politik sendiri. Para politikus juga belum tentu mengerti tentang politik."

Harian *Bisnis Indonesia* (24/2) dalam tajuknya "Berebut Suara TNI" berpendapat, biarlah TNI mengkaji dulu secara mendalam masalah hak pilih tersebut. TNI perlu berkaca dan hendaknya memetik pelajaran berharga dari kiprah politik mereka selama era Orde Baru.

"Jadi, apapun keputusan TNI kelak, seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan sekadar pemanfaatan kepentingan politik praktis sesaat," tulis *Bisnis Indonesia*. ■ AF, AD, SP, Sb, Am

TERGUSURNYA LUMBUNG MILITER

Seluruh kegiatan usaha yang selama ini dimiliki dan dikelola TNI akan diambil-alih pemerintah. Sebuah induk perusahaan (*holding company*) akan didirikan sebagai badan pengatur.

Reformasi dan reposisi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga ditandai pengambil-alihan seluruh kegiatan usaha yang selama ini dikelolanya.

Pengambilalihan itu sendiri adalah amanat dari UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 76 Bab X Ketentuan Peralihan UU TNI disebutkan, "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil-alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden."

Informasi terakhir, seperti dilansir *Kompas* (22/2), menyebutkan pemerintah dalam hal ini tim antar departemen akan segera memutuskan berdirinya induk perusahaan (*holding company*), yang bertugas mengatur seluruh unit usaha TNI.

"Kami akan membahas hasil inventarisasi yang dilakukan Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu atas seluruh bisnis TNI untuk menjadi satu badan yang menangani bisnis TNI itu semua. Mudah-mudahan keputusann itu segera disusul dengan keluarnya peraturan presiden (Perpres) tahun ini juga," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, seusai dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (21/2).

Pertengahan Oktober 2005, Menhan mengisyaratkan, pemerintah hanya akan mengambil alih 10 dari 219 unit usaha dan yayasan yang telah diinventarisir Mabes TNI, berdasarkan kriteria modal dan manajemen. Mengutip pernyataan Menhan, *Suara Pembaruan* (20/10) menulis, 10 perusahaan itu beraset kurang lebih di atas Rp 250 miliar.

Kementerian BUMN bertugas memverifikasi hasil inventarisasi seluruh usaha TNI. Kesepakatan lain, PT. Dana Reksa dan PT. Bahana dilibatkan dalam pengelolaan bisnis TNI itu. Kedua BUMN itu ditugaskan menyusun kerangka acuan dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penataan Bisnis TNI.

Sebelum ada *holding company* disepakati, Menhan pernah mengusulkan model BUMN yang dikelola profesional. Pola BUMN-isasi usaha TNI bisa memenuhi anggaran TNI untuk 10 tahun mendatang. Anggaran TNI saat ini Rp 21 triliun, akan ditingkatkan bertahap Rp 32 triliun hingga akhirnya Rp 46 triliun.

Konon, dari bisnisnya TNI bisa menyumbang anggarannya sampai 70 persen, sedangkan anggaran dari APBN hanya 30 persen saja mampu memenuhi seluruh kebutuhan TNI.

Belakangan, Menhan mencabut kembali usulnya setelah berdialog dengan Meneg BUMN. Pertimbangan Meneg BUMN, jika seluruh bisnis TNI dikonversikan ke BUMN, itu akan membebani anggaran pemerintah.

"Jadi lebih baik diswastakan sedikit, tapi dikelola dengan kendali negara. Prinsip keuntungan yang diperoleh dari pasar itu tetap diarahkan untuk meningkatkan 10 sampai 15 persen kesejahteraan atau gaji prajurit berpangkat rendah," kata Menhan.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dalam konferensi pers seusai acara Sertijab di Mabes TNI Cilangkap (20/2), meski tidak secara spesifik, menyinggung soal rencana pengambilalihan unit-unit usaha TNI dan ketersediaan anggaran APBN untuk TNI.

Kata Panglima, bukan hal yang mudah karena dilarangnya atau tidak diizinkannya TNI melaksanakan bisnis, dan sekarang semua bisnis TNI yang dikategorikan tadi sudah ditangani oleh tim verifikasi yang terdiri dari beberapa komponen departemen: Departemen Pertahanan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Keuangan.

"Dan sepenuhnya ada di tangan beliau (pemerintah) untuk menentukan akan di ke manakan bisnis TNI itu. Sehingga kesejahteraan prajurit, jaminan, dan pendidikan hidup itu memang sepenuhnya harus didukung oleh anggaran APBN," jelasnya.

Djoko menyadari kondisi perekonomian saat ini tidak memungkinkan terpenuhinya kebutuhan ideal TNI. Tapi,""Saya yakin sinergi antara Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes TNI AD, dan Mabes TNI AU, anggota Komisi I DPR, Panitia Anggaran DPR, Bagian Anggaran Keuangan Bappenas pasti mengerti betapa besar kebutuhan untuk nilai kesejahteraan."

TNI telah bersikap proaktif, 'periuk nasi'-nya yang diistilahkan pengamat militer LIPI Indria Samego sebagai *"necessary evil",* satu hal yang tidak bagus tapi sangat diperlukan, diambil alih pemerintah. Adakah kompensasi dari Pemerintah dan DPR? ■ AF

Hotel Kartika Chandra

Maskapai Penerbangan Mandala

PENUHI KEBUTUHAN TNI

Keberadaan TNI harus dilihat sebagai alat negara bukan sebagai alat pemerintah. Dia lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kebersamaan dengan rakyat adalah jati diri TNI. Menjaga pertahanan dan keutuhan wilayah NKRI, tugas TNI sebagai tentara profesional. Tapi peran TNI mengabdi pada kepentingan rakyat dan negara tak bisa diabaikan sebagai tentara rakyat.

Sejalan dengan pergantian tongkat komando Panglima TNI, pertanyaan besar "Ke mana TNI akan dibawa?" muncul ke permukaan. Sejarawan yang juga pengamat militer Anhar Gonggong menuturkan pandangannya dalam wawancara khusus dengan *Berita Indonesia*, terkait perkembangan TNI ke depan. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat perjalanan politik TNI ke depan?

Sejak awal, TNI sudah berpolitik. Pak Dirman (Jenderal Sudirman-red) sendiri juga ikut merumuskan Program Minimumnya Persatuan Perjuangan. Secara faktual, tidak beralasan membantah realitas bahwa Pak Dirman berpolitik.

Tapi ini jangan ditempatkan dalam pengertian yang negatif karena kondisi pergolakan dan perjuangan saat itu menghendaki bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya tanpa perundingan seperti yang sekarang ini.

TNI tidak punya lagi wakil di parlemen. Sejauh mana DPR dan Pemerintah memperhatikan nasib TNI?

Ya. Sebenarnya kan sederhana saja. Ada dua hal penting bagi tentara. *Pertama,* peralatan ketentaraannya. Kekuatan Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut harus dipenuhi dan diperjuangkan oleh DPR dan Pemerintah.

Kesejahteraan prajurit juga demikian. Masih banyak prajurit yang hidupnya serba kekurangan, tinggal di rumah yang bocor, dan tidurnya juga terasa *nggak* tenang. Jadi, posisi TNI sekarang sebagai alat negara dan mendukung pemerintah demi menegakkan republik.

Pandangan yang resisten terhadap hak pilih anggota TNI karena ada kekhawatiran TNI berpihak kepada kekuasaan?

Tidak. Ini karena kita masih dibayangi trauma masa lalu. Itu *kan* sudah terpotong. Kalau ada yang mengajak tentara berpolitik, dianya yang ditangkap, bukan tentaranya yang disalahkan! Hak pilih prajurit menurut saya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting harus ada aturan yang jelas. Apakah 2009 atau 2014 itu urusan lain.

Pengamatan Anda pada netralitas TNI?

Itu yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. TNI itu tugasnya menjaga negara bukan menjaga pemerintah. Pemerintah berganti setiap lima tahun sedangkan negara tidak. Negara akan berubah kalau ada revolusi tertentu. Misalnya Uni Soviet dan Eropa Timur hilang. Tapi itu melalui proses sejarah tersendiri.

Latar belakang sejarahnya juga berbeda dengan kita. Karena itu, TNI terus berupaya dalam posisi netralitasnya mempertahankan eksistensi negara.

Peran TNI menganut sistem pertahanan rakyat semesta dan kemanuggalannya dengan rakyat. Bagaimana Anda melihat perbedaannya dengan tentara negara lain?

Itu hanya istilah. Artinya kita memperoleh kemerdekaan bukan dari hadiah melainkan perjuangan rakyat dan TNI. Sehingga TNI membentuk dirinya sendiri. Ini kekuatan yang melekat dalam jiwa dan ruhnya TNI. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan misalkan negara bekas jajahan Inggris seperti India dan Malaysia. Malaysia itu tidak punya tentara. Tentara kita tidak dibentuk oleh Belanda. Seperti halnya tentara India dan Malaysia.

Soal bisnis TNI yang akan diambil alih pemerintah?

Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan Departemen Keuangan bisa menghitung dan mengkajinya karena mereka yang menguasai masalah anggaran dan pengkajian alat-alat negara.

Tentara juga pegawai negeri. Tentu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi kita.

Reformasi internal TNI sekarang?

Sudah berjalan baik. Pergantian Panglima TNI sekarang juga wajar, bahkan terlihat reformis. Dengan tidak memilih-milih dari angkatan mana panglimanya. Selama ini Panglima TNI dari Matra Darat kini giliran Matra Udara tentu satu hal yang bagus.

Dan harus diingat, tidak ada negara yang bisa eksis tanpa tentara. Tentara itu adalah pilar negara kita. TNI menjadi garis terdepannya.

DPR dan pemerintah jangan hanya bisa menuntut TNI profesional. Tapi jangan lupa sarana untuk mewujudkan profesionalisme itu. Profesionalisme itu memerlukan kecukupan peralatan dan biaya. ■ SB

ANHAR GONGGONG

Kondisi alutsista TNI jauh dari kebutuhan ideal. Keterbatasan anggaran jadi salah satu kendala. Bagaimana TNI menyikapinya?

ALUTSISTA TNI, MERANGKAK MENGIKUTI

Sepertinya sudah menjadi rahasia umum, peralatan utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI saat ini jauh dari kebutuhan ideal. Kondisi yang demikian tentu sangat mempengaruhi tingkat operasional prajurit TNI dalam mengemban tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman potensial maupun faktual.

Bisa dibayangkan, bagaimana mendeteksi adanya pesawat terbang asing yang melintas kalau radar yang dimiliki tidak bisa beroperasi secara optimal, memonitor 24 jam penuh dalam memantau seluruh wilayah Nusantara. Demikian juga kesiapan pesawat pemburu dalam "menyergap" pesawat asing yang menyelinap.

Sementara luas lautan yang demikian kaya dengan sumber daya alam sulit ter*cover* secara penuh mengingat keterbatasan kapal yang dimiliki armada TNI AL. Demikian pula alutsista yang dimiliki TNI AD terkendala dengan usianya yang sebagian sudah "uzur" dan perlu diremajakan.

Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dalam suatu kesempatan melontarkan rasa prihatinnya atas alutsista yang dimiliki TNI. Namun di sisi lain dia juga menyoroti soal pentingnya mengakhiri dan membongkar praktik mafia *supplier* dan pengadaan alutsista yang ada di lingkungan TNI. Karena, menurutnya, sudah bukan rahasia bahwa selama bertahun-tahun hanya kalangan tertentu yang mendominasi bisnis dan *supplier* di kalangan militer.

Dalam tulisannya di *Indo Pos* (8/2), anggota Dewan yang membidangi masalah hankam ini menyebutkan, peralatan radar udara didominasi Thomson dari Perancis dan peralatan infantri banyak dari negara Eropa. Sedangkan kapal-kapal sudah sangat tua, tetapi menggunakan rudal-rudal modern bikinan Prancis.

Mafia *supplier* itu perlu diberantas karena mereka telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit di kalangan militer. Termasuk menyebabkan inefisiensi dalam pengadaan barang di lingkungan TNI. Bahkan tidak jarang, barang yang dibeli tidak sesuai dengan rencana. Akibatnya, barang yang dibeli tidak sesuai dengan kepentingan, tetapi karena ulah nakal para *supplier* itu, negara harus tetap membayarnya.

Terbatasnya alutsista ini secara terbuka diakui Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto. Dalam jumpa pers seusai acara serahterima jabatan dari Jenderal TNI Endirartono Sutarto di Mabes TNI (20/2), Marsekal berbintang empat ini menyatakan, peralatan TNI dewasa ini masih jauh dari cukup untuk melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada TNI seperti tertuang dalam UU No 34 tahun 2004.

Keterbatasan alutsista seperti pesawat dan kapal perang menyebabkan intensitas dan frekuensi patroli yang dilakukan belum maksimal seperti yang diharapkan. Kapal TNI AL misalnya mungkin hanya 3 – 4 kali melakukan patroli dalam seminggu. Sementara pesawat TNI AU melakukan patroli seminggu dua kali ke seluruh perbatasan pulau-pulau terluar. "Tapi itu adalah perwujudan kepedulian kita terhadap pengamanan wilayah perbatasan", tegasnya.

Karena itu salah satu prioritas programnya ke depan adalah bagaimana mengupayakan melengkapi alutsista tersebut, baik untuk TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Sebagai gambaran, Suyanto menyebutkan empat pesawat Sukhoi yang dimiliki TNI AU saat ini akan diupayakan menjadi satu skuadron. Pengadaannya akan menggunakan Kredit Ekspor senilai 330 juta dolar AS. Pesawat Sukhoi tambahan itu berjenis SU-30 dan SU-27 yang akan dimodifikasi sesuai kebutuhan TNI-AU.

Sebelumnya, mantan KSAU ini juga menyatakan akan menambah jumlah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan pesawat angkut Hercules pasca pencabutan embargo senjata oleh AS.

Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI Sagom Tamboen seperti pernah ditulis *Berita Indonesia,* menyatakan, TNI AU memiliki 122 pesawat dari ber-

ANGGARAN

bagai jenis untuk menjaga 5,8 juta kilometer persegi luas wilayah Nusantara. Dia membenarkan kalau dari hampir seluruh pesawat yang diantaranya buatan Amerika Serikat dan Inggris itu tingkat kesiapan operasionalnya sudah jauh menurun dibanding pada saat pertama kali diterima TNI AU. Kondisi ini, menurutnya, tidak terlepas dari embargo senjata yang dilakukan AS.

Khusus untuk pesawat yang umurnya lebih dari 20 tahun, seperti OV-10 Bronco dan Hawk MK 53, kini dalam kajian TNI-AU untuk diganti dengan jenis pesawat yang punya kemampuan sama guna lebih mengoptimalkan sistem pertahanan udara.

Panglima TNI juga memaparkan upaya pemenuhan Alutsista TNI AD, seperti penambahan panser dan senjata perorangan buatan PT Pindad yang masuk skala prioritas.

Ke depan, menurutnya, akan dikaji kemungkinan penambahan pesawat helikopter multiguna Mi-35 dari Rusia yang saat ini baru ada dua buah. Karena jelas belum merupakan suatu kekuatan operasional yang ideal.

Idealnya 274 Kapal

TNI AL yang mengemban tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut, seperti diakui KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto usai Rapim TNI AL di Mabesal, Cilangkap (Republika, 1/3), idealnya memiliki 274 kapal. Namun saat ini pihaknya baru memiliki 114 unit kapal. Soal kapan kebutuhan ideal ini bisa dipenuhi, Soebijanto berujar :

"Tergantung kemampuan pemerintah". Yang jelas tahun ini TNI AL akan mendapat dua kapal fregat. Sementara dua lagi kapal korvet kelas Sigma tahap kedua yang dipesan dari Belanda diusulkan bisa dialihkan untuk pengadaan kapal perang dari Rusia. "Karena secara kuantitas jumlah yang bisa dibeli dari Rusia bisa lebih banyak dan juga sudah lengkap dipersenjatai", ujar KSAL usai menghadiri silaturahmi wartawan dan Mabes TNI AL di Graha Marinir, Jakarta (Kompas, 3/2).

Slamet Soebijanto juga mengatakan pihaknya akan melakukan"*repowering* (penggantian mesin) pada kapal-kapal tua, termasuk 39 kapal eks Jerman Timur. Mesin diesel baru bagi kapal itu diharapkan dapat dibeli di dalam negeri.

Marsekal Djoko Suyanto mengakui perlu penentuan skala prioritas dalam pengadaan alutsista dari masing-masing angkatan. Karena dihadapkan dengan kendala keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah.

Hanya 3% dari APBN

Memang salah satu kendala utama pengadaan alutsista ini adalah soal anggaran. Untuk tahun fiskal 2006 ini seperti diutarakan Menhan Juwono Sudarsono, *(Suara Karya,* 1/2*)* Dephan memperoleh anggaran Rp 28,2 triliun untuk trimatra (AD, AL dan AU) atau naik sekitar Rp 5,1 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Walaupun ada kenaikan, nilainya itu hanya 3 sampai 4% dari APBN dan kurang satu persen dari PDB yang berjumlah sekitar 368 miliar dolar AS. Anggaran Dephan ini (termasuk untuk Mabes TNI dan ketiga Angkatan) relatif kecil dibanding negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai 6 - 8 % dari APBN-nya dan di atas 3% dari PDB-nya.

Dari total anggaran tiap angkatan, menurutnya, hanya 30 sampai 35 persen dialokasikan untuk pengembangan dan perawatan alutsista. Sedangkan 60 - 70 persen anggaran untuk personil dan operasional administrasi.

Untuk itu kini sedang dilakukan hitung-hitungan agar pertahanan negara betul-betul dilaksanakan atas kemitraan dan harmonisasi di antara instansi-instansi pemerintah.

Presiden dalam suatu kesempatan memimpin rapat khusus yang membahas program pengadaan alutsista bagi TNI tetap menekanan pentingnya mengembangkan industri pertahanan berbasis produksi dalam negeri. Ini perlu dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa AS tidak akan menjatuhkan embargo lagi di masa datang.

Djoko Suyanto pun mendukung kebijakan memberdayakan industri strategis dalam negeri untuk pengadaaan alutsista. Selama ini upaya ke arah itu telah dilaksanakan TNI. Misalnya TNI AU menetapkan PT Dirgantara Indonesia sebagai pemasok komponen pesawat Cassa 212, helikopter Super Puma dan CN-235.

Tentang pengadaan alusista dari luar, menurut lulusan terbaik Akabri 1973 dan peraih bintang Adhi Makaysa ini, TNI tidak akan bergantung pada satu negara. "Kita akan memiliki beberapa alternatif negara sebagai sumber pengadaan alutsista TNI", ujarnya.

Kondisi alutsista yang kurang ideal saat ini sudah sewajarnya mendapat perhatian serius dari TNI, pemerintah dan DPR. Betapa riskannya kemampuan persenjataan utama TNI dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga keamanannya. Mengingat anggaran negara yang masih terbatas, kiranya perlu dicari terobosan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. ■ SP

♦ MARSEKAL TNI DJOKO SUYANTO, SIP

PENERBANG HANDAL SIAP TERBANGKAN TNI

Diangkat dan dilantiknya Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai Panglima, menorehkan sejarah baru bagi TNI. Karena baru kali ini jabatan Panglima TNI diisi oleh Perwira Tinggi dari Angkatan Udara. Kini, Djoko Suyanto siap terbang.

Senin, 20 Februari 2006, menjadi hari istimewa bagi Djoko Suyanto. Setelah seminggu sebelumnya dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono Sutarto, Djoko dituntut untuk segera melaksanakan tugasnya. Penyerahan tongkat komando dan panji-panji TNI, menandai upacara serah terima jabatan Panglima tersebut. Artinya, saat itu pula Djoko berhak mulai mengawali tugasnya.

Peristiwa ini bukan saja menjadi hari yang istimewa, tapi juga menjadi sejarah baru utamanya bagi TNI. Sebab baru kali ini Panglima TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Angkatan Udara. Berbagai pihak menilai, jabatan Panglima TNI sangat tepat berada di pundak seorang perwira Tinggi dari TNI Angatan Udara. Hal ini dikaitkan dengan luasnya wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke yang sama luasnya dengan wilayah London ke Baghdad.

Demikian luas wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut, maka hakekat ancaman tentu yang paling memungkinkan adalah dari udara dan laut.

Banyak Barikade

Kali ini, bukan saja sejarahnya yang istimewa, tapi juga berbeda dengan penunjukan dan pengangkatan Panglima TNI terdahulu. Marsekal TNI Djoko Suyanto mengalami banyak 'barikade' sebelum akhirnya terpilih sebagai orang nomor satu di tubuh TNI. Sejak awal, ketika Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto menyatakan mengundurkan diri, sudah ada pihak-pihak tertentu yang mengajukan calon penggantinya.

Namun, ternyata situasi dan kondisi berkata lain. Akhirnya, pilihan terhadap Marsekal bintang empat itu kian mengerucut dan nama Djoko Suyanto terus mengangkasa. Namun, pria kelahiran Madiun, 2 Desember 1950 itu tetap *low profile.* Ketika namanya disebut sebagai calon tunggal, ia sudah mendapat ucapan selamat dari para koleganya, termasuk para wartawan. Ia mengucapkan terimakasih dengan ucapan selamat itu, tapi Djoko juga berucap, "Masih ada tahapan lain di DPR," katanya dengan suara tenang.

Tahapan di DPR itu adalah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Saat itu, bukan saja nyali dan ketangguhan Djoko diuji, tapi juga kredibilitas visi dan misinya. Para anggota Komisi yang diketuai Theo L. Sambuaga itu membombardir Djoko dengan berbagai pertanyaan hingga 13 jam. Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengomentari 'ujian' yang dijalani Djoko ini sebagai ujian *fit and proper test* terlama di dunia. "Jadi layak masuk "*Guiness Book*," ujarnya berkelakar.

Begitu banyaknya tahapan yang harus dilalui putra

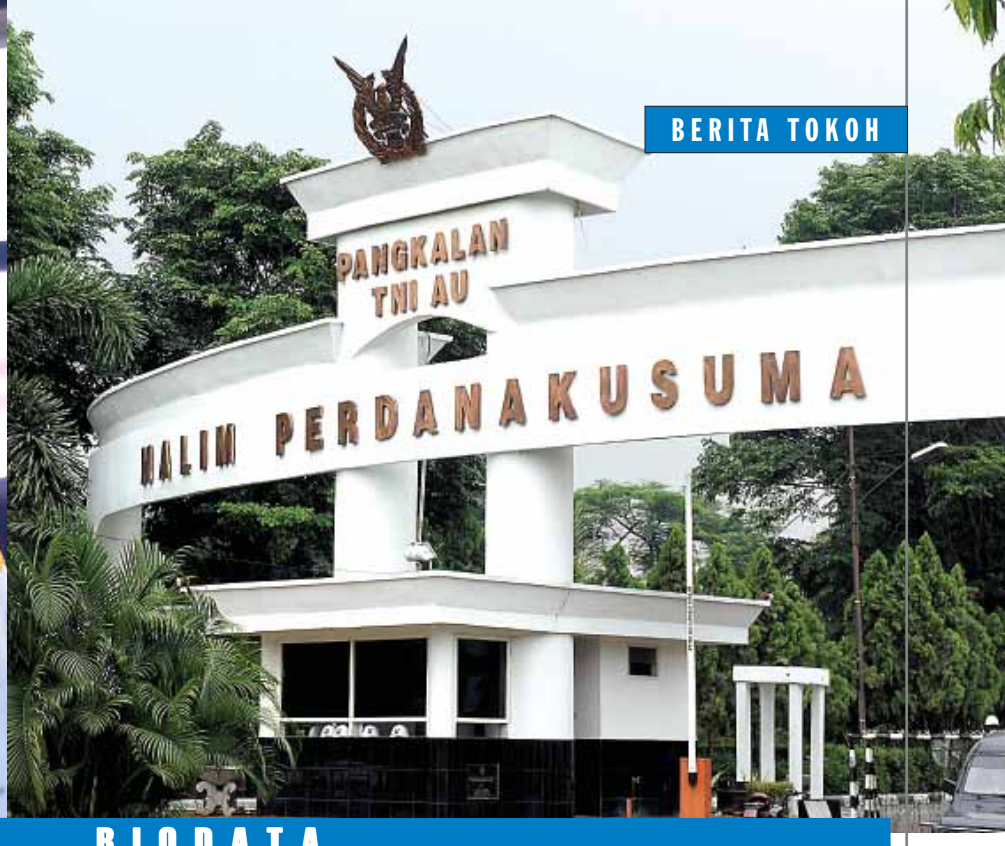

BIODATA

NAMA: Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP **LAHIR:** Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950 **JABATAN:** Panglima TNI **AGAMA:** Islam **ISTRI:** Ratna Sinar Sari **ANAK:** Yona Didya Febrian (alm), Kania Devi Restya **PENDIDIKAN:** AKABRI Bagian Udara (1973), Sekolah Penerbang XX/Lulusan Terbaik (1975), Seskoau (1990), KRA – XXXII Lemhanas (1999), RAAF Flying Instructor Course, Australia (1980), Test Pilot Course F-5, USA (1982), F-5 Fighter Weapon Instructor Course, USA (9183), Joint Services Staff College, Australia (1995), **KARIR:** Komandan Skuadron Udara 14 (F-5E Tiger II), Madiun (1990), Komandan Lanud Jayapura (1992), Kepala Staf Koopsau I, Jakarta (2000), Panglima Koopsau II, Makassar (2001), Komandan Kodikau, Jakarta (2002), Asisten Operasi KSAU, Jakarta (2003), KSAU (2005), Panglima TNI (2006) **TANDA KEHORMATAN:** Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama, Bintang Bhayangkara Utama, Satyalancana Kesetiaan VII/XVI/XXIV Tahun, Satyalancana Dwidya Sistha, Satyalancana GOM VII/IX, Satyalancana Seroja.

seorang Mayor Purnawirawan yang juga pernah bertugas di Lanud Iswahjudi ini, maka penunjukan dan pelantikannya sebagai Panglima TNI menjadi *surprise,* terutama bagi keluarga besar TNI Angkatan Udara.

Kendati telah membuat kejutan besar bagi korpsnya, sosok Djoko Suyanto tetap sosok *low profile*. Dalam amanat Sertijabnya, suami Ratna Sinar Sari ini mengatakan, "Saya sadari bahwa jabatan Panglima TNI adalah merupakan amanah dan tugas yang harus saya pertanggungjawabkan sebaik-baiknya."

Banyak Teman, Disiplin dan 'Gak neko-neko'

Website *Tokoh Indonesia* mencatat, Djoko adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Di masa muda ia dikenal sangat disiplin, bersahaja dan tidak *neko-neko* atau tidak aneh-aneh. Sikap disiplinnya itu konon diwarisi dari sang ayah, yang juga anggota TNI AU berpangkat mayor.

Sikap itu ditunjukkan ketika ia bermain band dengan teman-teman SMA-nya. Salah seorang teman satu SMA, Aryadi Syamsu menceritakan. Saat itu semua pemain band memanjangkan rambutnya. Tapi, Djoko tidak mau ikut-ikutan menggondrongkan rambutnya. "Kami mengenal Djoko sebagai sosok yang disiplin," kata Aryadi, seperti dikutip Harian *Indo pos.*

Selain itu, jiwa kepemimpinan Djoko juga sudah terlihat sejak di bangku sekolah lanjutan atas. "Jiwa kepemimpinan dan kedisiplinannya sudah terlihat saat itu. Meski aktif di band, pelajaran sekolah tetap diutamakan. Nilainya tetap tinggi sehingga ia masuk jurusan Ilmu Pasti," cerita Bagas, salah seorang teman Djoko sewaktu di SMA 2 Madiun.

Karena 'memiliki sesuatu yang lebih' dibanding teman-temannya, maka ketika di bangku SMA banyak anak perempuan yang suka padanya. Namun, Djoko tidak menanggapinya dengan serius. Malah kalau ada temannya yang berusaha mencomblangi, Djoko marah. Ia hanya tertarik pada gadis bernama Ratna yang tak lain adik kelasnya di SMA. Namun, ia baru berani memacarinya setelah lulus AKABRI Udara tahun 1973. Gadis Madiun bernama Ratna Sinar Sari inilah yang kemudian disuntingnya sebagai istri. Dari pernikahannya dengan Ratna Sinar Sari mereka dikarunia dua orang anak, Yona Didya Febrian (alm) dan Kania Devi Restya.

Siap Terbang

Setelah lulus dari AAU, Djoko melanjutkan Sekolah Penerbang dan lulus tahun 1975. Kemudian mengikuti Sekkau (1982) Seskoau (1990), JSS Australia (1995), KRA XXXII Lemhanannas (1999). Dari Letda (1973) Marsma TNI (1997), Marsekal TNI (2005), banyak jabatan yang diembannya. Yakni Komandan Skadud 14 (F-5E Tiger II) di Madiun. Selama berada di Skadud 14, itulah Djoko menjadi salah satu penerbang pesawat tempurnya dengan *call sign* "Beetle" dan "Thunder-35."

Kemudian berturut-turut dipercaya menjabat Komandan Lanud Jayapura, Komandan Lanud Iswahjudi di Madiun, Panglima Kosekhanudnas I di Jakarta, Kepala Staf Koopsau I di Jakarta, Panglima Koopsau II di Makassar, Komandan Kodikau di Jakarta, Asisten Operasi Kasau dan Kasau. Sebagai penerbang handal, sejauh mana dan setinggi apa ia akan menerbangkan Tentara Nasional Indonesia? Masyarakat menunggu aksinya! ■ TI, AD

Letjen TNI (Pur) H. Budi Harsono

JANGAN HILANGKAN JATI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati diri TNI.

Budi Harsono, pensiunan Jenderal Bintang Tiga TNI-AD, menggarisbawahi hal itu. Menurut mantan Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (2001-2002) itu, profesionalisme TNI sudah sepantasnya seperti halnya tentara di banyak negara di dunia. Profesionalisme tentara bersifat universal.

Jati diri TNI adalah kebersamaannya dengan rakyat, karena TNI mengabdi pada kepentingan rakyat. "Jadi tidak boleh dihilangkan, apapun alasannya," jelas anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2004-2009) yang pernah menjabat Assospol Mabes ABRI (1996) itu kepada **Anis Fuadi** dari *Berita Indonesia*, dalam satu kesempatan bincang-bincang di ruang kerjanya Gedung DPR/MPR, Jakarta, akhir Februari silam.

Di bawah ini bisa disimak paparan lengkap seputar persepsi, harapan, sekaligus keprihatinan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar (2002-2004) itu ihwal jati diri TNI.

Bisa Bapak jelaskan apa itu jati diri TNI?

Tentara di setiap negara memiliki ciri khas dalam proses kelahirannya dan berproses sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tentara harus memiliki kekhasan agar tak mudah dilumpuhkan.

Begitu pun dengan TNI. Proses pembentukannya berawal dari rakyat pejuang bersenjata yang disatukan ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR adalah embrio sekaligus bukti TNI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. TNI mengabdi pada kepentingan rakyat. Ada kebersamaan TNI dengan rakyat. Itulah jati diri TNI yang menjadi ciri khasnya.

Jati diri TNI bukan sesuatu hal yang dicari-cari atau direkayasa, tapi sudah terbentuk sejak lahir. Jati diri TNI menyiratkan kebersamaan rakyat dengan tentara. Jati diri inilah yang membuat TNI kuat.

Realitas itu yang tidak boleh dihilangkan dari sejarah bangsa ini. Bangsa ini sama artinya telah melupakan sejarahnya sendiri bila memisahkan TNI dari rakyat. Selamanya, TNI tidak boleh dipisahkan dari rakyat. Bila dipisahkan dari rakyat, TNI tidak punya kekuatannya lagi (lemah) karena telah kehilangan jati dirinya.

TNI tidak punya kekuatan lagi secara batiniyah, atau akan kehilangan ruhnya, jika terpisah dari rakyat. Bila TNI kehilangan kekuatannya, akhirnya, bangsa ini akan menderita.

Untuk konteks kekinian, di manakah jati diri TNI idealnya berada?

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seluruh komponen bangsa dilibatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada setiap langkah yang ditempuh bangsa ini mencapai tujuan itu, sampai kapan pun, sebagai bagian dari rakyat TNI tetap harus diikutsertakan. TNI jangan ditempatkan di luar proses perjuangan itu. TNI perlu diikutkan dalam proses itu. Jangan ditinggalkan begitu saja.

Bagaimanapun, TNI juga bertanggung jawab menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. TNI sepatutnya bisa menyalurkan pemikirannya untuk pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini sehingga TNI turut merasa memiliki negara ini.

Untuk menyumbangkan pemikirannya

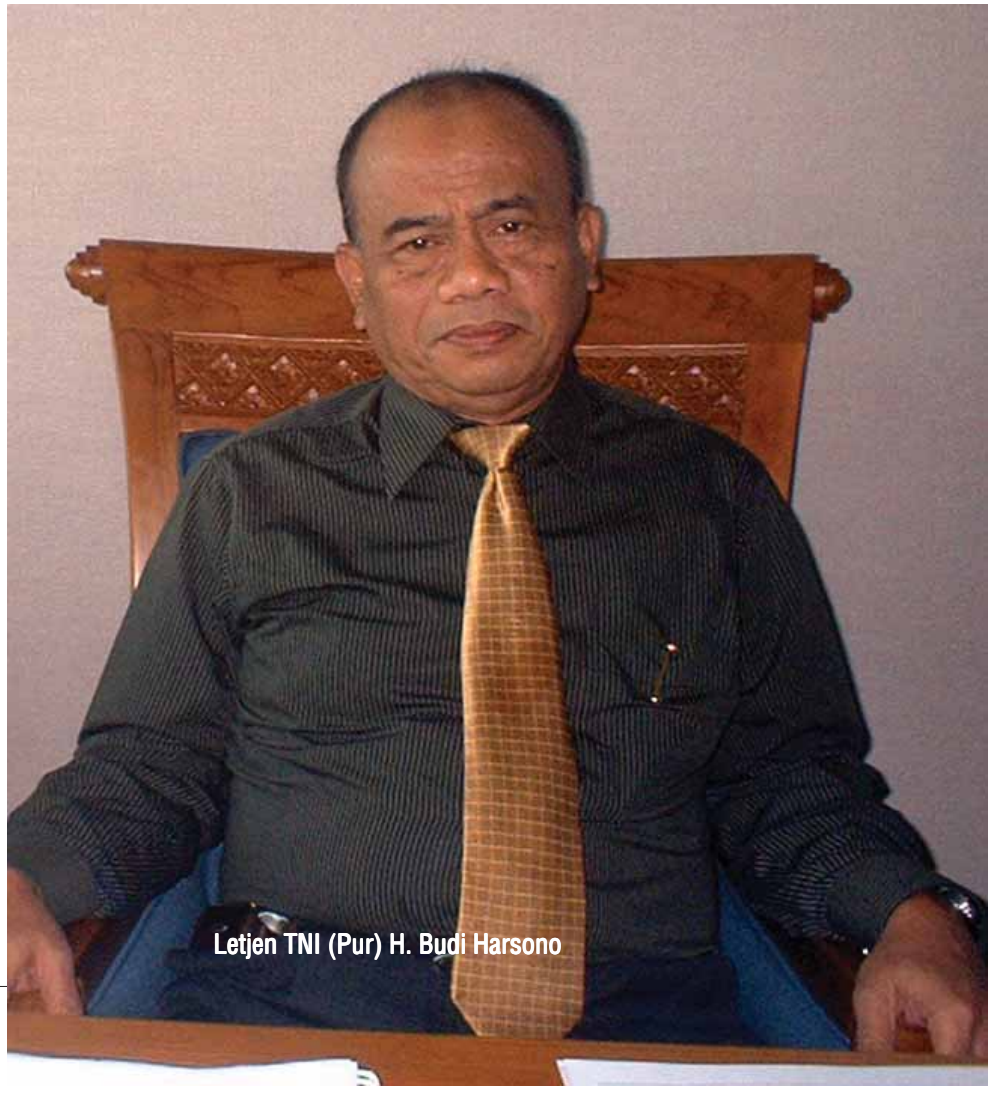

Letjen TNI (Pur) H. Budi Harsono

DIRI TNI

kan TNI tidak harus berada di parlemen seperti dulu, yang *nota bene* wilayah politik praktis. Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) atau Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), misalnya, bisa difungsikan sebagai wadah pemerintah mengakomodasi darma bakti, sumbang saran, gagasan, aspirasi, dan pemikiran dari TNI untuk bangsa dan negara ini, khususnya dari aspek Hankam.

Di negara manapun, tidak ada masalah yang didekati secara sektoral saja. Semua solusi atas masalah di berbagai bidang kehidupan yang dihadapi bangsa dan negara ini akan komprehensif bila juga didekati dari aspek Hankam.

Memang, tugas TNI menjaga kedaulatan negara dari pihak luar yang mengancam keselamatan bangsa. Tapi, tanggung jawab TNI bukan sekadar mempersepsikan ada atau tidaknya ancaman musuh dari luar secara fisik, tetapi juga ancaman nonfisik (seperti narkoba atau pornografi) yang akan melemahkan bangsa ini secara keseluruhan.

Soal tuntutan profesionalisme TNI?

Kita sepakat TNI harus profesional. Ketika kita bicara profesionalisme TNI, kita bicara soal profesionalisme tentara secara universal di dunia. Misalnya, kemampuan menggunakan senjata (tank, pesawat tempur, kapal laut) atau kemampuan taktis tentara dalam menyerang posisi musuh. Atau, kemampuan tentara menembak. Hal-hal teknis ketentaraan seperti itu *kan* bersifat universal. Kita bisa menyamakan profesionalisme tentara di Amerika, Indonesia, atau Singapura.

Lepas dari itu, selain profesionalisme, kekuatan TNI juga sangat didukung oleh semangat dan mentalnya sebagai bagian dari rakyat. Kekuatan khusus TNI adalah jati dirinya.

'Tentara bagiannya sudah mengurusi perang. Tentara yang profesional. Bagianmu itu saja!' demikian peran TNI diposisikan. Tapi menurut saya, janganlah TNI dikotak-kotakkan seperti itu sebab akan menghilangkan jati dirinya.

Maksud Bapak, profesionalisme jangan sampai menghilangkan jati diri TNI?

Benar. Sejarah TNI sangat berbeda, misalnya, dengan tentara di Malaysia atau di Thailand. Kita tidak bisa menyamakan jati diri TNI dengan tentara di negara-negara lain. Kalau dipersamakan begitu saja, jati diri TNI akan hilang. Padahal di situ kekuatannya.

Dengan semangat kebersamaan, TNI bersatu padu dengan rakyat yang hanya bersenjata bambu runcing mengusir penjajah yang memiliki persenjataan hebat.

Mengapa Vietnam bisa mengalahkan Amerika? Karena Vietnam punya senjata dahsyat yang menjadi kekuatannya, yakni kebersamaan tentara dengan rakyatnya.

Ada indikasi-indikasi upaya sistematis memisahkan TNI dari rakyat?

Saya belum melihat adanya tanda-tanda yang jelas ke arah itu. Tapi kewajiban saya sebagai mantan anggota TNI mengingatkan, jati diri TNI dan kebersamaan TNI dengan rakyat harus tetap dilestarikan.

Generasi Angkatan '45 telah mewariskan semangat kebersamaan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI-rakyat itu jangan sampai hilang. Jati diri TNI itu harus tetap dilestarikan sepanjang zaman oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tapi harapan Bapak akan berhadapan dengan sinisme dan trauma pada masa lalu?

Saya sangat menyadari, trauma terhadap eksistensi dan peranan TNI di masa lalu masih menghantui pikiran sebagian besar elit politik di negeri ini, termasuk rakyat sampai saat ini.

Kalau diibaratkan gerakan pendulum, dulu TNI bergerak terlampau ke kanan. Kini terlalu diayunkan ke kiri. Belum bergerak sampai ke tengah, posisi idealnya. *Nah*, untuk mengembalikan pendulum kembali ke tengah atau posisi ideal itu membutuhkan waktu dan proses.

Lepas dari realitas itu, kita harus memberikan informasi-informasi untuk meyakinkan masyarakat jati diri TNI sehingga tidak sampai timbul prasangka negatif bahwa TNI ingin berkuasa lagi atau TNI ingin berpolitik praktis lagi.

TNI sedang mengalami satu proses yang kurang menguntungkan bagi perjalanan pertumbuhkembangannya ke depan. Selama 30 tahun lebih TNI stagnan sehingga mengalami ketertinggalan dari negara-negara lain. Tertinggal baik di bidang profesionalismenya maupun jati dirinya. Kita ingin bandul itu mengayun ke tengah kembali.

Karena itu, kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat jangan sampai hilang. Tanpa rakyat TNI menjadi *nothing*. Tapi, bersama rakyat TNI menjadi *something*. ■

BIODATA

NAMA : Letjen TNI (Pur.) H. Budi Harsono

LAHIR : Yogyakarta, 13 September 1946

AGAMA : Islam

JABATAN SEKARANG: Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR-RI (Periode 2004-2009) dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat VIII (Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang) • Anggota Komisi VII DPR-RI (Bidang Energi Sumber Daya Mineral) DPR-RI • Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR-RI • Anggota Tim Sosialisasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR RI).

KARIER DI MILITER:

1. 1968-1976: (Letnan Dua-Kapten) Kodam IV/Diponegoro, Jawa Tengah: Komandan Peleton (Danton) Batalyon Infanteri (Yonif) 406, Gombong, Jawa Tengah (1968-Letda) • Komandan Kompi (Danki) Yonif 406, Gombong, Jawa Tengah • Perwira Staf Operasi Yonif 406 (1976-Kapten).
2. 1976-1983: (Mayor-Letnan Kolonel) Kodam II Bukit Barisan, Sumatera Utara: Perwira Papan Madya/Karo Operasi Kodam II BB (1976-1981-Mayor) • Wakil Komandan Yonif 122 Tebing Tinggi (1981-Mayor) • Kepala Staf Komando Distrik Militer (Kasdim) 0206 Rantau Prapat, Labuan Batu, (1981-1982, Mayor) • Kasdim 0201 Kota Besar Medan, Sumut (1982-1983, Letnan Kolonel).
3. 1984-1989: (Letnan Kolonel-Kolonel) Kodam III Siliwangi, Jawa Barat: Komandan Yonif 312 Kala Hitam, Subang, (1984-1985, Letnan Kolonel) • Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0617, Majalengka (1986-1988, Letnan Kolonel) • Kepala Staf Komando Resort Militer (Kasrem) 061 Bogor, (1988-1989, Letnan Kolonel).
4. 1989-1992: (Kolonel) Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad): Asisten Teritorial (Aster) Divisi I Kostrad, Cilodong, Jawa Barat (1989-1992, Kolonel).
5. 1992-1994: (Kolonel) Kodam III Siliwangi, Jawa Barat: Aster Dam III Siliwangi, (1992-1993, Kolonel) • Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 063 Cirebon, (1993-1994, Kolonel).
6. 1995-1997: (Kolonel-Mayor Jenderal) Mabes TNI: Paban Sospol Mabes TNI (1995-1996, Kolonel) • Wakil Asisten Sospol (Waassospol) Mabes TNI (1996-Brigadir Jenderal) • Assospol Mabes TNI (1996-Mayor Jenderal).
7. 1997-2002: (Mayor Jenderal-Letnan Jenderal) Fraksi TNI/Polri DPR-RI: Ketua Komisi II DPR-RI (1997-1999, Mayor Jenderal) • Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (1997-1999, Mayor Jenderal) • Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (2001-2002, Letnan Jenderal).

PENGALAMAN TUGAS MILITER: Operasi Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (1971-1972) • Operasi Timor Timur I (1981-1982) • Operasi Timor Timur II (1984-1985)

Menjaga Netrali

JUWONO SUDARSONO**

Seusai pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004, Presiden Yudhoyono menyampaikan dua pesan kepada saya sebagai menteri pertahanan. *Pertama*, agar netralitas Dephan/TNI dijaga. *Kedua*, pengelolaan anggaran Dephan/TNI dilaksanakan dengan cermat agar tidak terjadi penggelembungan dalam pengadaan alat utama sistem senjata.

Dua pesan itu bisa dipahami karena, selama puluhan tahun sejak 1952, peran politik TNI, khususnya Angkatan Darat, telah serba-hadir, serba di depan, dan serba menentukan.

Selama masa demokrasi parlementer 1945-1959, demokrasi terpimpin 1959-1966, dan Orde Baru 1966-1998, kehidupan politik nasional diwarnai satu hal mendasar: lemahnya kemampuan pemerintahan sipil.

Pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kelurahan, hingga desa, semua partai politik, Ormas pemuda, paguyuban, organisasi keagamaan unsur-unsur yang kini dikenal sebagai masyarakat madani lebih berfungsi sebagai kerumunan orang yang berputar pada tokoh. Namun, konsolidasi organisasi tak pernah dibenahi dengan seksama.

PNI, Masjumi, Nahdlatul Ulama, PKI - empat besar pada pada demokrasi parlementer tidak pernah mantap dan berlanjut melaksanakan konsolidasi. Di masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, partai politik kesayangan PNI tak pernah menjelma menjadi organisasi yang mencerminkan kemampuan organisasi yang berjangkau nasional menyeluruh.

Bahkan PKI, dengan 25 juta anggota pada puncak kejayaan 1965, ambruk setelah terlibat dalam G30/September, Oktober-Desember 1965, dihancurkan kekuatan masyarakat dan TNI.

Semasa Orde Baru, Presiden Soeharto mengonsolidasikan pemerintahan yang kuat dengan membangun jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) pasca-Pemilu 1971. Mesin politik ABG menjamin stabilitas politik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen setahun selama lebih dari 25 tahun.

PDB per kapita Indonesia 250 dollar AS/tahun (1971) menjadi 1.300 dollar AS/tahun (1996). Kuncinya pada soliditas ABG-ABRI (kini TNI) sebagai poros utama stabilitas politik.

Pesan 21 Oktober 2004 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: "Bantu saya menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Jaga, pelihara netralitas TNI, dan benahi proses pengadaan senjata-perlengkapan TNI di lingkungan Dephan/TNI."

Posisi Sentral

Dalam format politik ketat-kencang seperti itu, peran TNI yang berpihak kepada birokrasi (Korpri) dan organisasi politik tunggal (Golkar) membuat kedudukan dan peran Dephankam/Mabes ABRI dalam posisi sentral.

Menhankam/Pangab selama 1969-1998 menjadi bagian kemampuan Presiden Soeharto terpilih berulang dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan kemenangan di atas 62 persen.

Turunnya Presiden Soeharto 21 Mei 1998, reformasi politik ekonomi, dan sosial menghasilkan format baru supremasi sipil,

tas TNI

penghormatan pada asas-asas demokrasi dan hak asasi manusia, akuntabilitas dan "keluarnya TNI dari gelanggang politik praktis".

Adalah Yudhoyono bersama 24 perwira tinggi di Mabes ABRI sejak Oktober 1997 menggulirkan gagasan "redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi" peran TNI dalam tatanan politik Indonesia. Harapan tersirat, kalangan sipil meningkatkan kemampuan tata pemerintahan.

Selama tahun-tahun transisi 1999-2004, tiga perwira tinggi TNI berperan besar dalam mengawal transformasi politik Indonesia sejak Mei 1998: Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Menko Polkam, 2000-2004), Laksamana TNI Widodo AS (Panglima TNI, 1999-2002) dan Jenderal TNI Endriartono Sutarto (Panglima TNI, 2002-2006).

Dalam masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, ketiga presiden sipil itu berusaha memperoleh dukungan TNI kepada partainya (Golkar-BJ Habibie, PKB-Abdurrahman Wahid, dan PDIP-Megawati Soekarnoputri).

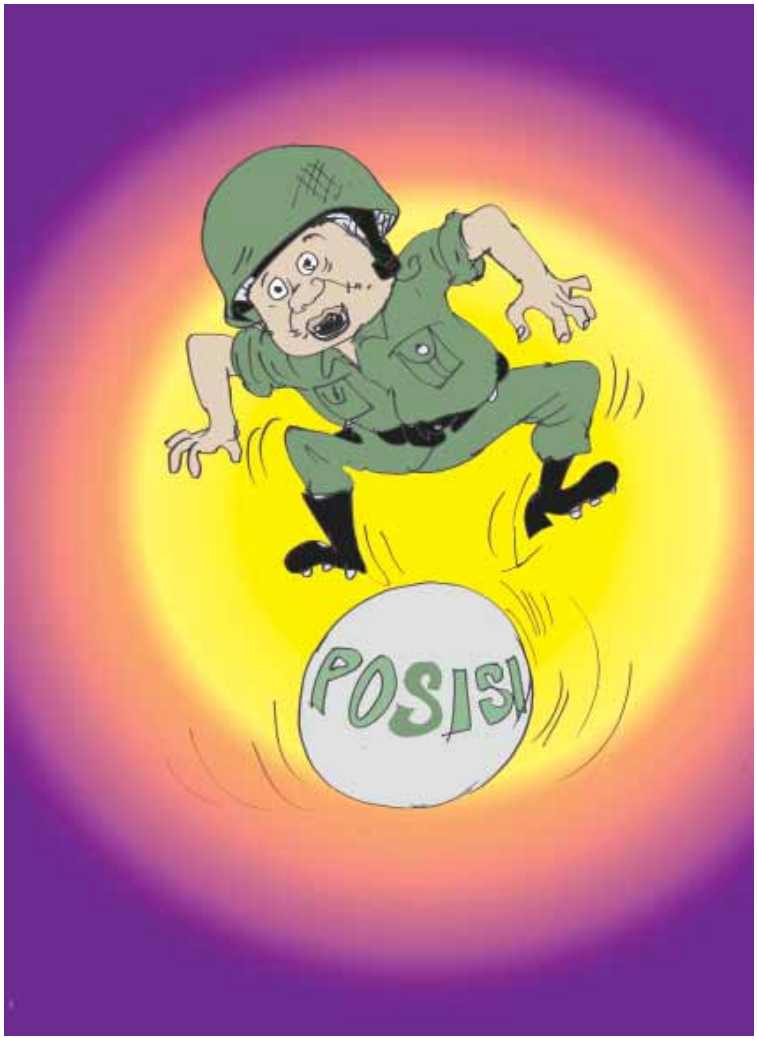

Tetapi dengan cerdas, Yudhoyono, Widodo AS, dan Endriartono menjaga jarak agar TNI tidak dipakai untuk kepentingan partai politik atau koalisi partai yang dipimpin masing-masing presiden sipil tadi.

Yudhoyono sendiri menghadapi kendala gerak sebagai calon presiden selama kampanye pemilu legislatif (Maret-April 2004) dan Pemilu presiden (Juni-September 2004). Termasuk penghadangan aparat pemda dan polisi untuk mengunjungi Pacitan, Jawa Timur.

Pemantapan Citra

Belajar dari pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi sebagai calon presiden, Presiden Yudhoyono menyampaikan pesan 21 Oktober 2004. "Bantu saya menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Jaga, pelihara netralitas TNI, dan benahi proses pengadaan senjata-perlengkapan TNI di lingkungan Dephan/TNI. Dalam Pemilu 2009 saya ingin semua calon presiden menang atau kalah dengan cara demokrasi, terhormat, dan fair. TNI tidak boleh dilibatkan dalam politik praktis".

Pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto (AAU 1973) sebagai Panglima TNI pertama dari Angkatan Udara adalah langkah pemantapan netralitas TNI untuk dua tahun mendatang.

Tak perlu dikhawatirkan adanya posisi strategis TNI dipegang Angkatan'73. Misalnya Laksamana TNI Slamet Soebijanto (KSAL), Mersekal TNI Herman Prayitno (KSAU), Mersekal Madya TNI Toto Rijanto (Wagub Lemhannas), Laksda Imam Zaky (Wakil Irjen Mabes TNI). Adalah logis jika dua tahun lagi, KSAD kini, Djoko Santoso (Akmil'75), menjadi Panglima TNI menjelang Pemilu 2009. TNI harus dan tetap netral.

Atas tekad Yudhoyono itu, seandainya tokoh Angkatan Darat ditetapkan sebagai Panglima TNI tahun 2008, hal itu bukan berarti Presiden Yudhoyono akan menggunakan TNI guna menggalang kekuatan partai politik seperti dilakukan empat presiden sebelumnya.

Lagipula, menjelang 2008-2009, jika masyarakat madani-terutama partai politik benar-benar membenahi diri, maka tekad dan janji Yudhoyono (21/10/2004) itu benar-benar dilaksanakan dengan seksama. Pemimpin partai politik seharusnya menyambut tekad Presiden Yudhoyono, Pemilu 2009 harus dilaksanakan secara demokratis, terhormat, dan fair.

Dalam politik, tekad saja bukan jaminan. Namun, Presiden Yudhoyono sadar, pengalaman "pengerahan" TNI dan Polri sebagaimana dilakukan para pendahulu selama 1999-2004 telah menciptakan antipati publik (dan TNI khususnya) serta akan memunculkan citra dirinya sebagai pemimpin yang tidak demokratis, tidak terhormat, dan tidak fair.

Dengan kata lain, keinginan Presiden Yudhoyono menjaga netralitas TNI demi demokrasi, supremasi sipil, dan hak-hak asasi manusia adalah bagian memelihara kredibilitas dan integritas politiknya. ■

*** Dikutip secara utuh dari artikel yang dimuat pada 14 Februari 2006 di Website Markas Besar TNI.**

**** Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu.**

Oleh: Syaykh Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang*

Syaykh Al-Zaytun

BAGIAN SATU
DARI DUA TULISAN

Lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Kelemahan produktivitas pengetahuan suatu negara (institusi) lebih dari apapun yang lain, merupakan pangkal dari kelambanan, erosi dan krisis yang tak berkesudahan pada sosial ekonomi negara.

PENDIDIKAN ... KEBANGKIT

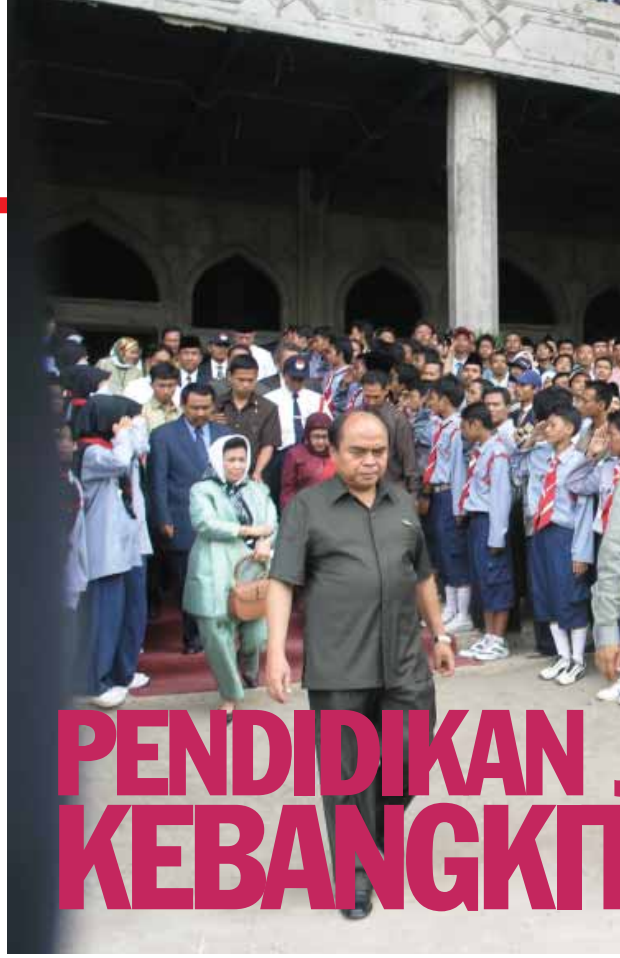

MENDIKNAS BAMBANG SUDIBYO MELANGKAH B

Kita di Indonesia jelas pengeluaran untuk produktivitas pengetahuan jauh lebih rendah dari pengeluaran lain-lainnya. Karenanya, dalam segala bidang produktivitas pengetahuan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara manapun. Bangsa kita juga belum mampu masuk ke dalam produktivitas pengetahuan baru, bahkan gagal sekalipun hanya untuk mengubah pengetahuan yang telah ada menjadi inovasi yang berhasil. Pengetahuan yang ada tetap merupakan informasi dan bukannya menjadi pengetahuan yang produktif.

Mestinya kita tidak usah takut menjadi modern, menjadi "terwesternisasi" dalam ekonomi, teknologi, institusi-institusi politik dan kemiliterannya asalkan kita tetap menjadi warga negara yang baik dan muslim yang taat serta Indonesia yang utuh.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia kepada pergaulan dan percaturan politik antarbangsa. Namun, dalam percaturan politik antarbangsa belakangan ini, Indonesia tidak banyak tampil berkesan, disebabkan berbagai krisis yang melanda di dalam negeri, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain (multidimensi). Daya saing sumber daya manusianya pun belum dapat diandalkan, memandangkan kualitas pendidikan yang dimiliki masih terus menjadi bahan diskusi. Semua itu merupakan pengalaman yang tidak mengenakkan namun harus dapat dijadikan pendorong untuk maju ke depan.

Islam dan Pesantren

Jauh sebelum tahun 1416 M (yang selalu diakui oleh banyak orang) Islam telah terdapat di tanah Jawa. Catatan batu nisan yang terdapat dalam makam tua atas nama Fatimah binti Maimun bertahun 475 H atau 1082 M, di desa Laren, Gresik. Ini menandakan bahwa jauh sebelum kewafatannya, Islam telah tersebar di daerah pantai tersebut.

Sepanjang catatan sejarah pada tahun-tahun tersebut belum terdapat bukti kuat tentang peninggalan yang berhubungan dengan adanya kegiatan pendidikan dan sarana pendukungnya. Barulah pada tahun 1416 M terdapat catatan yang menerangkan tentang orang-orang yang datang dari belahan barat yang bertempat tinggal di Indonesia, dan tentang orang-orang Tionghoa yang masuk Islam.

Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dekat Surabaya, seorang saudagar berasal dari Gujarat India, di samping peniaga ia mengajarkan agama Islam. Beliau wafat pada 822 H/1419 M (terukir pada batu nisan). Dan, Islam menjadi tersiar dalam kalangan rakyat banyak, bukan hanya di kota-kota pelabuhan dan pantai, namun penyiarannya sambung-menyambung sampai ke daerah-daerah pedalaman di pulau Jawa.

Banyak orang menganggap bahwa para penyebar Islam di tanah Jawa itu sebagai wali (orang yang dianggap dekat kepada Tuhan). Kebanyakan para wali itu datangnya dari negeri asing bahkan ada juga yang tidak jelas asal muasalnya. Dapat diduga, bahwa para wali itu dalam menyiarkan Islam tidaklah berbentuk pidato-pidato dan ceramah-ceramah di depan khalayak ramai seperti yang berlaku saat ini, namun dilaksanakan dalam kumpulan yang sangat terbatas, bahkan kebanyakan secara rahasia, kemudian diteruskan dari mulut ke mulut dan menjadilah pengikutnya semakin banyak.

Kemudian berkembanglah tempat penyampaian Islam menjadi dalam rumah-rumah perguruan, yang biasa dinamakan madrasah dan pondok. Pendidikan maupun cara penyampaian seperti itu menjadi tidak asing lagi pada waktu

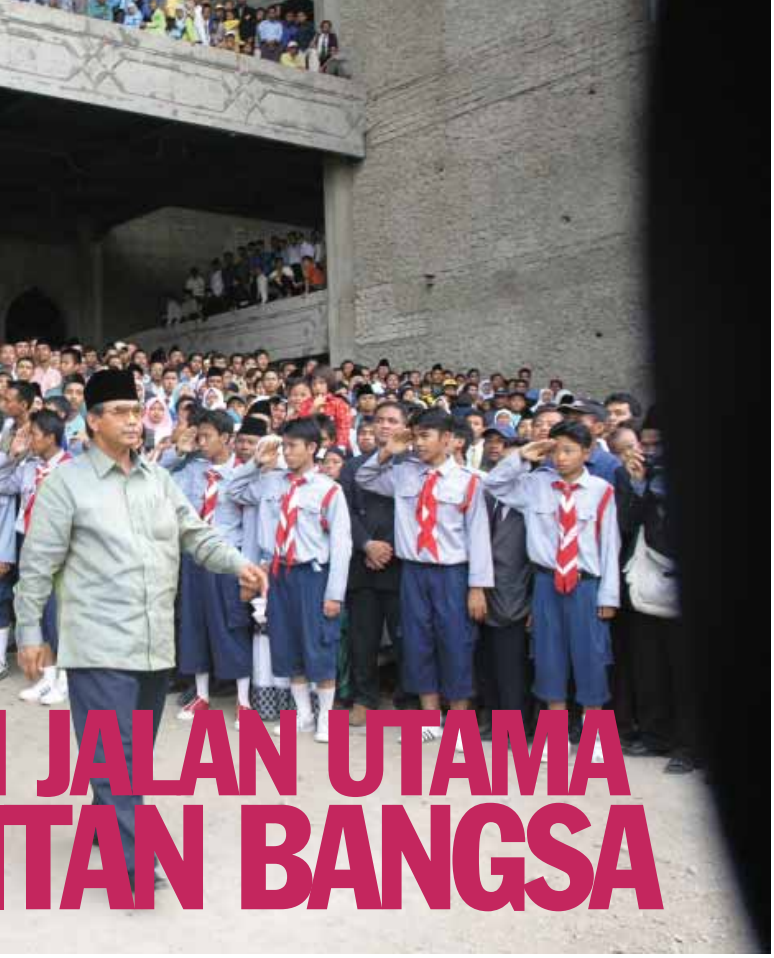

I JALAN UTAMA TAN BANGSA

H BERSAMA SYAYKH DR ABDUSSALAM PANJI GUMILANG

itu karena dalam masa yang sama sudah terdapat mandala-mandala Hindu di Jawa, yang selanjutnya dinamakan pesantren, yaitu tempat para santri atau mahasiswa berkumpul untuk mendapatkan pengajaran agama.

Syaikh Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai pencipta pondok pesantren yang pertama. Ia mengeluarkan mubaligh-mubaligh Islam, yang mengembangkannya ke seluruh tanah Jawa. Pondok pesantren pada zaman itu tidak dapat dibayangkan sebagai tempat pendidikan yang bersistem seperti sekarang ini, yang mempunyai daftar pengajaran, pembagian kelas, kontrol, dan evaluasi.

Cara belajar di pesantren ketika itu biasanya murid-murid tinggal di rumah guru yang sangat dihormati, sedikit demi sedikit guru menularkan ilmunya kepada mereka, dan terjadilah ikatan hidup yang kokoh antara guru dan para murid. Akan menjadi suatu kehormatan bagi seorang murid yang dapat mengikuti dengan seksama pengajaran yang diberikan oleh sang guru sampai dirinya menjadi kepercayaan, guru yang ia anggap bijak itu. Biasanya seorang murid itu dianggap mempunyai kelebihan dari yang lain dapat dilihat berapa lama ia dapat belajar di suatu perguruan atau pesantren.

Sedangkan seorang guru dalam masyarakat pesantren ketika itu mendapatkan penghormatan yang sangat besar dari anggota masyarakat sehingga mereka dianggap orang yang luar biasa, mereka menyebutnya sebagai wali, orang yang dapat mencipta hal-hal yang aneh dan ganjil, yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Pengaruh dan kekuasaan guru kepada rakyat sangat besar, tidak kurang dari pengaruh raja-raja yang hidup pada masa itu, sehingga umum memberikan gelar kepadanya sebagai sunan, yang biasa dipakai oleh raja-raja.

Itulah serba sedikit mata rantai pesantren di masa lampau, kemudian dari masa ke masa terjadilah perubahan-perubahan mengikut kehendak zaman. Intinya, pesantren adalah tempat berkumpulnya santri, tempat mereka menginap, tempat mereka menerima pendidikan dan pengajaran.

Biasanya pesantren itu terdiri dari beberapa bangunan yang melingkari sebuah masjid yang berada di dekat bangunan tersebut. Di Jawa dinamakan pesantren, di Madura penyantren, di Pasundan pondok, di Aceh bernama rangkang maunasah dan di Minangkabau surau. Kebanyakan pesantren biasanya berada di tengah desa dan kampung yang tanah dan bangunannya merupakan wakaf dan swasembada dalam membiayai dirinya.

Pada zaman yang lalu, pemerintah sangat memperhatikan keberadaan pesantren desa dan kampung yang terdapat di dalamnya pesantren sering disebut desa atau kampung Putihan, dan mendapat hak-hak istimewa dari raja-raja Jawa. Desa-desa seperti itu dibebaskan dari segala macam pajak, dibebaskan dari segala macam beban iuran negara, karenanya dinamakan desa perdikan (yang dibebaskan dari pembayaran pajak kepada pemerintah).

Sistem pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi-pribadi guru, tidak ada penyaringan dalam menerima murid maupun santri, bidang studinya pun terfokus kepada pelajaran-pelajaran yang mereka sebut sebagai pelajaran agama dan bahasa Arab, ilmu-ilmu yang dikenal dengan ilmu umum tidak diberikan dalam pesantren zaman itu.

Cara belajar mengajarnya pun terhitung sederhana, guru duduk di atas tikar sembahyang (sajadah) dikelilingi oleh beberapa santri, atau guru duduk dan menghadap kumpulan banyak santri yang berada di hadapannya.

Guru-guru seperti ini terkenal dengan panggilan kiai, mereka sangat berpengaruh kepada santri, selalu memberikan bimbingan keteladanan, kemandirian, cinta ilmu (sekalipun terbatas pada ilmu-ilmu yang dinamakan ilmu agama), dan rajin belajar serta membaca. Seperti itulah pendidikan yang berjalan sangat lama di Indonesia masa itu. Itulah potret pendidikan Indonesia sebelum datang sistem pendidikan modern.

Bahasa pengantar dalam pesantren adalah mengikut kelaziman yang dibawa oleh kiai, bahasa Jawa atau Melayu. Ini berarti sumber daya manusia Indonesia pada saat itu sangat terbatas kemampuannya untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, yang menandakan pendidikannya juga masih sangat terbatas. Sebab di negara-negara lain pada abad yang sama mereka telah memiliki sarana pendidikan yang dapat dikatakan memadai dan modern. Yang diceritakan ini terjadi pada abad ke-16 M.

Asing Menguasai Indonesia

Akibat kelemahan pendidikan suatu bangsa, mengakibatkan kelemahan ekonomi bahkan kelemahan politik dan persatuan. Pemerintahan dipegang oleh berbagai kesultanan yang tidak saling bersatu, dan kondisi bangsa Indonesia yang tidak siap dengan kekuatan pendidikan. Di saat seperti itulah datang kekuatan asing, yang jauh lebih siap dengan berbagai persaingan, baik kemampuan ilmu pengetahuan maupun kemampuan penguasaan lingkungan (sosial maupun politik). Kondisi seperti itulah yang menyebabkan mudahnya bangsa Eropa menjalankan politik kolonialnya di bumi Indonesia ini.

Portugis yang terusir dari Malaka menginjakkan kaki di bumi Maluku dan Ambon pada tahun 1511 M, disusul oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521, selanjutnya bangsa Inggris memasuki Ternate. Di tanah Jawa (Banten) Belanda mulai masuk pada tahun 1596 yang selanjutnya memasuki Ternate pada 1599 dan mereka dapat mengusir Portugis dari Maluku dan Ambon pada tahun 1605 juga mengusir Inggris dari Ternate dan Seram tahun 1615, seterusnya Belanda dengan leluasa menguasai Indonesia.

AL-ZAYTUN: Pendidikan Jalan Utama Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Verenigde Oos-Indische Compagnie, yang lebih dikenal dengan singkatannya VOC, adalah kongsi dagang yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Didirikan pada tahun 1602 di Amsterdam untuk memonopoli perdagangan pada saat itu, ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, di antara para penjajah Barat, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Belanda dengan VOC-nya dapat menguasai Indonesia dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya. Sejak tahun 1619 VOC dapat mendirikan tiga pangkalan utamanya di Indonesia, di Jakarta, Ambon dan Banda, sebagai pangkalan perdagangan dan monopoli rempah-rempah.

VOC yang merupakan badan swasta di samping mendapatkan hak monopoli perdagangan dari pemerintah Belanda, juga diberi hak-hak kekuasaan raja dan kekuasaan pemerintahan dan membentuk kekuatan militer untuk menaklukkan daerah-daerah tertentu di Asia yang dianggap penting. Dengan memiliki hak-hak seperti inilah Indonesia sepenuhnya dapat dikuasai oleh VOC atas nama kerajaan Belanda. Dan Indonesia mulai terjajah oleh kekuatan ekonomi perdagangan bangsa asing, yang dalam perjalanannya, mengukir cerita panjang dan meninggalkan bekas dengan berbagai implikasinya.

VOC selama hampir dua abad menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Setelah mengalami berbagai masalah pada akhir tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dibubarkan. Penjajahan terhadap Indonesia menjadi langsung oleh pemerintah Belanda. Selama hampir 200 tahun VOC berkuasa di Indonesia, belum tercatat dalam sejarah tentang perhatiannya terhadap pendidikan untuk pribumi. Selama kurun waktu sekian panjangnya, pribumi Indonesia masih menempuh pendidikan sistem pesantren yang diuraikan terdahulu (dengan sistem yang sangat sederhana). Pada abad berikutnya, setelah kekuasaan penjajahan berpindah ke tangan pemerintah Belanda, terjadi perubahan sistem penjajahan, sekalipun tetap membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia, namun terdapat efek positif pada bidang pendidikan bangsa terjajah.

Sistem perkebunan atau *cultuurstelsel*, yang dalam sejarah Indonesia dikenal dengan "tanam paksa" dijalankan di Indonesia khususnya di tanah Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830-1870. Dirancang oleh Gubenur Jenderal J. Van den Bosch, untuk mengatasi kekosongan keuangan negara induk (Belanda). *Cultuurstelsel* ini pun membawa akibat kesengsaraan bagi rakyat, sekalipun dalam peraturannya tampak ringan dan baik. Sebagian peraturan itu adalah mempersiapkan tanaman ekspor seperti, kopi, tebu, nila, dan tembakau.

Peraturan pemerintah kolonial menyebutkan kebun bertanaman ekspor bebas pajak tanah. Kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan ke desa atau rakyat. Kegagalan panen akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kewajiban bertanam dapat diganti dengan bekerja di pengangkutan, pabrik-pabrik, dan perkebunan pemerintah. Sayangnya, semua yang terjadi bertentangan dengan peraturan, mengakibatkan kesengsaraan. Itu semua menambah rentetan panjang kesengsaraan akibat lemahnya pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Era Politik Etis

Setelah kendali penjajahan berjalan hampir satu abad oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia menggantikan VOC. Dan, setelah terjadinya perlawanan yang ditunjukkan oleh rakyat bumiputra, yang terkenal dengan Perang Diponegoro di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, dan terjadinya kemelaratan yang merajalela di kalangan rakyat banyak, tumbuhlah sedikit cetusan suara kaum cendekia Belanda yang merasa risau terhadap sistem eksploitasi yang berlebihan dan kecenderungan pelanggaran kemanusiaan yang semakin mendalam.

Golongan ini merasa bertanggung jawab untuk memperingatkan orang-orang sebangsanya akan bahaya-bahaya dehumanisasi di daerah-daerah jajahannya. Haluan politik kolonial baru mulai diberlakukan yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan Politik Etis.

Ratu Belanda melontarkan suatu pernyataan bahwa, "Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran, perkembangan sosial, dan otonomi penduduk pribumi". Tujuan pokok politik kolonial baru ini adalah memperhatikan kemajuan dan perkembangan penduduk serta memperhatikan pengolahan tanah. Dengan demikian secara teoritis "sistem eksploitasi digantikan dengan politik pengajaran

yang maju". Sekali lagi orientasi baru itu terkenal dengan bermacam-macam nama seperti Etis, Politik Kemakmuran, atau Politik Asosiasi.

Prinsip politik etis terbagi dalam dua bagian yaitu segi ekonomi dan segi sosial budaya. Dalam segi ekonomi, politik ini tidak berbeda dengan politik liberal. Berarti modal swasta tetap diberi kesempatan luas untuk bergerak di daerah koloni, dan pemerintah menjamin ketentraman dengan pasukan-pasukan dan birokrasinya. Segi sosial budaya sering juga dinamakan *associatiepolitek*. Mengandung maksud peningkatan sosial budaya penduduk sejajar dengan peningkatan sosial budaya orang Eropa. Untuk itu dikeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan dalam bidang sosial budaya. Tindakan ini sangat memengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia dalam awal abad ke-20.

PAK HARTO MELANGKAH BERSAMA SYAYKH AS PANJI GUMILANG

Tindakan-tindakan yang berakibat jauh dalam perkembangan masyarakat Indonesia adalah sistem pendidikan yang diciptakan Belanda. Sistem pendidikan yang menciptakan suatu golongan baru dalam masyarakat, yang sering disebut dengan grup fungsional, yaitu suatu grup yang terampil secara Barat, karena dididik dalam sekolah-sekolah menengah kejuruan dan menjalankan fungsi-fungsi baru yang diciptakan pada awal abad ke-20. Fungsi-fungsi baru itu meliputi sebagai pegawai negeri dalam kedinasan-kedinasan (pendidikan, kesihatan, perbankan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain), yang diciptakan untuk kemakmuran penduduk.

Rakyat Indonesia baru diperkenalkan pendidikan modern di penghujung abad ke-19. Pada tahun 1892, baru mulai diadakan sistematisasi dalam pendidik. Baru pada saat itulah diselenggarakan sekolah dasar untuk bumiputra secara modern, yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, sekolah ongko satu, sekolah yang hanya menampung anak-anak priyayi, yang didirikan di kota-kota karesidenan, lama pendidikannya 5 tahun. Kurikulumnya meliputi membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, menggambar, ilmu alam, dan ilmu ukur tanah. Guru-gurunya diambil dari lulusan sekolah guru yang dipersiapkan untuk itu. Pada mulanya bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah, kemudian diadakan perubahan dengan bahasa pengantar Belanda, karenanya lama belajarnya menjadi 6 tahun.

Dapat dibayangkan pada tahun yang sama, bangsa-bangsa lain di dunia telah memiliki perguruan tinggi dan universitas yang tangguh, dalam kuantitas maupun kualitas. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dalam perkembangan pendidikannya tergolong masih terbelakang. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh lamanya penetrasi penjajahan di bumi Indonesia ini, namun oleh berbagai sebab yang membawa keterbelakangan pencapaian kemajuan itu. Dan pencerahan yang timbul dari berbagai sebab yang didorong oleh pemerintah Belanda untuk bangsa Indonesia dapat direspon walau oleh sebagian kecil dari bangsa ini. Ditandai dengan berbagai kesadaran yang tumbuh di kalangan bangsa untuk memajukan pendidikan di kalangannya.

Dalam kalangan umat Islam di era pencerahan ini, berdiri sebuah pesantren yang sangat monumental yaitu Pesantren di daerah Jombang, pada 26 Rabi' al-Awal 1899 M yang diakui resmi oleh pemerintah Belanda pada 6 Februari 1906 M. Tebuireng adalah sebuah desa yang baru dikenal banyak orang setelah berdirinya pesantren. Dari pesantren inilah kelak Indonesia banyak diwarnai (khususnya umat Islam). Pendiri pesantren ini adalah K.H. Hasyim Asy'ari, ulama besar pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama tahun 1926 M. Banyak pesantren sebelum pesantren Tebuireng berdiri, namun sejarah mencatat khusus kehadirannya, karena pesantren ini telah mengukir sejarah dengan tangannya.

Di Banten berdiri pergerakan pendidikan yang bernama Mathlaul Anwar tepatnya di Menes Pandeglang, bergerak sejak tahun 1906 M dan diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1916 M. Tokoh pendirinya adalah K.H. Abdul Rahman bin Jamal. Mathla 'ul Anwar mendirikan sarana pendidikan di berbagai tempat, yang semuanya berpusat di Menes, Pandeglang. Sejak berdiri, Pesantren dan Madrasah Mathlaul Anwar sudah menganut sistem pendidikan yang berkurikulum dan madrasi, memberikan pengajaran kepada pelajar santri putra dan putri.

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1912 M. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya pergerakan ini oleh K.H. Ahmad Dahlan, antara lain lembaga pendidikan Islam ketika itu dinilai tidak efisien, pendidikan pesantren yang menjadi basis kalangan rakyat dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pada waktu itu pendidikan di Indonesia telah terpecah dua yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan. Akibatnya, terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapatkan pendidikan sekuler dengan golongan yang mendapatkan pendidikan di pesantren. Ini juga yang mengakibatkan terpecahnya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam yang dapat melemahkan segala kekuatannya.

Di Jawa Barat, tepatnya di Majalengka, ulama kenamaan, K.H. Abdul Halim mendirikan berbagai jam'iyah, yang berorientasi pada usaha perbaikan umat melalui jalur pendidikan dan penataan ekonomi. Dimulai dengan mendirikan Majelis Ilmu pada tahun 1911, disusul dengan organisasi Hayatul Qulub,

MAHASISWA UNIVERTAS AL-ZAYTUN:
Tekad Kebangkitan Kembali Indonesia

kemudian berganti dengan Jam'iyah I'anah al-Muta'allimin pada tahun 1916, dan pada akhirnya organisasi pendidikan K.H. Abdul Halim itu berfusi dengan organisasi Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII), yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal dengan Persatuan Umat Islam (PUI) yang berpusat di Bandung.

Jami'at Khair, nama perkumpulan masyarakat Islam keturunan Arab yang didirikan pada tahun 1903, izin resmi dari pemerintah Belanda keluar pada tahun 1905. Organisasi yang bertujuan meningkatkan syiar Islam dengan melalui kegiatan dakwah dan pendidikan yang dikelola secara modern. Sekolah Dasar Jami'at Khair didirikan pada tahun 1905, diberikan pelajaran agama dan pelajaran umum, seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi dan bahasa Arab. Bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai gantinya, bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib. Guru-gurunya didatangkan dari berbagai daerah dan luar negeri, yang sangat terkenal di kalangan bangsa Indonesia adalah Syekh Ahmad Soorkati dari Sudan.

Pada 09 Oktober 1926, berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam yang bercorak pesantren di desa Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Semula bernama Pondok Darussalam. Penamaan modern diberikan oleh masyarakat setelah beberapa tahun berjalan. Kemudian menjadi terkenal dengan nama Pondok Modern Darussalam Gontor, dan kini lebih terkenal dengan nama Pondok Modern Gontor. Didirikan oleh trio bersaudara yang dalam kalangan pondok Gontor dikenal dengan Trimurti, yaitu K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fanani dan K.H. Imam Zarkasyi.

Pada awal berdirinya Pondok ini menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah, diberi nama Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI), dan melaksanakan pendidikan hanya untuk putra (mulai tahun 1936). Dan dalam perkembangannya, pondok ini melaksanakan pendidikan untuk putri dan juga perguruan tinggi. KMI berkurikulum mandiri baik pengaturan maupun pengembangannya. Mengutamakan pembentukan mental dan menanamkan ilmu pengetahuan agama dan umum, yang pengaturannya disesuaikan dengan Pondok Pesantren. Masih banyak lagi pendidikan Islam yang bercorak kepesantrenan, baik yang bersifat modern maupun tradisional.

Politik Etis yang dimulai sejak awal abad ke-20 (1901), memperkenalkan pendidikan modern kepada bumiputra bangsa Indonesia. Jenis sekolah kedua yang didirikan pada tahun 1892 adalah Sekolah Angka Dua, diperuntukkan bagi rakyat pedesaan. Lama pendidikan hanya tiga tahun, berkurikulum membaca, menulis, dan berhitung. Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah atau Melayu. Dalam perkembangannya, sekolah Angka Dua ini berubah menjadi Sekolah Desa, sejak 1907 Sekolah Desa ini dibangun di pedesaan dan masyarakat desa diberi tanggung jawab dalam pembinaannya berupa pendirian dan pemeliharaan gedung sekolah.

Selanjutnya Belanda mendirikan Sekolah Lanjutan untuk lulusan Sekolah Angka Satu (HIS), yang dinamakan MULO. Lama pendidikannya tiga tahun, bahasa pengantarnya Belanda, sedangkan untuk lulusan Sekolah Desa, didirikan *Vervolegschool,* lama pendidikan lima tahun dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar namun kurikulumnya sama dengan HIS (Sekolah Angka Satu). Pendidikan Lanjutan Atas adalah AMS *(Algemeen Middelbare School)*, untuk menerima lulusan MULO *(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs).*

Selanjutnya, untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil, Belanda mendirikan berbagai sekolah kejuruan berkemahiran tertentu. Untuk tenaga medis didirikan sekolah kedokteran tingkat menengah dan tingkat tinggi. Untuk pamong praja, didirikan Sekolah Pegawai Pamong Praja, dari tingkat dasar sampai menengah. Untuk tenaga-tenaga kejaksaan dan pengadilan didirikan Sekolah Hukum Tingkat Tinggi, diambil dari lulusan sekolah menengah, sekolah ini menghasilkan hakim-hakim dan jaksa yang lulusannya menggunakan gelar Mr. *(Meester in de Rechten).* Sekolah pertanian *(Landbouw school)* untuk tingkat rendah dan menengah, untuk mencetak tenaga-tenaga pertanian tingkat rendah dan menengah. Pendidikan pertukangan didirikan. Sekolah teknik tingkat tinggi didirikan pada tahun 1920, oleh golongan swasta, baru pada tahun 1924 diambil alih oleh pemerintah, lulusannya bergelar Ir. (insinyur) yang juga digunakan oleh lulusan sekolah tinggi yang sama di negeri Belanda.

Politik etis berjalan dalam waktu hampir setengah abad namun 90% bangsa Indonesia ketika itu masih dalam keadaan buta huruf. Banyak orang menyimpulkan bahwa ia hanyalah imperialisme kebudayaan yang tidak memberi

SYAYKH PANJI GUMILANG: Pendidikan Jalan Utama

keuntungan besar. Juga disimpulkan sebagai usaha menghilangkan jurang perbedaan antara penjajah dan rakyat yang dijajah dengan cara menghilangkan kebudayaan asli tanah jajahan untuk diganti dengan kebudayaan penjajah.

Namun yang jelas, perkembangan terakhir penjajahan Belanda di bumi Indonesia adalah berkesempatan memperkenalkan kepada bangsa Indonesia memasuki pemikiran modern melalui pendidikan modern yang mereka tampilkan. Pada kenyataannya, Belanda "berhasil" melaksanakan tujuan pendidikan yang mereka gariskan, yaitu mempersiapkan tenaga terampil dalam bidangnya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang disediakan bagi bumiputra untuk membantu jalannya administrasi pemerintah.

Manfaat yang paling besar dari politik etis bagi bangsa Indonesia, yang paling menonjol adalah, bangsa Indonesia mengenal pendidikan modern dan banyak penduduk bumiputra melalui pendidikan modern ini dapat berkenalan dengan kebudayaan Barat, yang pada gilirannya justru dipergunakan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan kolonial. Pendidikan memang merupakan cara ampuh mengubah segala sesuatu, dari

AL-ZAYTUN: Jalan utama menuju Indonesia kuat

yang semula dianggap tidak mungkin menjadi dapat terjadi. Pendidikan adalah transformasi untuk menjadi diri sendiri yang sejati.

Era Kemerdekaan

Kemerdekaan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan negara yang berdaulat, menciptakan kebebasan untuk menentukan haluan berbangsa dan bernegara dalam mencapai cita-citanya. Kini negara dan bangsa Indonesia telah memasuki kemerdekaan tahun ke-61. Pimpinan pemerintahan telah berputar dalam enam giliran, dari yang berjangka waktu panjang maupun singkat. Pencapaian demi pencapaian telah dicapai oleh setiap pemerintahan yang memerintah.

Ada satu yang patut dijadikan catatan khusus bagi bangsa Indonesia, bahwa pergantian kekuasaan tidak selamanya membawa kemajuan yang diinginkan bersama. Hal ini disebabkan oleh sikap yang terkandung dalam pergantian pemerintahan tersebut diwarnai oleh kebencian yang sangat dominan di antara satu dengan lainnya. Sehingga, apa pun pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pendahulunya dianggap menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali.

Bukannya hasil-hasil pencapaian tersebut diperbaiki dan dilanjutkan sehingga dapat menjadi satu mata rantai yang sambung menyambung yang mampu memperkokoh kemajuan masa depan bangsa dan negara. Yang terjadi justru sebaliknya dipotong-potong menjadi tidak ada kaitan sama sekali dan terus dikondisikan untuk tidak berkaitan sama sekali.

Perpindahan kekuasaan dari Belanda, semua produk Belanda yang masih relevan tidak dilanjutkan oleh penggantinya hanya karena Belanda adalah penjajah, sekalipun produk hukumnya masih terus mendominasi hukum positif yang berlaku di negeri ini. Juga apa yang telah dihasilkan oleh pemerintah Soekarno tidak menyambung dengan pemerintahan Soeharto dan seterusnya produk pencapaian Soeharto dianggap tidak tepat sama sekali oleh penerusnya, dan begitu selanjutnya. Sehingga apa yang terjadi pada setiap pergantian pemerintahan di Indonesia ini selalu memulai segala sesuatunya dari nol. Dan yang paling terasa dari akibat pergantian politik yang penuh kebencian itu adalah nasib pendidikan nasional yang menjadi ikut tidak menentu.

Kemerdekaan juga mengantarkan Indonesia kepada pergaulan antarbangsa yang lebih luas. Indonesia memasuki percaturan politik antarbangsa dan meletakkan diri pada jajaran gerakan negara-negara non-blok. Dan, dalam percaturan politik antarbangsa belakangan ini, Indonesia tidak banyak tampil berkesan, disebabkan berbagai krisis yang melanda di dalam negeri, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain (multidimensi). Daya saing sumber daya manusianya pun belum dapat diandalkan, memandangkan kualitas pendidikan yang dimiliki masih terus menjadi bahan diskusi. Semua itu merupakan pengalaman yang tidak mengenakkan namun harus dapat dijadikan pendorong untuk maju ke depan.

(Bersambung Bagian Kedua: Pendidikan Jalan Utama Indonesia Kuat)

RANCANGAN PANAS DI SENAYAN

Demi menegakkan moral bangsa, terbitnya UU Antipornografi dan Pornoaksi dipandang perlu. Pembahasannya tak mudah, dipenuhi pro-kontra berbagai pihak.

Belakangan ini, media massa Indonesia ramai memberitakan seputar pornografi dan pornoaksi sejalan dengan pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Para wartawan yang biasa *ngepos* di gedung DPR Senayan bisa melihat rombongan orang-orang terkenal berdatangan ke sana. Dari raja dangdut, ratu goyang sampai dalang. Dari kurator seni, seksolog sampai pemuka agama. Anggota dewan bahkan sempat disuguhi *live show* 'amukan' si raja dangdut Rhoma Irama kepada si ratu goyang ngebor Inul Daratista dalam rapat dengar pendapat yang sedianya mendapat masukan dari keduanya.

Ada apa gerangan? Rupanya, DPR mengundang mereka untuk berbicara tentang seks. Tak perlu kaget, saudara-saudara! Seks di situ cuma istilah satir 'pornografi dan pornoaksi' versi Gadis Arivia, pendiri *Jurnal Perempuan*. Maklumlah, akhir-akhir ini semua media ramai membikin *headline* soal masalah itu. Sejatinya, para anggota dewan yang terhormat itu sedang membahas Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

RUU itu sudah terkatung-katung hampir tujuh tahun, sejak menjadi usul inisiatif DPR RI Periode 1999-2004, di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Terdiri dari 93 pasal dan 11 bab, secara singkat isinya berkaitan dengan kekhawatiran atas eksploitasi tubuh, seksualitas, kecabulan dan/atau erotika.

Kenapa RUU itu baru digodok lagi

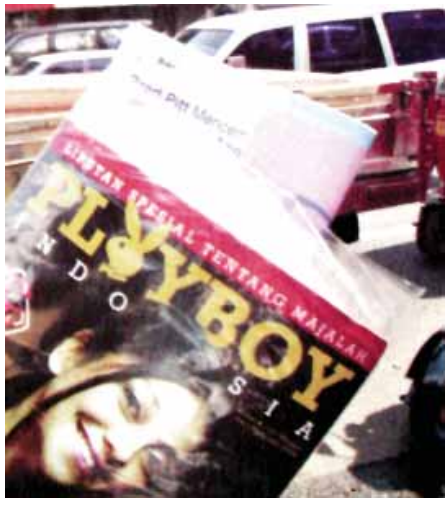

setelah empat kali ganti presiden? Rupanya, batasan tentang apa itu pornografi dan pornoaksi tidak kunjung ketemu. Pansus RUU APP dibentuk September 2005, mengundang 81 kelompok masyarakat, guna urun pendapat. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden. Presiden kemudian menunjuk menteri-menteri terkait mewakili pemerintah membahas RUU APP versi baru.

Masukan memang mengalir deras. Ada dukungan terang-terangan, ada juga protes besar-besaran. Memilah-milahnya ternyata tidak gampang. Jangankan para pengamat dan pakar yang diundang, perbedaan pendapat bahkan terjadi antara fraksi-fraksi di DPR dalam mencari batasan tentang pornografi dan pornoaksi itu.

Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale, mengakui RUU itu punya banyak kelemahan. Cuma malaikat yang bisa mentaatinya, katanya. RUU itu dipandang terlalu mengekang. Semua pasalnya memakai kata 'barangsiapa' dan "setiap orang'. Tak heran jika ada pro dan kontra, bahkan penolakan.

Memprotes Acuan

Bisa jadi Pansus kewalahan. Kejanggalan penyusunan pasal-pasal itu tampaknya tidak cuma terletak pada uraian pasal-pasalnya, tetapi juga penyusunannya secara keseluruhan. Ditambah lagi media massa menampung semua banjir masukan dan protes. Menampakkan dengan jelas berbagai perbedaan pandangan tentang kesusilaan.

Salah satu protes paling keras datang dari para aktivis perempuan. Ketidakjelasan batasan dari pornografi dan pornoaksi itu dianggap mengkriminalisasi perempuan. Banyak pasal yang menimbulkan asumsi tubuh perempuan adalah biang keladi pelanggaran kesusilaan dan sesuatu yang mengganggu moralitas. Pasal 'panas' yang diprotes mereka antara lain Pasal 25 (1). Tertulis, "setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual." Menurut Gadis Arivia, RUU itu sangat stereotip pada perempuan. Seolah-olah laki-laki yang keluar rumah bertelanjang dada dan hanya bersarung saja tidak masuk kategori sensual.

Protes lainnya datang dari kalangan pers. Mereka beranggapan, RUU APP ini juga mengekang masyarakat berkarya menurut imajinasi dan keinginannya. Menurut anggota Dewan Pers, Leo Batubara, tidak perlu ada UU Antipornografi dan Pornoaksi karena sudah ada KUHP dan UU Perlindungan Anak untuk melindungi masyarakat dari pornografi. Banyak media kritis akan dibredel dengan alasan isinya melanggar UU.

Atmakusumah Astraatmaja, mantan ketua Dewan Pers, juga berpendapat masalah pornografi, khususnya dalam pers, sebaiknya dimasukkan ke dalam wilayah etika. Sanksi moral dalam pers lebih berat dari sanksi hukum. Seluruh media dan wartawan profesional lebih suka membayar denda daripada terkena sanksi moral. Sebab sanksi moral mengikat seumur hidup. Kalau masyarakat tidak setuju dengan media tertentu yang dianggap berisi pornografi, tinggal ajukan ke Dewan Pers.

Menurut kurator seni rupa, Jim Supangkat, yang harus menjadi perhatian

MENIMBANG SEBUAH BATAS

Razia dilakukan, para tersangka dibekuk. Selain belum ada batasan-batasan jelas pornografi dan pornoaksi, RUU APP dinilai mengkriminalisasi perempuan.

Dengan terbata-bata, pedangdut Inul Daratista yang dikenal dengan goyang ngebornya, bicara di depan Komisi VIII DPR yang mengundangnya. Ia mengaku mendukung Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, tetapi meminta anggota Dewan yang terhormat memberikan batasan yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi itu.

Sementara di luar sana, di tengah isu akan terbitnya majalah *Playboy* di Indonesia, aparat hukum sibuk merazia kantor-kantor redaksi majalah dan tabloid esek-esek, para pemilik lapak koran dan para pedagang VCD porno. Ribuan barang bukti bertumpuk di Markas Polda Metro Jaya, beberapa tersangka pun diciduk dan tengah diproses. Untuk saat ini masih dipakai KUHP pasal 281, 282 dan 283 mengenai kejahatan kesusilaan.

Setelah itu, tengoklah aktor ganteng Anjasmara yang saat ini sedang dirundung masalah. Foto-foto telanjangnya – dimaksudkan sebagai karya seni fotografi – yang muncul dalam pameran seni rupa CP Biennale 2005 pada pertengahan September lalu membuatnya berurusan dengan polisi. Dirinya bersama model Isabelle Yahya dan fotografer Davy Linggar dinyatakan sebagai tersangka kasus pelanggaran Pasal 282 KUHP.

Pasal-pasal kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tampaknya tidak lagi cukup mengakomodir perkembangan kejahatan kesusilaan yang semakin marak dalam berbagai bentuk dewasa ini. Itu sebabnya, diperlukan sebuah undang-undang tentang antipornografi dan pornoaksi. Akan tetapi, rancangan undang-undang yang ada sekarang juga dianggap masih belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Masih banyak istilah yang belum disepakati dan masih dipermasalahkan, seperti yang disampaikan Inul Daratista, yakni mengenai batasan arti pornografi dan pornoaksi.

Dari sekian banyak media yang mengulas mengenai isu ini, tak satupun yang bisa memberikan kejelasan arti mengenai arti pornografi dan pornoaksi. Apalagi, pasal-pasal dalam RUU tersebut lebih mengarah ke persoalan tubuh perempuan. Sehingga RUU tersebut malah dituding mengkriminalisasi perempuan.

Ada ulasan yang cukup menarik dari Chandra Yusuf, peneliti di Daya Cipta Utama Law Center yang artikelnya dimuat *Trust* No. 16. Menurutnya, penilaian atas pelanggaran pornografi wajib dilakukan secara kasus per kasus dengan hati-hati. Saat ini konsep pornografi dan pornoaksi dalam draft RUU Antipornografi dan Pornoaksi tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

Dalam draft RUU itu salah satu pasalnya menyebutkan larangan gambar yang mengeksploitasi tubuh orang lain. Apakah UU akan melarang gambar yang mengeksploitasi tubuh orang lain untuk dipelajari dalam buku teks mahasiswa kedokteran? Lantas, pembuat UU akan membuat pengecualian tentang hal itu. Bagaimana keefektifan kriteria yang dibuat RUU itu bila kemudian gambar (yang masuk kedalam unsur pornografi itu) yang akan digunakan untuk kepentingan ilmiah itu tersebar di masyarakat? Hal itu, menurutnya, akan sama dengan kasus film atau foto-foto adegan seks yang dibuat secara pribadi kemudian membuat geger karena beredar luas di masyarakat.■ RH

utama terkait pornografi adalah eksploitasi manusia. Hal itu jauh lebih penting daripada membicarakan perbedaan pandangan tentang kesusilaan.

Sementara itu, RUU APP tidak mengacu pada arti pornografi yang sesuai makna katanya (*porne* = pelacuran, *graphos* = tulisan atau gambar), yakni mengeksploitasi kesenangan seksual untuk mencari keuntungan.

RUU APP malah mengacu pada "tindakan setiap orang yang melanggar kesusilaan di depan umum." Menuduh setiap orang yang mengangkat persoalan seksual, masalah sensualitas dan ketelanjangan punya tujuan mengeksploitasi kesenangan seks seperti pada pornografi. Akibatnya, materi kuliah kedokteran, anatomi, karya seni, makalah seminar perkawinan dan pendidikan seks bisa dianggap cerminan akhlak rendah karena mencari keuntungan dengan menjual kesenangan seksual, seperti tertera dalam Pasal 469 RUU APP.

Perdebatan Panjang

Di tengah kabar akan diterbitkan majalah *Playboy* Indonesia dan razia gencar yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap media cetak dan VCD *esek-esek,* pembahasan RUU APP semakin mendapat angin. Reaksi-reaksi terhadap RUU ini sebenarnya bukan berpangkal dari ketidaksetujuan terhadap pelarangan pornografi, melainkan berpangkal dari ketidakjelasan batasan-batasannya dan salah acuan tadi.

Namun dengarlah pendapat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, yang mencoba menengahi pro dan kontra yang ada. Ia mendukung RUU APP. Namun, RUU itu harus lebih diarahkan pada kalangan industri yang menjalankan bisnis pornografi dan pornoaksi dan menangguk keuntungan dari dua hal itu dengan perempuan sebagai komoditas.

Sebaliknya, menurut Meutia, RUU itu juga harus menjunjung hak-hak perempuan. Jangan mendiskreditkan kaum perempuan, seolah-olah hanya mereka saja yang disalahkan. Ia melihat, isi RUU tersebut lebih melarang pelaku, sedangkan pihak produsen tidak pernah disinggung.

Pansus telah mengisyaratkan RUU ini akan bisa disahkan Juni mendatang. Seperti diungkapkan anggota pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hilman Rosyad, bahwa RUU APP diajukan karena efek dari pornografi itu telah begitu hebat. Sesungguhnya semua pihak sepakat, degradasi moral bangsa harus segera diselamatkan. Namun tampaknya, perdebatan di Senayan masih panjang. ■ RH

PROTES: Pengunjuk rasa meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap segala tindakan pornografi dan pornoaksi di Indonesia termasuk akan diterbitkannya majalah Playboy.

MEMBEDAH 'ISI PERUT' RUU APP

Tujuh tahun lamanya RUU APP —usul inisiatif DPR-RI periode 1999-2004— mengendap di Senayan. Tak kunjung selesai dibahas. Menariknya lagi, selama kurun waktu itu, negeri ini telah mengalami empat kali pergantian presiden, dari BJ Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono.

Lho kok bisa ya? Usut punya usut, hal itu berkaitan erat dengan belum adanya penafsiran baku dan batasan-batasan jelas ihwal kategori pornografi dan pornoaksi.

Kondisi ini membuat sejumlah kalangan menolak RUU APP disahkan menjadi UU APP. Tapi, mayoritas pihak lainnya mendesak agar RUU segera dituntaskan demi moralitas generasi bangsa ini di masa depan.

Ketua Pansus DPR RUU APP, Balkan Kaplale, membenarkan hal itu. Malah, katanya, selain alasan definisi, ada dua faktor penghambat lain yang bersumber dari sikap anggota Dewan sendiri.

"Kalau saya bilang ini hambatannya dari kita-kita juga. Masa definisi pornografi dan pornoaksi saja sudah tujuh tahun tidak bisa ketemu," cetus Kaplale kepada *Berita Indonesia*, seraya menyebut perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi DPR dan belum ada kemauan para anggota Pansus untuk segera menuntaskan pembahasan sebagai dua faktor dimaksud.

Ternyata, Kaplale sendiri menilai, draft RUU APP warisan DPR lama dipenuhi kelemahan. Maka, tak aneh, lanjutnya, bila muncul pro-kontra di tengah masyarakat, bahkan nada penolakan atas semangat menghadirkan UU APP.

"Saya katakan RUU itu RUU Malaikat. Hanya malaikat yang bisa menaatinya. Semua memakai kata-kata 'barangsiapa' atau 'setiap orang', kesannya sangat mengekang," katanya.

Kesimpulan itu mengemuka setelah Pansus yang dibentuk September 2005 itu beraudiensi (RDPU) dengan 81 kelompok masyarakat, guna meminta pendapat dan pandangan sebagai masukan.

Pansus yang dipimpinnya bertugas menyempurnakan draf RUU versi lama, untuk selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Presiden kemudian menunjuk menteri-menteri terkait mewakili pemerintah membahas RUU APP versi baru.

Lantas, apa saja 'isi perut' draf RUU APP yang menuai polemik dan pro-kontra tersebut?

Di bawah ini, *Berita Indonesia* menampilkan secara deskriptif substansi RUU APP yang terdiri 11 bab dan 93 pasal serta ditargetkan menjadi UU APP pada pertengahan tahun ini. Berikut gambaran singkatnya.

Substansi RUU APP:

Bab I (Ketentuan Umum): Pengertian pornografi dan pornoaksi. Dalam UU ini, pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Definisi pornoaksi: perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Bab II (Larangan): Larangan pornografi diatur dalam 21 pasal (pasal 4-24) dan larangan pornoaksi ada 9 pasal (pasal 25-33). Jika diperinci, ada 36 ketentuan tentang larangan pornografi yang tercantum dalam Bab II RUU APP.

Pasal 4 adalah satu contoh ketentuan larangan pornografi: "Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, gambar, puisi, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa."

Bila disederhanakan, sebanyak 20 pasal lainnya menekankan larangan eksploitasi pada daya tarik, antara lain: daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa; daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis; daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir; daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani; daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah kepada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis atau pasangan sejenis.

Selanjutnya, eksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah kepada hubungan seks dengan hewan; daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pesta seks dan/atau dalam pertunjukan seks; daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks; daya tarik aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak.

Kemudian, eksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa dan/atau ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, elektronik, dan/atau alat komunikasi media; daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, elektronik, dan/atau alat komunikasi media; aktivitas orang yang berciuman bibir dan/atau aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, elektronik, dan/atau alat komunikasi media; aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis dan/atau pasangan sejenis melalui media massa cetak, elektronik, dan/atau alat komunikasi media.

Larangan-larangan pornografi lain: menjadikan diri sendiri, anak-anak, dan/atau orang lain sebagai model atau obyek untuk semua hal yang sudah disebut di atas; membuat, menyebarluaskan, dan

PANSUS DPR RUU APP: Mampukah akomodatif?

menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni.

Akan halnya larangan pornoaksi setidaknya diatur dalam 26 ketentuan. Sebut saja, misalnya, pasal 25 ayat (1): "Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual" dan ayat (2): "Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual."

Pasal 27 ayat (1) menegaskan, setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum. Ada lagi pasal 28: "Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum" (ayat 1) dan

"Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum" (ayat 2).

Larangan-larangan pornoaksi lain: mempertontonkan, atau menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual; dengan sengaja, atau menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum; berciuman bibir, atau menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum; untuk, atau menyuruh orang lain untuk, menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum; untuk, atau menyuruh orang lain untuk, atau menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh menyerupai kegiatan masturbasi atau onani.

Larangan selanjutnya: menyuruh orang lain untuk, atau melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum; melakukan hubungan seks dengan anak-anak, atau menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks.

Larangan menyelenggarakan acara pertunjukan seks, atau pesta seks, atau acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak; menonton acara pertunjukan seks dan pesta seks, atau acara pertunjukan seks dan pesta seks dengan melibatkan anak-anak; dan menyediakan dana, tempat, dan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks.

Bab III (Pengecualian dan Perizinan): Pengecualian ada tiga pasal (pasal 34-36) dan Perizinan berisi tiga pasal (pasal 37-39). Pada pasal 35, misalnya, disebutkan penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, rumah sakit, dan/atau lembaga kesehatan yang mendapatkan izin dari pemerintah.

RUU APP Pasal 36 menggarisbawahi, pelarangan pornoaksi dikecualikan untuk: (1) cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan; (2) kegiatan seni; (3) kegiatan olah raga; atau (4) tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.

Menyangkut perizinan, ada pasal 38 yang pada ayat (2) menggariskan bahwa setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 35 harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syarat dimaksud, seperti, penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus, hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus, serta yang dibungkus rapat dalam kemasan bertanda khusus dan segel tertutup.

Bab IV (Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN): Pasal 40 menyebutkan, Badan ini dibentuk untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. BAPPN adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAPPN terdiri seorang Ketua, Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 11 Anggota terdiri unsur pemerintah dan masyarakat. Mereka menjabat selama tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Tugas BAPPN dibiayai oleh APBN dan sumber-sumber lain.

Bab V (Peran Serta Masyarakat): Hanya satu pasal (pasal 51), yang antara lain menyebutkan, setiap warga negara berhak berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi. Caranya, antara lain, dengan menyampaikan keberatan kepada BAPPN terhadap pengedaran barang dan/atau penyediaan jasa pornografi dan/atau pornoaksi.

Bab VI (Peran Pemerintah): Ada tiga pasal (pasal 52-54). Pasal 53, misalnya, menyebutkan pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.

Bab VII (Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan): Hanya satu pasal (pasal 55). "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bab VIII (Pemusnahan): Hanya satu pasal (pasal 56). Bab IX (Ketentuan Sanksi): Sanksi Administratif diatur satu pasal (pasal 57) dan Ketentuan Pidana diatur dalam 33 pasal (pasal 58-90).

Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha dan sanksi pidana (penjara dan denda). Pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pada Pasal 58, misalnya, berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)."

Atau, Pasal 59: "Setiap orang yang dengan sengaja...mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Bab X (Ketentuan Peralihan): Ada dua pasal (pasal 91-92). Bab XI (Ketentuan Penutup): Hanya satu pasal (pasal 93). ■ HT, AF

PENDAPAT TOKOH AGAMA

Kyai kondang, KH. Abdullah Gymnastiar, dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus RUU APP, di Gedung DPR-RI, Rabu (8/2), menyampaikan pandangannya.

Aa Gym –demikian pimpinan Ponpes Daarut Tauhid Bandung itu akrab disapa– mengatasnamakan Gema Nusa, sebuah gerakan moral bernuansa kebangsaan yang diketuainya, menyampaikan tujuh pernyataan sikap.

Menurut Aa Gym, adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa ini, menyelamatkan generasi muda dari kerusakan dan keruntuhan moral, bahkan tindakan penyebaran perilaku tidak senonoh yang justru lebih tidak terkendali dibandingkan negara-negara liberal sekalipun.

Pihaknya sangat memaklumi jika ada pihak-pihak yang keberatan pada RUU APP. Namun aspirasi dari *silent majority* yang tidak memiliki akses untuk dapat ke

PROF. DR. H.M. ROEM ROWI, MA

tempat ini, menulis di media atau diekspos di depan kamera juga mesti perhatikan.

"Dari pengalaman saya berdakwa 14 tahun lamanya di seluruh pelosok Indonesia, saya, dan para orangtua, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat betul-betul galau dan cemas atas merajalelanya ketidaksenonohan. Kami menanti-nantikan lahirnya upaya penyelamatan generasi mendatang dari kerusakan dan keruntuhan moral," ungkap Aa Gym.

Atas dasar itu, demikian Aa Gym, pihaknya mendukung sepenuhnya lahirnya UU APP yang adil sehingga bermanfaat secara luas bagi bangsa ini, sebagai upaya memperbaiki moral bangsa, menyelamatkan generasi masa depan dari kehancuran moral.

Lepas dari dukungan moral itu, pihaknya juga sangat menyadari realitas bahwa keberagaman masyarakat Indonesia memungkinkan adanya perbedaan adat dan kebiasaan satu sama lain.

Dia menganjurkan satu solusi, "Dalam implementasi UU ini, setiap daerah membentuk forum masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, pemerintah dan elemen-elemen lainnya untuk mengawal perbaikan moral secara proporsional."

Aa Gym

Di samping itu, masih kata Aa Gym, dalam implementasi UU itu, ada ketauladanan para pemimpin agar seluruh lapisan masyarakat bisa menerima dan mematuhi UU ini berikut peraturan-peraturan turunannya.

Terkait dengan itu, dia berharap aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum secara konsisten, sembari terus-menerus melakukan sosialisasi UU itu guna meminimalisir terjadinya pelanggaran atasnya.

Terakhir, bagi Aa Gym, kreativitas sepatutnya disertai rasa tanggung jawab dan dilandasi itikad baik sehingga akan dihasilkan karya-karya bermutu dan bermartabat. "Masyarakat luas menantikan kreativitas dari para pelaku bisnis dan seniman yang dapat membantu perbaikan dan pembinaan moral bangsa," tandasnya.

Kebebasan berekspresi relatif sulit dihalangi. Tapi yang terpenting ekspresi itu didasari tanggung jawab, niat yang luhur, dan standar etika. Jangan sampai kebebasan berekspresi menimbulkan kedzoliman bagi pihak lain.

"Kita tidak boleh melarang 'maaf' orang tidak berpakaian di kamar mandi atau wilayah domestik. Tapi kalau sudah tidak berpakaian di wilayah publik itu yang menghancurkan moral bangsa," kata Aa Gym membuat contoh.

Kita tahu, RUU ini masih memerlukan perjalanan yang panjang. Karena itu, "Kita

Jim Supangkat (Kurator Seni Rupa)

"Tak Mungkin Pornoaksi Diatur Dengan UU"

Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar Panitia Khusus RUU Antipornografi dan Pornoaksi di DPR RI, Kamis 26/1 lalu antara lain menghadirkan kurator Seni Rupa Jim Supangkat, selain pakar seksologi Dr. Naek L. Tobing dan Dr. Boyke Dian Nugraha. Tujuannya, menghimpun masukan mengenai hubungan kebudayaan dan seksualitas. Jim Supangkat yang kini tengah 'mutung' karena CP Biennale yang ia gagas bersama beberapa maecenas dan didanai oleh badan-badan Internasional sejak tahun 2003 itu tidak akan lagi di selenggarakan di masa-masa datang. Ini karena pameran CP Biennale 2005 yang bertajuk *Pinkswing Park* dengan model Anjasmara dan Isabell Yahya itu dianggap sarat pornografi dan banyak diprotes. Sehingga pameran yang sedianya dibuka hingga 1 bulan itu ditutup sebelum waktunya. Jim mengaku kehilangan semangat, namun ia masih bersedia berbagi pendapat tentang RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Berikut petikan wawancaranya:

RUU Antipornografi dan Pornoaksi ini adalah RUU yang salah satunya akan mengatur tentang tata susila. Bagaimana pendapat Anda?

Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Pornografi dan Pornoaksi tidak membedakan secara tegas pengertian antara pornografi, erotisme, dan seksualitas. Akibatnya, terjadi kerancuan alur pikir dalam rancangan undang-undang itu, sehingga bermaksud mengatur pornoaksi sebagai tata susila yang sebenarnya tidak mungkin diatur dengan aturan perundang-undangan.

PDT WEINATA SAIRIN, M.TH.

tidak cukup mengatakan setuju atau tidak setuju, dan tidak perlu ada pro dan kontra. Yang penting kita terus berikan masukan positif sehingga lahir UU yang benar-benar adil dan bisa memayungi kita semua agar bangsa ini tidak terpuruk moralnya," cetus Aa Gym.

Senada dengan Aa Gym dalam memaknai kreativitas, da'i muda yang sedang populer saat ini Jefri Al Bukhari menilai, siapapun tidak berhak mencampuradukkan seni dengan pornografi dan pornoaksi.

"Jika kita membicarakan pornoaksi dan pornografi hendaknya lebih mengedepankan hati nurani dan moral. Tanya pada hati nurani dan moral kita, apakah perbuatan tersebut sudah sesuai," ujar Ustad yang digandrungi kalangan muda Indonesia ini dengan nada retoris.

Sementara itu, Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA., anggota MUI Pusat, kepada *Berita Indonesia* mengungkapkan persetujuannya atas rencana DPR mempercepat pembuatan UU APP. Dia mengingatkan, bagaimanapun yang namanya membuka aurat dalam Alquran itu jelas dilarang.

Fakta yang sulit disangkal, tindak perkosaan sudah terjadi sampai tingkat SD. Hal itu karena biologis generasi muda sudah dikarbit lebih dulu, sehingga matangnya lebih cepat dari pada fisiknya. "Biang karbitnya adalah maraknya pornografi," tegas Ketua Dewan Syariah LMI, Surabaya, itu.

Bahkan, Guru Besar IAIN Sunan Ampel itu langsung merespons pandangan sementara pihak yang menentang RUU APP dari perspektif seni. "Apakah mereka tidak tahu moralitas bangsa ini sedang dipertaruhkan?

Jika kata itu bukan kategori pornografi, lantas yang mana pornografi menurut mereka sebenarnya? Mereka itu kan berbicara karena orientasi uang semata," kata Roem Rowi sengit.

Kata Roem, Alquran menyebutkan adanya mental manusia yang terlalu cinta dunia. Itu sebenarnya mental yang paling rendah dan yang paling hina. Jadi kalau uang jadi tujuan maka akan menghinakan manusia itu sendiri.

Roem Rowi mengaku tidak berprasangka negatif soal adanya kepentingan pihak-pihak tertentu di balik rencana pembentukan UU Antipornografi dan Pornoaksi.

Tapi, yang namanya aturan apapun bentuknya kalau yang membuat manusia itu cenderung ada yang tidak beres. Inilah bedanya antara aturan yang dibuat oleh manusia dan aturan Tuhan. Aturan Tuhan semata-mata untuk manusia, si makhluk ciptaannya.

Singkatnya, "Saya setuju UU APP cepat selesai jika tujuannya untuk melarang. Bangsa ini bangsa religius. Religiositas kita terkadang melebihi bangsa Barat."

Bukan hanya kalangan agamawan Islam yang mendukung UU APP, tapi juga dari tokoh agama non-Islam. Alasannya, UU itu dapat menghadang daya rusak pornografi dan pornoaksi terhadap moral bangsa.

"Saat ini memang dibutuhkan sebuah aturan untuk mencegah dan melawan pornografi dan pornoaksi," ungkap Sekum Persekutuan Gereja-gerja di Indonesia (PGI), Pdt Weinata Sairin, M.Th., seperti dituturkan kepada *Republika* (15/2).

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Dani Sanusi, menegaskan setiap agama pasti menolak pornografi dan pornoaksi. Romo Dani juga sepakat perlunya UU APP yang rancangannya sedang dibahas di DPR.

Hanya saja, Romo Dani berharap, ada perubahan beberapa pasal yang dianggapnya "memberatkan" dan "memojokkan" kaum perempuan.■ AF

Antara Pornografi, erotisme dan seksualitas sepertinya sama-sama bertumpu pada seksualitas. Tapi, adakah perbedaannya?

Ketiganya berbeda meskipun sama-sama bertumpu pada masalah seksualitas. Ketiga pengertian itu harus dirumuskan menurut wacananya masing-masing. Seksualitas sama sekali bukan pornografi. Seksualitas merupakan bagian dalam kehidupan manusia dan tidak bisa disebutkan dalam pengertian yang negatif. Dalam kaitan itu, reproduksi terjadi karena seksualitas.

Lalu, Erotisme?

Erotisme dalam batasan yang umum adalah keingintahuan tentang seksualitas lawan jenis. Erotisme menyangkut komunikasi. Komunikasi melalui gerakan erotis, perilaku erotis, maupun ekspresi erotis, berkaitan dengan seksualitas. Gerakan erotis di panggung merupakan komunikasi dalam skala lebih besar.

Jika kemudian dikaitkan dengan seksualitas?

Ya, persoalannya tidak menjadi pelik. Sebaliknya jika dikaitkan dengan pornografi, menjadi sangat berat.

Lalu menurut Anda, apa yang perlu ditinjau ulang dari RUU tersebut?

Yang lebih penting segera diperbaiki dalam RUU tersebut adalah mengenai pornoaksi, yang merupakan neologisme yang berbeda sama sekali dengan pornografi. Mengatur pornografi, sebetulnya melindungi masyarakat dari produk-produk pornografi. Sedangkan pornoaksi, dalam RUU itu dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku orang melalui tata susila.

Jadi?

Pornoaksi tidak mungkin diatur dengan undang-undang. Bayangkan kalau mau membuat sebuah badan arbitrase tentang tata susila, tentang kebiasaan-kebiasaan etnik di Indonesia. Bagaimana caranya?

Anda bisa memberi contoh?

Misalnya Bab III RUU itu mengenai pengecualian dan perizinan. Disebutkan bahwa pornografi dibolehkan untuk kegiatan seni, olahraga, dan kesehatan. Yang dimaksud itu kan semuanya bukan pornografi, melainkan seksualitas.

Mestinya bagaimana?

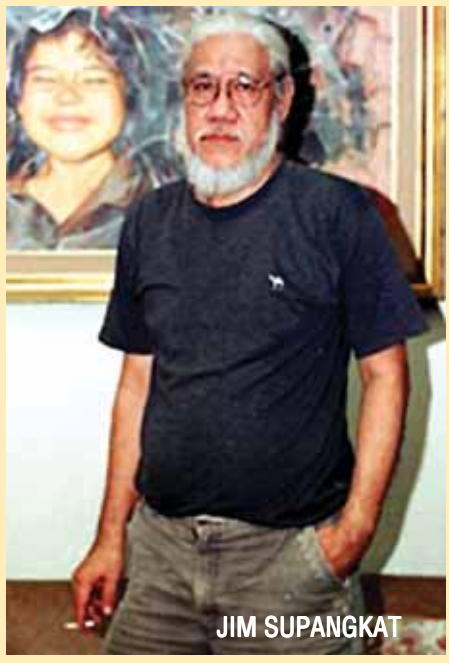

JIM SUPANGKAT

Yang harus menjadi perhatian utama terkait pornografi adalah eksploitasi manusia. Hal itu jauh lebih penting daripada membicarakan perbedaan pandangan tentang kesusilaan. ■ AD

Drs. H. Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU Antipornografi dan Pornoaksi)

"Definisi Pornografi dan Pornoaksi Sudah Jelas"

Tiga kali ketukkan palu menandai berakhirnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Kamis (9/2). Ketua Pansus, Drs. H. Balkan Kaplale, terlihat sedikit lega, kendati belum tuntas tugasnya. Selama lima bulan terakhir ini timnya bekerja secara maraton untuk mendengar masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan RUU yang saat ini masih menjadi pro dan kontra. Padahal RUU itu sendiri sudah tujuh tahun digodog. Tapi, tampaknya masih saja ada kendala untuk mengesahkannya. Berikut petikan wawancara *Berita Indonesia* dengan anggota Komisi X DPR (bidang Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olah Raga) ini:

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini sudah tujuh tahun disusun. Tapi masih saja terjadi pro dan kontra untuk mengesahkannya. Sebenarnya apa saja hambatanya?

Hambatannya, ada beberapa hal. *Pertama*, definisi pornografi dan pornoaksi yang tidak bisa ketemu. *Kedua*, saya melihat di antara fraksi-fraksi Di DPR juga ada perbedaan pendapat. Sehingga RUU ini akhirnya tertunda-tunda terus.

Lalu, apa yang kemudian dilakukan oleh Pansus?

Kami sudah bekerja maraton sejak September 2005. Diawali rapat pleno paripurna DPR, lalu keluarlah SK DPR No 10/IX/2005. Dalam lima bulan ini kami melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 8 menteri, 62 lembaga, 19 tokoh dan 81 elemen masyarakat, termasuk kalangan LSM, organisasi agama, organisasi wanita, para seniman dan budayawan, pengelola bisnis jasa seperti karaoke dan pantipijat, dokter dan psikiater ahli dan para pejabat daerah. Mereka semua kami mintai pendapat dan pandangannya, sebagai masukan.

RUU ini sebenarnya isinya apa?

Isinya ada lima hal. *Pertama,* ketentuan mengenai definisi apa itu pornografi dan pornoaksi? *Kedua,* tanda-tanda pornografi dan pornoaksi itu apa saja. *Ketiga,* lalu akan diapakan pornografi dan pornoaksi itu. *Keempat,* memang ada ketentuan pidana dan perdata. Ketentuan pidana ini yang kami junjung tinggi. Tapi tindak pidana ini bukan berarti mengkalkulasi jumlah denda dan tahun hukuman. Tapi dibuat aturan mainnya. *Lima,* ketentuan hukum dan penutup tentang undang-undang ini. Kira-kira nanti akan ada pasal-pasal yang menjurus pada kriteria pidana, mungkin juga ada kriteria perdata dan sanksi-sanksi moral masyarakat.

Artinya, sudah ada definisi yang baku mengenai pornografi dan pornoaksi di RUU ini?

Definisinya ada 20 macam. Misalnya media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan erotika. Lalu, pornografi adalah kegiatan dan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika di muka umum.

Bagaimana dengan kekhawatiran warga negara asing?

Memang saya pernah diwawancarai BBC London dan Australia. Pertanyaannya: "Kalau ada warga negara kami yang mandi telanjang di Bali, berarti bisa ditangkap dengan UU ini?" Inilah opini yang berkembang di masyarakat. Seakan-akan mereka akan ditangkap satu persatu garagara mandi di pantai. Padahal, tidak begitu. Kalau para turis itu berenang di Sanur atau Kuta, walaupun telanjang, silahkan saja. Asalkan mereka hanya di daerah Bali. Begitu mereka menyeberang ke Ketapang Gilimanuk, lain lagi ceritanya. Mereka tidak bisa sembarangan telanjang di sembarang tempat dan wilayah.

Berarti UU nanti akan disesuaikan dengan kultur dan budaya masing-masing daerah?

Di daerah, nanti sudah ada Peraturan Daerah (Perda). Baik itu Perda Bali maupun Papua dan daerah lainnya.

Tapi bagaimana jika masih ada yang pro dan kontra?

Itu biasa. Saya jalan terus dong.

Berapa kira-kira prosentase penolakan dari sekian banyak elemen yang telah dimintai masukannya?

Saya kira hanya 2 persen.

Untuk memberlakukan RUU ini sebagai Undang-Undang, ada semacam kekhawatiran soal penegakan hukum. Bagaimana menurut Bapak?

Betul, pada rapat kerja dengan menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Nopember lalu, untuk menegakkan hukum KUHP saja disusun lima tahun, sebanyak 747 pasal. Lalu anggota DPR interupsi. "Pak menteri jangan salahkan DPR kalau nanti ada yang jalan telanjang bulat." Akhirnya dapat kata sepakat separuh dari pasal itu ditugaskan kepada Pansus. RUU ini akan dibuat MoU dengan Menteri Hukum dan HAM.

Jadi, bapak optimis RUU ini bakal segera disahkan?

Tentu, saya sangat optimis. ■ Sb

♦ DRS. H. HARUN AL RASYID, M.SI

Sosok Birokrat Sejati

Jiwa pengabdiannya tak pernah mengenal kata berakhir. Selama 36 tahun ia menapak karier di pemerintahan DKI Jakarta.

Berpenampilan sederhana. Dekat dengan siapa saja. Itulah figur Harun Al Rasyid. Sikapnya yang ramah tanpa membedakan satu sama lain membuat pria kelahiran Bima 64 tahun lalu ini dikenal sebagai sosok birokrat dan politisi.

Ia merintis karir sebagai PNS di lingkungan Pemda DKI. Ia dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat. Jenjang karir yang ditapakinya di Pemda DKI pun terbilang lengkap. Sebut saja, antara lain, jabatan Staf Biro Pemerintahan, Wakil Camat, Camat, Kepala Catatan I Pemerintahan, Sekretaris Walikota, Wakil Walikota, Kepala Biro Pemerintahan, Walikota, Sekwilda DKI sampai Wagub DKI bidang Ekonomi dan Keuangan.

Semua jabatan itu dilaluinya secara berjenjang dan bertahap. Jabatan politis yang pernah diembannya adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1998-2003.

Pada 2002, nama Harun sempat mencuat sebagai pesaing kuat Sutiyoso sebagai Gubernur DKI. Tapi langkahnya terhenti di tengah jalan karena tidak mendapat restu dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Mega menimbang, tenaga Harun masih sangat dibutuhkan membangun NTB.

Dalam benak suami Dra. Hj. Siti Nuraini ini, jabatan adalah amanah. Pengabdian bukan diukur dari jabatan melainkan harus diwujudkan dengan karya.

Jiwa pengabdiannya tak pernah hilang. Pada Pemilu 2004, ia pun melenggang ke Senayan sebagai anggota DPD mewakili Provinsi NTB.

Berpikir Luas

Sebagai anggota DPD NTB, ia kini tengah memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa sebagai provinsi tersendiri, lepas dari NTB. Pengalaman memimpin NTB selama lima tahun membuatnya sangat paham potensi yang dimiliki daerah itu.

"Tentu saja ini merupakan perjuangan semua rakyat se-Pulau Sumbawa dan kami di sini hanya menampung aspirasi masyarakat setempat," ujar Harun Al Rasyid kepada **M. Subhan** dari *Berita Indonesia*.

Pemekaran wilayah, kata alumnus Lemhannas Sespa Khusus KSA VI (1996) ini, adalah satu hal yang wajar. Pemekaran wilayah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemekaran Wilayah.

Pemekaran Kepulauan Sumbawa sebagai provinsi tersendiri, hemat Harun, mesti dilihat dari sejumlah alasan. *Pertama*, Kepulauan Sumbawa saat ini terdiri atas lima daerah otonomi yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi, secara administrasi itu sudah memenuhi syarat.

Kedua, potensi sumber daya alam dan pendapatan asli daerah (PAD) sudah memadai. Selama ini, Kepulauan Sumbawa memberikan kontribusi sebesar Rp 200 miliar kepada PAD NTB.

Ketiga, secara geografis tidak sulit untuk mencari garis batas karena daerah kepulauan. *Keempat*, jumlah penduduk telah memenuhi syarat termasuk sumber daya manusianya.

"Dari berbagai alasan itu, pembentukan Provinsi Sumbawa sangat memungkinkan," tandas Harun.

Menyinggung rencana pemekaran wilayah DKI dengan konsep Megapolitan, yang kini sedang bergulir, sebagai orang yang lama malang-melintang di Pemda DKI Harun mengaku sangat mendukungnya. Baginya, yang terpenting bagaimana prospek perkembangan dan arah pembangunan DKI ke depan.

"Jangan memandang Jakarta ini sebagai Ibukota DKI saja. Lihatlah secara makro sebagai ibukota negara. Konsep Megapolitan itu bukan dimaksudkan mencaplok daerah-daerah sekitar," jelasnya.

Pengembangan Megapolitan harus dilakukan secara terpadu, melibatkan daerah-daerah sekitar yang selama ini dikenal sebagai Daerah Penyangga. Yang lebih penting lagi, kemudahan pelayanan publik.

"Jangan apriori dulu terhadap usulan konsep Megapolitan yang diluncurkan Pak Sutiyoso," ucap Harun, sosok birokrat sejati, yang namanya mulai pula disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat kuat calon Gubernur DKI menggantikan Sutiyoso. ■ AF, SB

BIODATA

Nama: Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si.
Tempat/Tgl. Lahir: Bima, 27 Desember 1942
Agama: Islam
Pendidikan Formal : S2-Universitas Satyagama Jakarta (2000)
Pendidikan Informal:
⇒ Mengikuti 17 pendidikan informal
⇒ Alumnus Lemhannas Sespa Khusus KSA VI, Jakarta, 1996
Riwayat Pekerjaan:
1. Staf Biro Pemerintahan Pemda DKI (1967-1968)
2. Wakil Camat Tanjung Priok (1968-1973)
3. Camat Tanjung Priok (1973-1978)
4. Camat Penjaringan (1978-1980)
5. Kepala Catatan I Pemerintahan, Jakarta Utara (1980-1981)
6. Sekretaris Kota, Jakarta Utara (1981-1984)
7. Wakil Walikotamadya Jakarta Utara (1984-1988)
8. Kepala Biro Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta (1988-1989)
9. Walikota Jakarta Selatan (1989-1993)
10. Sekwilda DKI (1993-1997)
11. Wakil Gubernur DKI Bidang Ekonomi dan Keuangan (1997-1998)
12. Gubernur Nusa Tenggara Barat (1998-2003)
13. Anggota DPD-RI (2004-2009)

Prestasi & Penghargaan :
1. Penghargaan Pegawai Teladan Se-DKI tahun 1972
2. Pembina Wilayah Terbaik se-DKI 1976
3. Satya Lencana Wira Karya 1991
4. Prestasi Kencana Presiden RI 1992
5. Pengabdian Masa Kerja 30 tahun dari Gubernur DKI 1997
6. Bintang Jasa Utama dari Presiden RI 1997

Pilpres - Pilkada Serentak

Dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu, Wapres Jusuf Kalla mengusulkan pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah digelar bersamaan. Mengapa PKS menolak?

Julukan–'Tokoh Inovasi Politik' agaknya pantas diberikan kepada Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla. Beliau sering melontarkan ide yang inovatif seputar dinamika politik di Indonesia. Sebelumnya, Wapres pernah mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) sebaiknya bergabung ke partai politik. Alasan Wapres, kalangan PNS banyak yang profesional.

Awal Februari silam, Wapres mengusung gagasan baru. Apa itu? Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengusulkan agar sejumlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres) 2009.

Alasannya, selama ini hampir sepanjang tahun, waktu habis tersita untuk pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah sehingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal-hal lainnya. Alasan lain, kata Wapres, efisiensi waktu dan biaya.

Sebagaimana dikutip *Suara Karya* (11/02), Wapres Jusuf Kalla mengusulkan penyatuan penyelenggaraan Pilpres dan sejumlah Pilkada demi efisiensi nasional.

"Saya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah meminta kepada F-PG (DPR, red.) untuk membicarakan itu secepatnya demi efisiensi nasional. Intinya agar ada suatu penyederhanaan peristiwa politik nasional, demokrasi kita sederhanakan, jangan bertele-tele seperti sekarang," tandas Wapres.

Lebih jauh, tulis koran milik Partai Golkar itu, Wapres Jusuf Kalla menginginkan agar Pemilu hanya dua kali saja: Pemilu Legislatif (DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota) dan Pemilu Eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota). Jadi, rakyat cukup dua kali memilih dan biayanya menjadi lebih efisien dan murah.

Menurut *Media Indonesia* (9/2), Wapres Jusuf Kalla menyampaikan usul tersebut pertama kali saat menerima Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Kantor Wapres, Jakarta. "Tadi ada gagasan dari Wapres agar sebagian dari Pilkada digabungkan dengan Pilpres dan sebagian lagi sendiri," kata DR. Ramlan Surbakti, Wakil Ketua KPU, membenarkan.

KPU mengusulkan revisi atas UU tentang Partai Politik dan UU Pemilu diselesaikan akhir 2006 sehingga pada 2007 sudah bisa dimulai tahapan Pemilu 2009.

Yang namanya usul tidak selalu mendapat dukungan. Tak terkecuali usul Wapres soal penyeragaman waktu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada ini. Adalah Partai keadilan Sejahtera (PKS), antara lain, pihak yang menolak usul tersebut. Alasan PKS, penggabungan itu justru akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Razikun, menyatakan sistem Pemilu Indonesia sangat kompleks bahkan termasuk paling rumit di dunia.

"Banyak partai politik dan Caleg. Kalau ditambah Pilkada, kualitas demokrasi akan berkurang," ucapnya seperti dikutip *Republika* (13/2). Untuk saat ini, lanjutnya, ide penyatuan Pilpres dan Pilkada sulit diwujudkan karena secara teknis masa jabatan kepala daerah beragam. Apalagi Pilkada sudah lama berlangsung dan diatur secara khusus dalam UU Pemerintahan Daerah. ■ AF

WAPRES JUSUF KALLA

DPD Mesti Fokus Pengawasan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Assiddiqie menyatakan, agar populer di mata masyarakat, DPD harus memfokuskan kinerja pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan jangan berupaya menandingi DPR dalam fungsi legislasi (pembentukan UU).

Menurut Jimly di Bukittinggi (30/1), dalam fungsi legislasi, tugas DPD hanya sebagai badan pertimbangan DPR yang tidak mengikat dan tidak juga bisa mengambil keputusan. ■

PAN *Recall* Djoko Edhi

Anggota DPR-RI dari Fraksi PAN, Djoko Edhi Abdurrahman, dicopot keanggotaannya di DPR dan jabatannya sebagai Wakil Sekjen DPP PAN. Anggota Komisi III DPR itu di-*recall* oleh rapat pleno partainya (12/2) karena dianggap melanggar AD/ART PAN. Pleno menilai, Djoko Edhi melanggar rambu-rambu partai apalagi saat mengusung soal perjudian yang memang sudah jelas-jelas ditolak PAN.

Tapi Djoko tidak bisa menerima begitu saja keputusan partai terhadap dirinya. Ia akan melapor ke lembaga arbitrase di PAN dan menempuh langkah hukum, baik gugatan perdata maupun lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

DJOKO EDI ABDURRAHMAN

Langkah-langkah itu ditempuh karena keputusan *recall* atas dirinya, menurut anggota DPR dari Dapil X Jawa Timur itu, tidak jelas dan sulit dibuktikan. Lebih dari itu, lanjutnya, sampai keputusan *recall* keluar, dirinya belum menerima surat peringatan tertulis.

Lepas dari upaya yang akan ditempuh Djoko, Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir, menegaskan, keputusan rapat pleno lewat mekanisme pemungutan suara (*voting*) sudah sangat demokratis. Keputusan diambil melalui voting dengan 56 suara setuju, 45 suara menolak dan 8 suara abstain. Bachir berharap, Djoko Edhi mengundurkan diri.

Pemerintah Siapkan 5 RUU Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyiapkan lima RUU untuk menghadang aparat birokrasi yang bermental korup.—"RUU itu akan mencakup sikap dan perilaku koruptif dalam melayani masyarakat serta perubahan sistem menajemen birokratik menjadi sistem manajemen wirausaha," ujar Menneg PAN Taufiq Effendi, dalam Raker dengan Komisi II DPR di Jakarta (26/1).

Kelima RUU itu adalah RUU Etika Pemerintahan, RUU Hukum Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, RUU Kementerian Negara, dan RUU Kepegawaian Negara.

Presiden Terima 1,9 Juta SMS

Presiden SBY sampai saat ini telah menerima sebanyak 1,9 juta lebih SMS dan 15 ribu lebih surat dari masyarakat melalui PO Box 9949 dan SMS 9949.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan KKN, Sadan Marbun, di Kantor Presiden, Jakarta, SMS yang dikirim masyarakat sebagian besar melaporkan mengenai kinerja pemerintah. Sedangkan untuk P.O. Box 9949 sebanyak 8.027 surat mendukung langkah pemerintah memberantas korupsi.

"Semua surat tersebut sudah dijawab dan sebanyak 1.066 surat diteruskan kepada departemen, Pemda dan instansi untuk diklarifikasi," ujarnya.

Situs Kepresidenan Diluncurkan

Presiden SBY meluncurkan situs www.presidensby.info (14/2) untuk menyediakan informasi tentang kegiatan Presiden, Ibu Negara dan Kantor Kepresidenan. Situs resmi presiden SBY dapat diakses selama 24 jam ke seluruh dunia dengan tujuan memberikan data dan informasi langsung, termasuk untuk pers di dalam dan luar negeri. Situs ini antara lain memuat perspektif SBY, instruksi dan peraturan presiden, wawancara, kolom, keterangan pers oleh presiden serta jurubicara Presiden dan berita-berita yang dimuat media massa.

Agar Pemekaran Daerah Terkontrol

Semangat otonomi daerah yang mengemuka di era reformasi ditingkahi pula oleh fenomena pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Para elit daerah mengusung aspirasi warganya ke pusat (DPR dan pemerintah) agar daerahnya dijadikan kota/kabupaten/provinsi baru.

Persoalannya, Pusat tidak memiliki *grand design* tentang pemekaran daerah. Akibatnya, jumlah daerah yang dimekarkan kian tak terkontrol.

Ada usul bagus: pembentukan daerah otonom —sebagai hasil pemekaran daerah— baru sebaiknya dihentikan sementara waktu. Jadi, pemerintah dan DPR tidak memproses usul-usul pembentukan daerah baru sembari memperbarui aturan yang jadi payung hukum pemekaran daerah.

"Hendaknya usul pembentukan daerah baru tidak diproses dulu sebelum ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah," ungkap anggota Komisi II DPR-RI, Andi Yuliani Paris (F-PAN), di Jakarta belum lama ini.

Badan Musyawarah DPR-RI, akhir Februari 2005, telah menugaskan Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri) mengkaji kembali 18 RUU pemekaran wilayah, yang merupakan inisiatif sekaligus 'warisan' dari DPR periode 1999-2004. ■ SP. AF

TIB ATASI PENYELEWENGAN PASPOR

Paspor palsu dan paspor ganda. Persoalan ini muncul ke permukaan setelah penangkapan David Nusawijaya alias Eng Tjon Wie. Pihak Imigrasi ingin memberantas penyimpangan seperti ini lewat penerapan Teknologi Informasi Biometrik (TIB).

Perihal kasus sipemalak BLBI David Nusawijaya, jawaban Dirjen Imigrasi M. Iman Santoso ringkas saja, "kalau tidak tahu jangan bicara." Kenapa? Soalnya dia juga duduk di dalam tim terpadu pencarian sang buron. Tim Polri yang akan berangkat ke Amerika meminta sidik jari mana yang tepat dengan David. Pihak Imigrasi punya nama David Nusawijaya alias Eng Tjon Wie. Dua-duanya mesti dicari karena menggunakan alias.

Kata Iman, ada paspor atas nama Eng Tjo Wie, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang. Ada juga atas nama David Wijaya Eng. Sekarang dua berkas ini mesti dibawa untuk memastikan siapa sebenarnya yang dicari. Fotonya dicocokkan yang mana Wijaya Eng dan mana Eng Tjo Wie. Satu per satu ciri-cirinya dibandingkan.

Di dalam tim terpadu, kata Iman, ada kesepakatan bahwa semua informasi disampaikan oleh Ketua Tim, Basri Arief (Wakil Ketua Jaksa Agung). Tapi begitu David sampai di Jakarta, semua orang bicara. Imigrasi dipersalahkan. Kenapa bisa kebobolan dan David lolos ke luar negeri.

Menurut Iman, tiga belas bulan terakhir, pencekalan David tidak diperpanjang. Masa pencekalan David dari tahun 1999 sampai 2005. Ada tiga kali kekosongan cekal, 7 bulan, 7 bulan dan 13 bulan. Imigrasi hanya melakukan pengawasan bilamana diminta oleh pihak yang berhak memerintahkan pencekalan. Imigrasi dituding melepas David, diperburuk oleh informasi bahwa David memiliki paspor ganda.

Tak ada pihak-pihak yang bisa dipersalahkan jika penyimpangan di dalam kepemilikan paspor—dokumen perjalanan ke luar negeri—masih marak. Pihak Imigrasi ingin menelusurinya mulai dari identitas diri dan keluarga; KTP, KK, Akte Kelahiran dan Surat Kawin. Keterangan identitas tersebut, menurut Iman, keabsahannya masih kurang sempurna sehingga sangat mudah dipalsukan. Faktanya, tidak tertutup kemungkinan seseorang memiliki satu atau lebih identitas diri. Sedangkan pembuatan paspor saat ini masih mensyaratkan pada surat-surat identitas tersebut. Karena itu, mereka yang memiliki lebih dari satu identitas diri

MENAKAR STATUS IMIGRASI

Mobilitas manusia dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini berarti semakin sibuknya fungsi dan tugas Imigrasi. Persoalan penting atau tidaknya perubahan status Imigrasi dilihat dan diteliti dari perkembangannya di masa datang. Dirjen Imigrasi M. Iman Santoso mengatakan, Imigrasi tadinya hanya punya 20 sampai 50 pegawai, sekarang sudah 5.000 orang. Ke depan berapa? Prediksi ini harus dilihat dari berbagai sektor.

Berikut ini pandangan **Iman Santoso** didampingi **Cecep Soepriantna**, Humas Imigrasi tentang berbagai hal keimigrasian di dalam wawancara khusus dengan **Samsuri** dan **Wilson Edward** dari *Berita Indonesia*.

Apakah Direktorat Jenderal Imigrasi tetap berada di bawah departemen atau menjadi badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden?

Sebetulnya kita harus mengevaluasi ini secara menyeluruh. Seberapa besar fungsi Imigrasi masa sekarang dan yang akan datang. Bagi Imigrasi juga berlaku teori organisasi statis dan organisasi dinamis. Statis dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dari segi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dinamis itu pasti, karena organisasi yang bekerja dan berjalan dengan sehat dia akan berkembang. Misalnya, tahun 1800, perusahaan mobil Ford hanya punya 10 pegawai, tapi sekarang sudah mencapai ratusan ribu orang.

Perjalanan manusia, baik domestik maupun internasional, dalam satu dekade ini meningkat tajam, dari 700 juta menjadi 1,5 miliar orang. Kalau separuhnya merupakan perjalanan internasional, tentu yang sibuk pihak Imigrasi. Segi lain, tingkat kemiskinan di dunia. Meningkatnya kemiskinan, memaksa orang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Apakah kemiskinan di Indonesia, berkurang atau bertambah? Pertambahan penduduk menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Persoalan dari pergerakan manusia *(people mobility)* secara simultan menyebabkan *transnational crime*. Dalam hal ini, apakah Imigrasi dilibatkan atau terlibat atau punya fungsi? Artinya, apakah beban Imigrasi bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, wadahnya jangan dipaksakan hanya sebesar ini, nanti dengan muatan lebih besar, maka akan tumpah dan berceceran. Tetapi jangan pula menyediakan tempat yang sangat besar kalau isinya berkurang.

Jadi yang paling tepat, kita jangan berkomentar dulu. Tetapi adakan analisis sejauh mana pemerintah akan memberikan beban kepada Imigrasi. Ini bisa dilihat dan diukur, baik saat ini maupun masa mendatang. Kita punya analisis dari data yang ada. Tapi juga tidak menghilangkan pertimbangan-pertimbangan filosofis, pertimbangan historisnya, banyak yang sudah berubah.

Kita lihat pada negara-negara lain. Amerika dulu Imigrasinya ada di bawah Department of Justice, tapi sekarang di bawah Department of Defence and Security. Singapura, negara kecil paling dekat dengan Indonesia, dulu menempatkan Imigrasi sebagai bagian kecil dari Departemen Dalam Negeri, dipimpin oleh seorang direktur, berkembang menjadi Singapore Imigration and Registration. Sejak dua tahun lalu diubah lagi menjadi Imigration and Check Point Authority di mana Bea & Cukai digabungkan ke Imigrasi, dan mempunyai peran setingkat Direktorat Jenderal di bawah Komisioner. Ternyata tren dunia menempatkan Imigrasi pada prediksi yang lebih besar.

Sejauh ini masih ada tudingan, pihak Imigrasi banyak melakukan penyimpangan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengeliminasinya?

Sekarang, Anda punya anak bukan. Kalau kita mendidik anak melarang untuk melakukan sesuatu tentu diberikan pelajaran, dan harus dicarikan jalan keluarnya. Korupsi atau pungli di Imigrasi masih jalan. Saya berulangkali meminta tekad teman-teman, mari kita tiadakan, mari kita puasa. Kita tahu bahwa gaji kita tidak cukup untuk makan bahkan untuk ongkos transpor.

IMAN SANTOSO: Evaluasi menyeluruh.

PELAYANAN: Sesuai aturan.

dengan mudah membuat paspor ganda atau paspor palsu.

Untuk menekan penyimpangan tersebut, pihak Imigrasi sejak 2002 meluncurkan program yang berbasis pada biometrik—ciri khas tubuh seseorang, karena setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda. Misalnya, sidik jari dan tanda-tanda tertentu yang tidak bisa diubah walaupun dengan operasi plastik. Dalam perkembangan terakhir dari dunia teknologi informasi mengarah kepada DNA dan vascular. Namun International Civil Organization (ICO) merekomendasikan biometrik mutlak, yaitu *facial biometric* (ciri khas wajah) dengan dua opsi; *finger biometric* (sidik jari) dan *iris biometric* (kelopak mata).

"Maksudnya setiap pemohon paspor akan diverifikasi apakah orangnya sama dengan nama berbeda," kata Iman kepada Samsuri dan Wilson Edward dari *Berita Indonesia*. Dengan demikian si pemohon paspor dapat dideteksi secara dini apakah dia bermaksud membuat paspor ganda atau paspor palsu.

Sistem biometrik memang mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi masih harus ditentukan kemampuan intelegensi manusia. Kalau teknologi mengatakan jawabannya orang ini sama, atau orang ini berbeda, tugas inteligensi manusia, mengolah. Menurut Iman, karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kemungkinan salah masih ada.

Iman menginginkan peralihan ke sistem tersebut berjalan mulus, tidak boleh ada stagnasi. Karenanya dia menyiapkan secara rinci, cermat dan terencana dengan baik. Peralatannya (*hardware*) memang diimpor, tetapi perangkat lunaknya (*software*) berasal dari dalam negeri. Sistem ini akan segera diterapkan untuk mengatasi berbagai penyimpangan di dalam pembuatan paspor. Alat ini bisa menghasilkan 10 paspor per satu jam. Kalau satu kantor Imigrasi mengerjakan 200 paspor sehari, berarti dengan 10 jam kerja, dibutuhkan dua unit. ■ SH

Pegawai muda lulusan Akademi yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta, dapat gaji sebulan Rp 750.000. Mereka bekerja 20 hari dalam satu bulan. Tidak ada uang transpor. Mereka menggunakan gajinya untuk biaya transpor ke Bandara. Kalau dia naik bus Damri, maka pergi-pulang setiap hari Rp 40.000, selama 20 hari kerja Rp 800.000. Uang kostnya mana, buat makannya mana, sedangkan kerja di Bandara praktis 24 jam. Tetapi gaji pegawai negeri sipil termasuk Imigrasi dihitung basisnya hanya 8 jam per hari. Uang lembur kecil sekali, hanya Rp 5400 per 4 Jam.

Padahal anak-anak lulusan Akademi Imigrasi lebih sejahtera ketika masih kuliah dan diasramakan. Pakaian mereka disiapkan, makan, tidur, gratis, dapat uang saku Rp 750.000 sebulan. Tetapi begitu dilantik jadi PNS, mereka harus bayar semua biaya dari kantong mereka sendiri. Sayang kalau anak-anak ini rusak karena korban dari sistem. Itulah yang sedang kita pikirkan. Bagaimana bisa memberikan insentif bagi mereka. Ada biaya operasional, misalnya untuk transpor dan makan di Bandara. Biaya makan di Bandara bisa tiga kali lipat dari harga makan diluar. Apakah mereka harus keluar untuk mencari Warteg? Kan tidak bisa. Tetapi saya katakan, banyak juga teman-teman di Imigrasi yang nakal. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok pertama, kedua atau ketiga, tetapi kebutuhan besar. Nah, ini yang harus kita hentikan.

Dapatkah Bapak menjelaskan tentang program Sistem Manajemen Komunikasi keimigrasian (Simkim). Apakah telah dilaporkan kepada pemerintah?

Kami melakukan presentasi dengan DPR, Agustus 2003. Sudah disampaikan ke Menteri Keuangan, waktu itu, Boediono. Pada prinsipnya, menteri setuju menggunakan sebagian penerimaan dari dana keimigrasian untuk membangun sistem.Tapi dari 2003 sampai sekarang, belum berjalan, saya tidak tahu kenapa. Kami sudah membuat satu desain arsitektur Simkin. Simkin sudah pernah dipresentasikan kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Menkopolkam, bahkan sering menanyakan Simkin kok belum jalan.

Imigrasi Indonesia mempunyai kendala yang spesifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya 130 *entry point*. Dalam semangat otonomi daerah, setiap kabupaten dan kota meminta untuk bisa berhubungan langsung dengan dunia internasional. Bayangkan, di Indonesia ada 430 lebih kota dan kabupaten. Kalau semua minta Bandara internasional, atau setengahnya saja, sungguh sulit dibayangkan. Dengan 130 *entry point* (pintu masuk) saja sudah kebingungan.

Kalau semua *entry point* ini disertai dengan seluruh sistem yang memadai mungkin tidak masalah. Tapi garis pantai kita sangat panjang. Kalau ada yang lari dari Indonesia, sepanjang dia melewati *entry point*, maka Imigrasi yang salah, tapi kalau mereka tidak lewat *entry point*, apakah masih Imigrasi yang salah? Dulu waktu masih ada GAM, penyelundupan senjata berjalan dengan bebas antara Semenanjung dan Aceh. Sampai sekarang pun orang masuk ke Malaysia atau Singapura, dalam hal-hal tertentu, mereka masih bisa. Contohnya, para nelayan kita membawa ikan ke Singapura karena di sana harganya lebih mahal. Masuk di Singapura mereka tidak ditanya oleh petugas Imigrasi, sebab mereka membawa ikan yang dibutuhkan oleh Singapura. Tidak tanya paspor dan macam-macam.

Jadi Sistem Informasi Manajemen keimigrasian merupakan aplikasi teknologi informasi ke dalam seluruh kegiatan dan fungsi keimigrasian, bahkan sekarang sudah lebih maju dengan adanya konvensi tentang Transnational Crime. Maka ada kewajiban negara-negara di dunia untuk saling tukar informasi keimigrasian. Misalnya, Advance Passengers Information (API). Seseorang yang berangkat dari Belanda, mau masuk ke Indonesia, mereka minta visa di KBRI Denhag, itu sudah masuk datanya ke *database* kita. Dua hari kemudian masuk lagi data ke *database* kita dari airport, berasal dari perusahaan penerbangan yang dia gunakan. Ini merupakan sistem peringatan dini (*early warning system*).

Selama menjabat sebagai Dirjen, apakah yang telah Bapak capai?

Sewaktu saya dipilih dan diangkat sebagai Direktur Jenderal, setelah sekian belas tahun, Dirjen Imigrasi dipegang oleh pejabat non-karir. Ini satu keberhasilan yang diberikan pemerintah kepada jajaran Imigrasi untuk memimpin dirinya sendiri. Langkah-langkah yang saya lakukan, memberikan pelayanan keimigrasian, yang tadinya hanya dilakukan oleh 84 kantor Imigrasi. Sekarang bertambah menjadi 103 Kantor Imigrasi. Maksudnya melakukan pemecahan konsentrasi pelayanan di Kantor Imigrasi. Di jajaran Imigrasi ada fungsi intelijen. Kita upayakan membentuk satu direktorat baru.

Soal pembinaan para pegawai, terus terang saya belum merasa puas, karena kalau saya harus menindak maka akan habislah petugas Imigrasi. Artinya saya inginkan adanya suatu kesejahteraan yang halal bagi mereka untuk bisa mengantisipasi dan memberantas perilaku buruk mereka. Tapi karena saya belum berhasil di sana, harus saya akui Presiden marah kepada Imigrasi. Itu adalah bagian dari kegagalan saya. ■ SH

KEBEBASAN YANG MENCENGANGKAN

E.C.W Neloe diputus bebas. Jaksa Agung kemudian mengajukan kasasi. Majelis hakim yang menyidangkan siap diperiksa.

Banyak yang terkejut dengan putusan bebasnya Neloe. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu bersama I Wayan Pugeg, mantan Direktur Risk Management, dan M. Sholeh Tasripan, mantan EVP Coordinator Corporate & Government boleh berlega hati atas 'kebaikan hati' majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Gatot Suhartono.

Kasus bebasnya Neloe memang mendapat perhatian berbagai media massa, khususnya surat kabar. Mereka memajang foto Neloe yang tengah tertawa bungah besar-besar di halaman depan, berikut judul *headline* yang rata-rata bunyinya seragam: Divonis bebas.

Dalam kasus pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara sebesar Rp 160 miliar itu, menurut hakim, ketiganya tidak terbukti merugikan negara. Seusai pembacaan putusan, demikian laporan *Suara Pembaruan,* 20 Februari 2006, Neloe tampak terharu. Tadinya, ia dan dua rekannya masing-masing dituntut 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Penasehat hukum para terdakwa, OC Kaligis, menyatakan bahwa sejak awal perkara itu tidak layak disidangkan karena dalam persidangan terungkap bukti-bukti tidak ada kerugian negara. Sejumlah saksi ahli di persidangan juga menyebutkan, kredit PT CGN tidak merugikan negara karena jatuh tempo kredit tersebut pada September 2007.

Sementara itu, *Kompas*, 21 Februari 2006, mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bernada prihatin atas kontroversi putusan bebas Neloe dan kawan-kawan. Presiden menginginkan transparansi dalam kasus ini. "Ini harus dibuka selengkapnya, mengapa, ada apa," ujarnya. Pokoknya publik harus tahu apa yang terjadi pada Neloe.

Harian"*Kompas* pada edisi yang sama juga menurunkan berita bahwa Komisi Yudisial (KY) akan meminta sekaligus mempelajari putusan majelis hakim yang bersangkutan. Majelis hakim tersebut adalah Gatot Suharnoto, I Ketut Manika dan Machmud Rachmini.

Sementara dari kalangan DPR, kritik atas putusan ini datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara Fraksi PDI-P mengakui putusan tersebut kontroversial, namun keputusan pengadilan tetap harus dihargai.

E.C.W NELOE

Siap Diperiksa

Sementara itu, *Republika*, 22 Februari 2006, menurunkan *headline* "Hakim Kasus Neloe Siap Diperiksa." Menurut laporan harian itu, ketiga hakim kasus Neloe dkk siap diperiksa Komisi Yudisial sepanjang masih dalam koridor kewenangan institusi tersebut. Ketua PN Jakarta Selatan Andi Samsan Nganro juga mempersilahkan KY memeriksa ketiga hakim tersebut.

Salah satu yang kecewa berat dengan bebasnya Neloe adalah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sampai tak habis pikir. "Saya kecewa berat dan benar-benar terkesima," ujarnya, seperti dikutip *Tempo*, 4 Maret 2006.

Arman, demikian ia biasa disapa, semakin terkesima ketika tiga hari setelah bebasnya Neloe, majelis hakim PN Jakarta Selatan juga membebaskan tiga direksi dan komisaris PT Cipta Graha Nusantara. Lagi-lagi dengan alasan yang sama. Meski sempat muncul *dissenting opinion*, ketiganya dinyatakan tidak terbukti merugikan negara. Arman pun langsung memerintahkan anak buahnya mengajukan kasasi.

Pihak KY sendiri tampaknya akan bersikap netral. Beberapa aspek akan dipelajari KY terkait kasus tersebut. Menurut Soekotjo Soeparto, anggota KY, apabila KY tidak menemukan penyimpangan, KY tidak akan melakukan pemanggilan atas mereka.■ RH

FAKTA BEBASNYA NELOE

⇒ Majelis hakim terdiri dari Gatot Suhartono (ketua), I Ketut Manika dan Machmud Rachmini (anggota).

⇒ Jaksa Penuntut Umum Baringin Sianturi menuntut Neloe dkk masing-masing 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

⇒ Putusan majelis: unsur kerugian negara tak terbukti, dakwaan jaksa tak terbukti, majelis perintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta dikembalikan harkat dan martabatnya.

SYAF DI BALIK JERUJI

Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu akhirnya ditahan. Ia menolak menandatangani berita acara penahanan.

SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG

Syafruddin Arsyad Temenggung duduk termenung di balik jeruji mobil tahanan seusai pemeriksaan dirinya di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kelelahan tampak di wajahnya. Minggu terakhir Februari, media massa nasional memasang berita penahanan dirinya pada 22 Februari lalu di halaman depan.

"Syafruddin Ditahan, Tolak Teken BAP" demikian judul laporan harian *Bisnis Indonesia*, 23 Februari 2006. Sementara *Republika* pada hari edar yang sama menurunkan *headline* "Syafruddin Temenggung Ditahan." Kompas juga menurunkan judul yang sama dengan *Republika*.

Semua media itu melaporkan bahwa Syaf, demikian Syafruddin biasa disapa, menolak meneken berita acara penahanan (BAP) yang disodorkan jaksa penyidik. Penolakan itu dilakukan tersangka seusai pemeriksaan maraton sejak pukul 09.30 sampai 21.30 WIB.

Syaf beralasan, dirinya tidak akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan mempersulit pemeriksaan.

Tetapi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Rusdi Taher punya alasan sendiri kenapa pihaknya merasa perlu menahan Syaf. Kejati DKI sudah berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan keputusan penahanan itu untuk memudahkan proses penyidikan.

Kompas mengutip pernyataan Amir Syamsuddin, koordinator kuasa hukum Syaf. Amir menggugat mengapa Kejaksaan tidak bertanya pada orang-orang yang mengerti soal penjualan aset BPPN, misalnya anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan. "Kenapa tidak ada kesempatan untuk mendengarkan mereka sebelum melakukan langkah-langkah terlalu jauh seperti ini," sesalnya.

Syaf ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI pada 3 Februari 2006. Ia diduga melakukan korupsi dalam penjualan Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo senilai Rp 600 miliar, yang hanya dijual Rp 95 miliar pada 2003.

Saat ini, ia mendekam di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan atas penahanan itu.■ RH

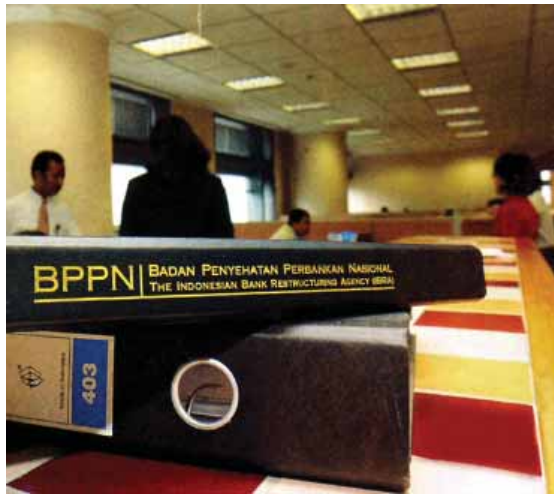

PENILAIAN HARGA PASAR PT PGR III 2003

- ⇒ 5 Mei: KAP Ilya Avianti & Rekan dengan hasil 80% atau 90% *hair cut*.
- ⇒ 9 Mei: Heburinas Nusantara (konsultan) dengan hasil modal negatif.
- ⇒ 2 Juli: Danareksa dengan hasil 11%-18% dari nilai buku.

Antara Kejakgung dan Kejati

Komisi III DPR mempertanyakan masalah pengusutan kasus dugaan korupsi maupun penanganan perkara yang berbobot nasional seperti pemeriksaan dugaan korupsi dalam penjualan Pabrik Gula Rajawali III (PGR III) Gorontalo oleh BPPN yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mestinya oleh Kejaksaan Agung.

Kesan yang timbul adalah penanganan kasus PGR III itu dipaksakan secara hukum. Pasalnya, kejadian perkara PGR III di Gorontalo bukan Jakarta.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, (20/2). Demikian dilaporkan *Republika*, 22 Februari 2006.

Namun Kejaksaan Agung belum akan mengambil alih penanganan kasus PGR III dan tetap mempercayakan pada Kejati DKI. Menurut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, penanganan kasus itu sudah benar. Kejaksaan Agung akan tetap melakukan pemantauan terhadap penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Pihaknya akan mempelajari dulu perlu tidaknya kasus itu ditarik ke Kejaksaan Agung. ■ RH

AWAM NAMUN PENUH GAGASAN

Karir Syaf bisa dibilang terdongkrak ketika ia diangkat sebagai Ketua BPPN, menggantikan Ary Suta pada 19 April 2002. Padahal, ia tak memiliki latar belakang pendidikan *finance*, bahkan tak punya pengalaman memimpin perusahaan besar.

Menurut *Republika*, pengangkatannya memunculkan isu ITB Connection, karena Syaf dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi sama-sama alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Syaf yang asli Palembang itu adalah insinyur planologi ITB, sedangkan Laks saat itu menjabat ketua alumni ITB.

Mengacuhkan isu, Syaf maju terus. Yang ada dipikirannya adalah menjadikan BPPN sebagai *agent of recovery*. Ia lantas melakukan pembenahan internal badan tersebut. Ia juga memangkas beberapa kewenangan Ketua BPPN.

Seperti diakui beberapa bankir yang mengenalnya, Syaf adalah seorang birokrat yang efisien. Ia manajer yang piawai dan tak pernah menghambat urusan orang lain.■ RH

Posisi Tawar Riau MENARIK INVESTOR

Potensi sumber daya alam Riau sangat menjanjikan. Para investor tinggal memilih, di kabupaten/kota atau provinsi. Kuncinya, iklim usaha yang kondusif.

Pertumbuhan ekonomi secara makro (nasional) yang berkisar 5,6% tahun lalu (2005) sempat mengundang kekuatiran di kalangan dunia usaha. Yakni bagaimana dengan prospek di tahun 2006 ? Namun bagi pelaku bisnis di daerah Riau, khususnya kalangan dunia usaha, tetap melihat secara optimis. Pasalnya, pertumbuhan secara mikro di Riau mencapai 6,1% (2005). Lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,

Optimisme kalangan dunia usaha terhadap prospek ekonomi tahun 2006 ini diungkapkan H.Arsyadjulianti Rachman, Ketua Kadinda Riau. Menurutnya, banyak faktor dan indikator yang membuatnya optimis melihat kondisi yang ada. Kekuatan Riau, sejauh ini masih mengandalkan potensi sumber daya alam yang ada maupun yang masih belum tergali secara optimal. Riau memilliki potensi berbasis alam, seperti; pertambangan, minyak (energi), perkebunan, kehutanan, kelautan, HTI dan pabrik pulp paper.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin baik dibanding tahun lalu. "Tapi perlu diingat, Riau tahun ini (2006) memiliki hajat besar, yaitu pemilihan kepala daerah di 6 kabupaten dan walikota Pekanbaru. Kami berharap pemilihan kepala daerah tingkat II itu berlangsung aman dan lancar",'kata H.Arsyadjulianti kepada **Samsuri** dari *Berita Indonesia.*

"Bila pemilihan pejabat daerah tidak berlangsung seperti yang diharapkan, saya kuatir akan memiliki implikasi terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan di Riau dan kurang kondusif bagi dunia usaha, semoga ini tidak terjadi," tuturnya.

Bagi dunia usaha percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur semakin diperlukan. Prasarana jalan yang memadai, baik antar desa maupun desa ke kota dan sebaliknya sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, mengingat tempat produksi ada di basis–basis itu. Diakuinya sudah banyak yang dilakukan Pemda dalam membangun infrastruktur, termasuk prasarana jalan yang membutuhkan dana dan juga waktu.

INVESTASI: Beragam pilihan.

Menuju Visi Riau 2020

Arsyadjulianti optimis dengan pencanangan Gubernur Riau : "Melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan infrastruktur adalah tekad kita bersama menuju Visi Riau 2020". Kebijakan Gubernur ini diyakininya akan mampu menciptakan kondisi perekonomian Riau yang semakin baik.

Menurutnya, Pemda telah menunjukkan keperpihakan kebijakannya yang pro kepada dunia usaha. "Ini sangat baik bagi Kadin dan pelaku ekonomi lainnya, baik sektor formal maupun informal", ujarnya. Kemitraan yang selama ini terbangun dengan baik, diharapkan di masa datang lebih meningkat lagi.

Gubernur Rusli Zainal memiliki *background* dari dunia usaha. Karenanya, kebijakan Pemda terhadap pentingnya investasi mendapat perhatian khusus. Diantaranya, pelayanan satu atap untuk mempercepat proses pelayanan kepada para masyarakat. Ini di antara bukti kebijakan Pemda menempatkan pelaku usaha sebagai motor penggerak ekonomi.

IMT-GT

Sebagai daerah yang posisi geografinya dekat dengan semenanjung, Riau menjadi bagian dari kerjasama IMT - GT (Indonesia, Malaysia dan Thailand Growth Triangle) dan sebagai *Indonesia Business Council*. Kerja sama itu meliputi bidang pariwisata, perdagangan, perikanan, pertanian, perbankan dan teknologi.

"Adanya kerja sama itu diharapkan memberi manfaat bagi Riau dan provinsi lain, seperti di bidang infrastruktur meliputi, operasional kapal Roro, Dumai-Malaka. Sementara untuk perhubungan udara dibuka jalur Pekanbaru - Malaka, Pekanbaru- Kuala Lumpur," tuturnya.

Begitu banyak potensi yang dimiliki Riau merupakan peluang bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Riau terbuka bagi investor, baik di kabupaten dan kota maupun provinsi.

Kerja sama IMT-GT memberi peluang yang cukup signifikan bagi Riau. Posisi Riau yang terdepan dalam kerja sama ini, memberi perkuatan terhadap Visi 2020 Riau, baik posisi regional dan sub regional.

"Sesuai UU No.1/87, Kadin sebagai wadah dunia usaha, punya kewajiban memajukan Riau, maka saya lebih banyak bicara dan sebagai PR *(public relation)* Riau, di setiap kesempatan di dalam atau di luar negeri mempromosikan Riau," katanya.

Sebagai daerah tujuan investasi, Riau telah mempunyai peta investasi di mana calon investor mengetahui, apa yang mereka mau ada di Riau. ■ SM

Beras 4 Kg Menyambung Hidup

BELAWAN - Bagaikan kehausan mendapat seteguk air. Demikian kira-kira yang dirasakan sekitar 4.890 Kepala Keluarga (KK) nelayan di Jalan Mujabir, Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Mereka masing-masing mendapatkan bantuan beras 4 kg yang diberikan secara simbolis oleh Walikota Medan Drs. H. Abdillah, Ak, MBA. Keseluruhan beras yang dibagikan berjumlah 21 ton.

"Beras 4 kg ini sangat kami butuhkan, karena sudah seminggu kami tidak melaut," begitu pengakuan Ismail (45) warga setempat seperti diberitakan Harian *Waspada* (23/2).

Walikota menyampaikan bantuan ini sebagai wujud kepedulian meringankan beban hidup para nelayan. Diingatkannya, bantuan ini jangan diselewengkan.

Masyarakat nelayan, khususnya yang kurang mampu, sangat merasakan bantuan beras ini. Begitu usai acara resmi penyerahan bantuan ini, masyarakat langsung menyerbu posko untuk mengambil jatah beras yang telah disediakan.

Mereka mengambil jatah sesuai dengan kupon yang dimiliki.

Imran seorang warga setempat yang memiliki 8 anak merasakan, 4 kg beras itu nilainya bagaikan 1 ton beras, karena dapat membantu kehidupan keluarganya untuk meyambung hidupnya. Hal senada juga diutarakan Iwan (36). Dia merasa terharu atas bantuan yang diperoleh dan berharap bantuan ini dapat terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena para nelayan kecil merasa pesimis atas keberadaan kapal-kapal besar yang sering menyisir menangkap ikan di wilayah mereka. Akibatnya ikan yang mereka peroleh berkurang dari sebelumnya. "Dalam satu hari melaut uang yang kami bawa untuk anak istri paling banyak Rp 20 ribu, karena ikan sudah tidak ada lagi," papar Iwan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Medan sebenarnya telah mengatur zona penangkapan kapal besar dengan nelayan kecil. Namun, kapal besar ini kerap kali melanggar zona yang telah ditetapkan.

Unggas Dilarang Masuk Pulau Dewata

DENPASAR - Kasus flu burung semakin meluas, termasuk di Provinsi Bali. Untuk mengantisipasi itu, di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pihak karantina melakukan upaya pemeriksaan yang melibatkan KP3 dan ASDP untuk mencegah masuknya unggas ke Pulau Dewata.

"Sejak Januari hingga Februari ini kami sudah memulangkan 3.495 itik, 952 ayam, 108 mentok dan 8 merpati. Kami tidak mau kecolongan kalau sampai ada unggas luar yang masuk Bali," kata drh I Nyoman Budiarta kepada harian *Bali Post* (23/2). Pelarangan masuknya unggas ke wilayah Bali, didasarkan pada surat edaran dari Disnak Bali No 524.3/5564/K, tentang pelarangan pemasukan dan transit ternak unggas dan babi dari luar Pulau Bali. Surat itu juga diperkuat dengan peraturan Gubernur yang menjadi acuan bagi mereka untuk melarang masuknya unggas ke Bali.

Kendati begitu, masih ada yang nekat memasok unggas ke Bali. Biasanya melalui Pantai Pabuahan, Negara. Kejadian ini pernah terjadi sekitar bulan September 2005 lalu, yang digagalkan Polsek Negara dengan barang bukti 500 ekor bebek yang dibawa dengan empat buah sampan.

Adanya isu tentang lolosnya pengiriman unggas ke Bali melalui jalur darat, Budiarta menegaskan, hal itu hanya isu yang dibuat dalam persaingan bisnis. Karena semua kendaraan yang memasuki wilayah Bali diperiksa oleh pihak berwajib.

Maspion Kabulkan Tuntutan Buruh

SURABAYA – Setelah hampir sepekan digoyang demonstrasi oleh ribuan buruhnya, Maspion Group akhirnya bersedia memenuhi tuntutan buruh, yakni membayar upah sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) revisi yang besarnya Rp 685.500.

Harian *Surya* (27/2) memberitakan, kesediaan itu disampaikan secara tertulis dalam pertemuan informal antara Presdir Alim Markus dan Direktur SDM Andy Chandra dengan pejabat Pemprov dan kalangan DPRD Jatim di Surabaya, Minggu (26/2).

Semula pihak Maspion bersikukuh dengan besaran UMK Rp 655.500,- sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Jatim sebelumnya. Alasannya, belum bisa menerapkan upah sesuai SK Gubernur tentang UMK revisi karena SK itu masih digugat keabsahannya di PTUN Surabaya. Penggugatnya adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim yang ketuanya Alim Markus.■ AM

Pemerintah Hamas di Ujung Tanduk

Kemenangan di dalam pemilihan umum agaknya bukan segalanya bagi Hamas. Rintangan yang dialaminya lantaran sikap kerasnya terhadap Israel dan Amerika di masa lalu.

Boikot anggaran dari Israel dan bantuan dana dari AS menghantui pemerintahan PM Ismail Hinaya yang baru saja terpilih. Padahal Hinaya dikenal sebagai salah seorang pemimpin Hamas yang sangat moderat.

Kabinet Israel, menurut laporan sejumlah kantor berita Barat (Reuters, AP dan AFP), tak lama setelah pembentukan pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh tokoh Hamas, membekukan transfer dana bulanan sekitar 50 juta dolar AS. Dana tersebut dikumpulkan oleh Israel dari pajak warga Palestina, dan digunakan setiap bulan untuk membayar gaji 140.000 pekerja.

Pemerintah AS juga menghentikan bantuan kepada Otoritas Palestina. Dana tersebut, sebagian besar masih tersimpan di bank, dimaksudkan untuk membangkitkan ekonomi Paslestina. Belakangan pemerintahan George Bush meminta dana itu dikembalikan. AS juga membekukan aset milik Kind Hearts (LSM) yang selama ini berhubungan dengan Hamas.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas membenarkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Hamas menghadapi krisis keuangan yang cukup serius. Ini akibat isolasi ekonomi Israel dan tekanan dari Amerika. "Kami harap dapat mengatasi krisis tersebut dari bulan ke bulan," kata Abbas sebelum bertemu para pemimpin Hamas di Jalur Gaza. Abbas adalah presiden dari kelompok Fatah yang kalah dalam Pemilu lalu.

Posisi Hamas benar-benar terjepit dari berbagai sudut; politik, ekonomi, dan kekuatan militer. Keluhan yang datang dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Ivanov bahwa pasokan senjata untuk Palestina dilakukan melalui wilayah Israel, karena itu harus mendapat persetujuan dari pemerintahan Yahudi. Pejabat Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengancam mengenakan sanksi ekonomi bilamana parlemen Palestina dikuasai oleh Hamas.

Kelompok yang selalu dicap "militan" oleh pers Barat, tetapi""pejuang" oleh rakyat Palestina, secara resmi telah mengambil-alih kekuasaan di parlemen Palestina. Kelompok itu juga menolak imbauan Abbas tentang pentingnya mencapai perdamaian dengan Israel. Ke

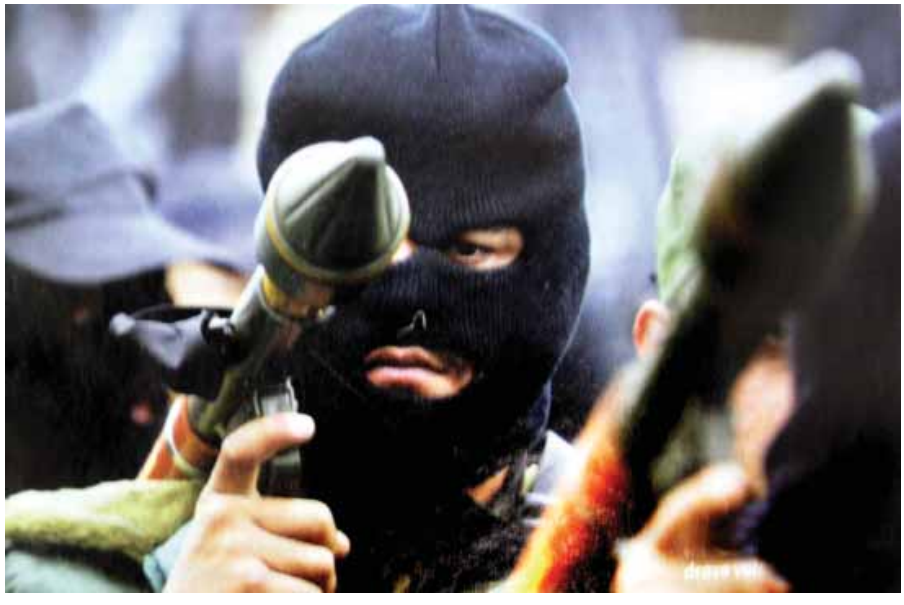

depan, parlemen yang didominasi Hamas akan sering bentrok dengan ide dan kebijakan Presiden Abbas, kecuali dia mau menuruti kemauan Hamas untuk mengakui Israel.

Penggulingan

Israel dan AS diisukan tengah menyusun skenario untuk menggulingkan pemerintahan Hamas. Skenario ini dibocorkan oleh sejumlah pejabat Israel dan diplomat Barat yang tidak mau disebut namanya. Bocoran ini diberitakan oleh sebuah suratkabar AS, *The New York Times* (14/2). Menurut harian tersebut, rencana penggulingan Hamas dibahas di level tertinggi pejabat Deplu AS dan Israel. Kedua negara menghendaki para pejabat Hamas gagal menjalankan roda pemerintahan dan jatuh dalam beberapa bulan mendatang.

Skenario dilaksanakan dengan mengisolasi otoritas Palestina secara ekonomi. AS dan Israel akan memotong akses keuangan dan jalur internasional Palestina. AS mengharapkan langkahnya didukung oleh negara-negara Uni Eropa.

Bereaksi melawan skenario tersebut, jubir Hamas Farhat Asaad mengatakan siapa pun yang mencoba mengisolasi Hamas, maka dia akan diisolasi oleh kawasan ini. Hamas akan bergerak dalam dua sektor paralel; mereformasi politik dan mendobrak isolasi terhadap pemerintahan Palestina. Anggota parlemen dari Hamas, Nasser Abdaijawad, kelompoknya akan mencari uang dari dunia Islam dan mengakhiri ketergantungan pada Israel.

Namun Israel dan AS menyangkal telah membahas skenario untuk menggulingkan pemerintahan Hamas di Palestina. Bantahan itu disampaikan jubir Deplu AS Sean McCormack dan Dubes Israel untuk Washington Daniel Ayalon. Mereka agaknya membantah laporan *The New York Times.*

"Tidak rencana dan konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah Palestina," kata Ayalon kepada *AP.* Dia menambahkan juga tidak ada diskusi dengan AS untuk membahas skenario yang dituduhkan.

Sebuah isyarat datang dari Khaled Meshal yang mengindikasikan pengakhiran perlawanan bersenjata Hamas asalkan Israel menarik diri dari seluruh wilayah Palestina. Hamas juga menegaskan kesediaannya berdialog dengan siapa pun, termasuk AS, asalkan Israel mengakui dan menarik diri dari Palestina.■ SH

RI-RUSIA MAKIN ERAT

Pertemuan ke-14 Forum Kerja Sama Parlemen Asia Pasifik (*Asian Pasific Parlementary Forum* (APPF), di Jakarta, Januari 2006, merekomendasikan agar kerja sama kawasan ditata dan dikelola dengan lebih baik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka acara, mengajak para pimpinan parlemen mewujudkan tata kelola kerja sama tersebut. Ketua DPR-RI, H.R. Agung Laksono, juga menyoroti kemungkinan kerja sama secara bilateral di antara parlemen Asia Pasifik dalam memerangi korupsi. Forum Kerjasama Parlemen Asia Pasifik ke-15 tahun depan akan diselenggarakan di Rusia.

Sejauh mana hubungan parlemen antara Indonesia dan Rusia, wartawan *Berita Indonesia*, **M. Subhan, Haposan Tampubolon** dan fotografer **Wilson Edward** mewawancarai Ketua Delegasi Parlemen Federasi Rusia, **Dmitry Mezentsev,** yang didampingi Duta Besar Rusia untuk RI **Mikhael M. Belly,** tentang gambaran kerja sama Indonesia-Rusia. Berikut petikannya.

Apa saja yang dibicarakan pada forum kali ini?

Yang dibicarakan terutama masalah global dan regional, seperti bagaimana memperkokoh perdamaian dan keamanan, mendorong liberalisasi perdagangan internasional dan investasi, mengentaskan kemiskinan, memberantas terorisme dan kejahatan transnasional, menanggulangi bencana alam, serta mencegah penyebarluasan penyakit pandemik terutama flu burung.

Secara regional bagaimana Anda melihat prospek kerja sama di antara parlemen negara-negara se-Asia Pasifik?

Forum ini mendorong kerja sama multilateral negara-negara kawasan Asia Pasifik. Kalau parlemen negara kawasan ini tidak bermalas-malasan maka tidak ada satupun halangan politik atau perbedaan pengertian.

Pertukaran pengalaman dapat dipraktekkan masing-masing parlemen di setiap pertemuan, terutama menyangkut isu perdagangan regional. Hal itu penting untuk menyiapkan RUU baru.

Menurut Anda, apakah peran parlemen dalam membantu pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks?

Jangan lupa, parlemen selalu tertinggal dari pemerintah, jika dibanding pengaruhnya. Ini ditentukan oleh Undang-Undang Dasar serta didasarkan misi fungsional parlemen.

Tantangannya juga di negara lain, adalah sistem penyediaan energi yang tidak seimbang khususnya di Asia Pasifik. Kami delegasi Rusia telah mengajukan usul konkrit bagaimana menyempurnakan sistem penyediaan bahan bakar energi ini, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks hubungan parlemen Rusia-Indonesia, apa manfaat yang bisa diambil dua negara?

Saya dan Ketua Dewan Federasi Rusia Sergey Mironov sudah mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono serta delegasi parlemen Indonesia. Pertemuan itu melahirkan sejumlah rencana kerjasama antara parlemen kedua negara. Misalnya, program peningkatan pertukaran komoditas perdagangan kedua negara.

Menurut saya, neraca perdagangan kedua negara masih rendah. Ini, memang bukan perkerjaan parlemen melainkan pemerintah. Saya wakil dari wilayah Siberia Timur paham, dalam waktu dekat mungkin sudah bisa diatur kerja sama ekonomi, kehutanan, energi dan pertambangan bahan mentah sampai proses produksi antara dua negara.

Kami juga mengundang delegasi Indonesia agar hadir di Forum Ekonomi Baikal ke-4, pada 20-22 September 2006 mendatang di Irkutsk, dekat Danau Baikal, yang cukup terkenal. Saya harap delegasi Indonesia bisa mengikuti semua diskusi tersebut.

Indonesia-Rusia telah menjalin hubungan bilateral yang harmonis. Apakah kerja sama militer merupakan prioritas utama?

Sebenarnya jawaban ini pada pertemuan tingkat tinggi antara Ketua Dewan Federasi Rusia Sergey Mironov, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita.

Ketulusan hati, kejujuran dan keterusterangan telah diperlihatkan delegasi Rusia. Kunjungan ini memberi dorongan saling pengertian dalam membina persahabatan di antara puluhan bahkan ratusan ribu orang di kedua negara.

Kesediaan pembuat pesawat Sukhoi melalui agennya Rosoboroneksport, untuk masuk ke pasar persenjataan Indonesia, menurut saya tujuannya jelas. Saya ingin menegaskan, kami di Rusia menghormati langkah Indonesia untuk menegakkan kewibawaannya dan menstabilkan perekonomian, sehingga memiliki pengaruh di kawasan Asia Pasifik.

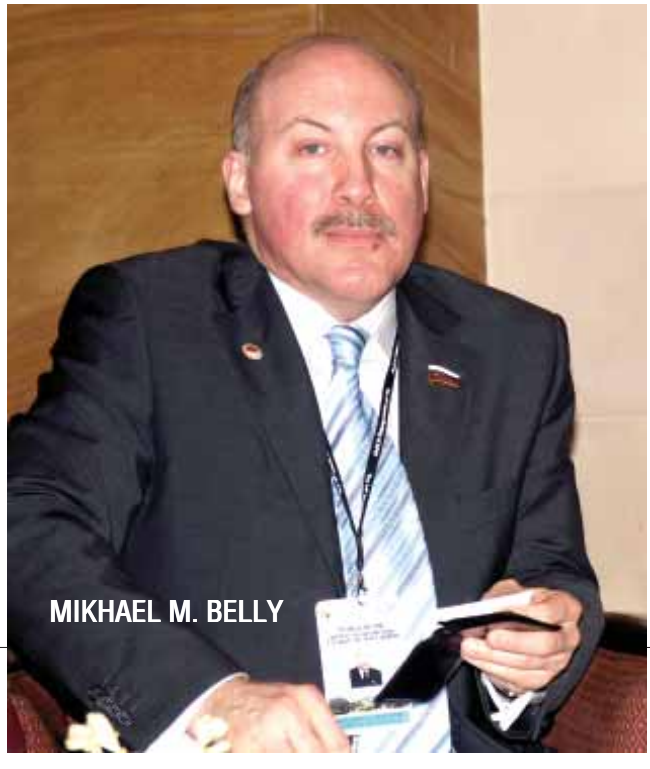

MIKHAEL M. BELLY

Tahun depan Rusia jadi tuan rumah forum APPF. Apa agenda pembahasan utama?

Masih susah menduga apalagi mengumumkannya. Tentu, kami akan meminta nasihat dari Ketua Forum saat ini, Agung Laksono, sebagai pemberi tongkat estafet. Masalah keamanan penyediaan energi dan transportasi kawasan masih menjadi tantangan utama. Kami tidak akan melupakan kepribadian dan identitas masing-masing bangsa di Kawasan ini. Kita semua harus bertindak ke arah yang bermanfaat, saling memperkaya, bukan saling menyusupi budaya. Kita juga harus membantu kunjungan pariwisata untuk mempererat hubungan Rusia dan Indonesia. ■ HT, Sb

UDANG INDONESIA TERANCAM SUSPENSI

Asal-usul ekspor udang Indonesia ke AS disinyalir berasal dari China, hasil penadahan ilegal *(transhipment)* di tengah laut khususnya ekspor tahun 2004.

Berdasarkan surat Kedubes AS di Jakarta, 7 Februari 2006, AS mengancam akan menerapkan suspensi (penghentian sementara) ekspor semua udang dari Indonesia. Ragu atas keakuratan dan validitas informasi yang terdapat dalam dokumen ekspor DS 2031 dari sejumlah perusahaan perikanan Indonesia.

Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menko Perekonomian, Edyputra Irawadi menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi kepada Pemerintah AS agar kasus ini tidak melebar kemana-mana.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi bertindak cepat merespon ancaman ini. Ia membentuk tim negosiator untuk melakukan pembahasan bilateral dengan Kedubes AS di Jakarta, pada pekan pertama Maret 2006, yang dilanjutkan keberangkatan ke Washington DC, AS 8-12 Maret untuk berunding dengan Pemerintah sana. Salah seorang anggota tim negosiator adalah Prof. Dr. Hasyim Djalal, mantan diplomat dan pakar hukum laut.

"Kepada Pemerintah AS kami akan melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan secara detail tentang kondisi udang di Indonesia. Kami berharap terjadi saling pengertian dalam pertemuan itu, dan tercipta kerja sama perdagangan yang menguntungkan kedua negara dalam komoditas udang," ujar Freddy, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta Senin (27/2).

Modus

Ancaman suspensi oleh AS menjadi sorotan media massa minggu terakhir Februari, khususnya oleh *Kompas* dan *Bisnis Indonesia*.

Dokumen DS-2031 yang diberlakukan sejak tahun 2005 memuat pernyataan dari eksportir tentang asal-usul udang. Keabsahan dokumen harus disahkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Berdasarkan data yang dihimpun *Kompas*, dokumen yang diperiksa menyebutkan udang berasal dari Indonesia. Keakuratan data inilah yang diragukan sebab disinyalir ada udang dari negara lain yang masuk ke AS melalui Indonesia. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan (P2HP), DKP, Martani Huseini menyebutkan terdapat tujuh perusahaan melakukan praktek pelanggaran seperti yang dituduhkan AS ini.

Freddy menjelaskan, modusnya adalah pengusaha Indonesia mengimpor udang dari China, begitu barang tiba di Singapura pengepakannya langsung diganti, lalu dieskpor lagi ke AS, dan dalam dokumen ekspor diklaim diproduksi di Indonesia.

Labelisasi negara Indonesia ini digunakan untuk menghindari kebijakan antidumping yang, sejak 1 Januari 2004 lalu dikenakan AS terhadap Thailand, China, Vietnam, India, Brazil dan Ekuador.

Direktur Standarisasi dan Akreditasi, DKP, Setia Mangunsong kepada Majalah *BERITA INDONESIA* mengatakan Indonesia harus fokus memberikan jawaban atas tiga pertanyaan yang diajukan AS dalam suratnya.

Fokus *pertama*, menjelaskan mekanisme pengisian form DS 2031 yang sudah berjalan dengan baik selama ini oleh DKP, yang sudah didasarkan atas konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Regulation US-FDA. Regulasi ini berisi tentang Ketentuan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Ketentuan ini mengharuskan setiap perusahaan yang melakukan ekspor ke AS wajib menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan berdasarkan HACCP.

Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan AS yang berlaku sejak Desember 1997 itu ke dalam SK Mentan No. 41/1998, yang sudah diperbaharui lagi dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.01/MEN/2002 tentang Sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan, serta SK Dirjen Perikanan No. 14128 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.

Fokus k*edua,* menjelaskan bahwa semua petugas penandatangan yang melakukan verifikasi sudah teregister semua. Nama-nama serta contoh tandatangan mereka bisa disampaikan ke Pemerintah AS. Dan fokus *ketiga,* perlu dijelaskan telah terjadi perubahan organisasi di lingkungan DKP.

Setia Mangunsong, yang menurut situs internet TokohIndonesia.com dikenal sebagai tokoh perancang manajemen mutu hasil perikanan, menegaskan, DKP perlu menunjukkan keseriusan sikap dengan mengambil tindakan konkrit terhadap perusahaan yang sudah diragukan keakuratan dan validitas datanya dalam dokumen ekspor DS 2031.

Ketua Komisi Udang Indonesia, Johan Suryadarma berkelit pelaku usaha tidak bisa disalahkan terkait ancaman suspensi ekspor udang ini. Sebab, saat itu Pemerintah RI memang tidak membuat larangan impor udang dari China atau negara lain.

Batasan ketentuannya hanyalah, udang dari luar negeri tak boleh masuk ke pasar lokal, udang impor harus diolah terlebih dahulu menjadi barang jadi atau setengah jadi sebelum diekspor ulang. Barulah pada 28 Desember 2004 Pemerintah menerbitkan ketentuan penghentian impor udang. ■ HT

SUCIWATI MUNIR DAN HERA POLLYCARPUS

DUA PEREMPUAN
Mencari Keadilan BAGI SUAMINYA

Suciwati belum puas, karena dalang pembunuh suaminya belum terungkap. Sementara Hera, istri Pollycarpus yakin suaminya hanya sebagai korban konspirasi politik. Kini, keduanya tengah mencari keadilan.

Suciwati ketika di DPR, dengan Zaenal Ma'arif.

Terkait kasus pembunuhan Munir, kendati terdakwa Pollycarpus Budihari Prianto telah di vonis 14 tahun penjara, Suciwati, istri Munir mengaku belum puas. Beberapa waktu lalu *Harian Indopos* memberitakan, Suciwati mendatangi gedung DPR untuk meminta DPR proaktif dalam mendorong pengungkapan kasus kematian Munir yang hingga kini masih diliputi banyak tanda tanya.

Suciwati kala itu sempat bertemu dengan Wakil ketua DPR, Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif. Suciwati meminta agar DPR tidak menghentikan dan menghapus tim DPR untuk kasus Munir. Menanggapi desakan itu Muhaimin berjanji akan segera menindaklanjutinya. Politisi dari FKB ini berjanji akan segera mengirim surat ke pimpinan tim kasus Munir di DPR dan pimpinan komisi agar mengefektifkan pengawasan terhadap masalah itu.

Sebaliknya, istri terdakwa Pollycarpus, Ny. Yosepha Hera Iswandari juga mendatangi gedung DPR untuk curhat. "Saya ingin menyampaikan unek-unek dan aspirasi saya," katanya seperti dikutip *Harian Rakyat Merdeka*. Kedatangan Ny. Hera ke DPR ditemui oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon. Selain Effendi Hera juga bertemu dengan Permadi dan Theo L. Sambuaga dan Ali Mochtar Ngabalin dari Komisi I. "Saya meminta dukungan moral beliau-beliau," ujarnya.

Selain itu Hera menghimbau dan menyambut gembira langkah DPR yang berjanji akan mengusut tuntas kasus ini, serta mendesak agar menindaklanjuti proses pengungkapan kasus kematian Munir. Hera tetap yakin, meski suaminya sudah divonis pengadilan, kasus pembunuhan Munir sebenarnya belum terungkap. Asumsi ini sama dengan asumsi Suciwati, "Ada dalang di balik Pollycarpus," tegas Suciwati suatu ketika.

Karena itu Hera meminta agar masyarakat termasuk DPR berfikir lebih arif. "Kita luruskan dulu. Jadi, mohon jangan hanya gagah-gagahan menghukum suami saya tanpa fakta dan bukti," pinta Hera.

Upaya yang dilakukan Hera ini mengimbangi langkah Suciwati. Istri Munir itu saat ini tengah berjuang agar kasus suaminya terus diusut. Bahkan Suciwati begitu gigih menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menuntaskan kasus suaminya. Suciwati juga mengungkap berbagai keganjilan dalam penanganan kasus Munir ke dunia Internasional.

Sementara itu Ny. Hera hingga saat ini tetap yakin, suaminya sengaja dikorbankan dalam sebuah konspirasi besar. Dia sudah mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan ketidakadilan yang menimpa suaminya itu. Berbagai cara dan upaya mereka tempuh. Kedua perempuan ini sama-sama gigih mencari keadilan untuk suami mereka. Dapatkah hukum membuktikannya? ■ AD

Hera bertemu dengan Permadi dan Ali Mochtar Ngabalin.

Bulutangkis

Mimpi Buruk Tim Uber

Siapapun mahfum Indonesia adalah jago bulutangkis berjuluk *The Land of Badminton*. Sejumlah pemain kesohor putra dan putri pernah lahir dari sini.

Tapi kali ini Indonesia harus mengalami mimpi buruk gagal melaju ke putaran final Piala Uber, yang akan berlangsung di Sendai dan Tokyo, Jepang akhir April 2006. Indonesia pernah gagal ke putaran final Piala Uber di tahun 1959, saat masih dipandang sebelah mata sebagai pendatang baru di dunia bulutangkis.

Tetapi selama puluhan tahun terakhir rasanya Indonesia sudah nyaman merasakan kepastian sebagai langganan di putaran final Piala Thomas maupun Piala Uber. Imelda Wiguna dkk pernah menjungkirbalikkan keadaan dengan mengalahkan Jepang di final di Istora Senayan, Jakarta secara dramatis. Drama berlanjut dengan kecemerlangan Susi Susanti, Yuliani Sentosa, Mia Audina, Lili Tampi/Finarsih, dan Eliza Nathanael/Zelin Resiana yang melindas Cina di final tahun 1994 dan 1996.

Jadi, malapetakakah kali ini? Mudah-mudahan tidak. Tamparan keras, mungkin *iya,* khususnya kepada Ketua Umum PBSI, Sutiyoso, seorang pemimpin bermental platinum supaya lebih serius memberikan perhatian kepada pemain.

Dalam pertandingan penyisihan grup yang berlangsung di Jaipur, India, Indonesia mengalahkan Iran 5-0 dan Taiwan 3-2, tapi kalah melawan Korea 0-5 dan Malaysia 2-3. Dari grup ini Korea berhasil lolos dengan kemenangan 4-1 disusul Malaysia dengan kemenangan 2-2. Indonesia dengan Malaysia meraih angka kemenangan sama 2-2, tapi secara *head to head* Malaysia unggul setelah menang 3-2 dalam pertandingan hari Kamis (16/2).

ADRIADI FRIDASARI

Zona Asia akhirnya meloloskan empat negara di putaran final nanti yaitu Korea, Taiwan, Singapura dan Hong Kong. Sedangkan untuk Piala Thomas, yang penyisihan grupnya bersamaan dengan Piala Uber, empat negara yang lolos adalah Indonesia, Korea, Malaysia, dan India.

Tabloid olahraga *Bola* (21/2) menyebut kegagalan Tim Piala Uber sebagai akumulasi berbagai kebijakan yang kurang tepat, termasuk sangat minimnya kesempatan untuk bertanding ke luar negeri dalam setahun. Penghematan telah berbuah peristiwa memprihatinkan. Atau, seperti mau menangkap ikan besar dengan jaring kecil.

Susi Susanti berharap setelah kekalahan ini kesempatan bertanding bagi pemain putri dapat diperbanyak. Keberhasilan dan kematangan bertanding menurutnya adalah proses. Susi yang juga pernah kalah di babak kualifikasi, meminta agar pemain jangan malah ditekan, divonis, dan dihukum tidak boleh bertanding.■ Sb/HT

Totti Cidera

Francesco Totti gelandang serang nan elegan dari AS Roma mengalami cidera. Sayang, istrinya Ilary Basi tak bisa berlama-lama merawat sebab wanita cantik ini baru saja menjadi ibu setelah pada 6 November 2005 lalu melahirkan putra pertama mereka, diberi nama Christian.

Keadaan rumah tangga Totti-Ilary baik-baik saja, sesungguhnya. Sehingga, sebagai ibu yang merasakan pernah melahirkan, Ilary lebih memilih merawat bayi mungilnya daripada Totti yang untuk sementara menjadi 'bayi' raksasa sebab dia memang butuh perawatan pula.

Sebelum melahirkan Ilary sudah memutuskan akan mengasuh sendiri anaknya. Jadilah kini, "Dari menyusui, mengganti popok, hingga mencuci baju saya melakukannya sendiri. Sungguh, begitu Fransesco terluka, tugasku semakin bertambah. Saya tidak merasa terbebani, namun Francesco sendiri yang langsung menarik diri," ujar Ilary, seperti dilansir *DetitkSport* Minggu (24/2).

Kepada Vanity Fair Ilary juga berucap, "Dia tampaknya menyadari kondisi cideranya bersaing dengan anaknya. Francesco sementara waktu memilih dirawat bersama ibunya. Keputusan itu terpaksa diambil."

Cidera Totti terjadi Senin (20/2) saat Roma menjamu Empoli. Roma menang 1-0. Tetapi Totti, usai menerima hadangan dari pemain belakang Empoli Richard Vanigli, terjatuh, lalu ditarik keluar lapangan dan langsung diusung ke klinik terdekat. Ia divonis mengalami cidera patah engkel kiri. ■ Sb/HT

Eto'o Betah

Bagi Samuel Eto'o, striker Barcelona Spanyol, uang bukan segalanya. Pemain Terbaik Afrika 2003, 2004, dan 2005 ini tak hirau dengan bujukan 41 juta poundsterling (Rp 656 miliar). Uang sebesar itu ditawarkan oleh juara Liga Primer 2005 Chelsea, untuk menggaetnya ke Stamford Bridge.

Uang dengan angka menggiurkan sesungguhnya bisa mengangkat Eto'o meraih predikat sebagai pemain termahal kedua yang pernah ada di jagat ini, setelah Zinadine Zidane dibeli Real Madrid dari Juventus tahun 2001 lalu seharga 47 juta poundsterling.

Eto'o memastikan uang sebesar apapun tak akan mampu memaksanya meninggalkan Nou Camp, markas Barcelona. Pria kelahiran Nikon, Kamerun 10 Maret 1981 ini berujar, tak sekalipun pernah membayangkan sebuah klub bersedia membayar begitu besar untuk seorang Samuel Eto'o. Ia tak akan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh uang.

Alasan Eto'o emoh pindah rupanya karena ada kedekatan emosional antara Kamerun dan Barcelona. Di negaranya Barcelona sudah mempunyai fans. Bahkan, di sepanjang jalan di kota kelahirannya orang tetap antusias memakai kaus biru merah warna khas klub Barcelona. "Satu-satunya yang mempengaruhi saya adalah kebanggaan saya terhadap diri saya. Bukan uang," kata Eto'o yang, sebetulnya, bila saja mempunyai uang sebanyak yang ditawarkan Chelsea akan mampu membangun seluruh Afrika. ■ Sb/HT

HOTEL DI ANGKASA

Hotel di antara awan bukan hanya angan-angan. Hotel yang dinamakan *The Aeroscraft Flying Luxury Hotel* ini terbang dengan bahan bakar helium, bergerak maju oleh dorongan enam kipas turbo bermesin jet dan bisa mencapai kecepatan hingga 174 mph atau sebanding dengan terbang sepanjang daratan Amerika dalam waktu kurang lebih 18 jam. Dalam 'hotel' ini terdapat ruang beristirahat, restoran bahkan kasino. Prototipe pertama dari pesawat berukuran dua kali lapangan sepakbola dan berkapasitas 250 penumpang ini direncanakan rampung pada 2010.

SEKILAS INFO

Desember 2006, Vista Masuk Toko

Microsoft sempat berjanji akan mengeluarkan Vista pada semester kedua 2006. Namun juru bicara Microsoft, Lou Gellos, mengatakan bahwa perusahaan baru akan menerjunkan Vista ke berbagai toko pada Desember mendatang. Windows Vista adalah generasi penerus dan terbaru dari Windows XP.

User Internet Dunia Tembus 1 M

Menurut data yang diungkap periset Internet World Stats (IWS), per 31 Desember 2005 jumlah pengguna (*user*) internet dunia mencapai 1 miliar lebih. Pengguna internet Asia mencapai 364.270.713 pengguna, Eropa 290.121.957 pengguna, Amerika Utara 225.801.428 pengguna, Amerika Latin/Kepulauan Karibia 79.033.597 pengguna, Afrika 22.737.500 pengguna, Timur Tengah 18.203.500 pengguna, dan Oceania/Australia sebanyak 17.690.762 pengguna. Jadi jika ditotal, pengguna internet dunia kini mencapai 1.018.057.389. Dibandingkan dengan populasi dunia yang sebesar 6.499. 697.060, tampak bahwa internet baru dikenyam oleh 15,7% penduduk dunia.

Situs Denmark diserbu Hacker

Hampir 1.000 situs web Denmark diserang oleh hacker yang memprotes kartun kontroversial yang menghina Nabi Muhammad. Serangan itu dilakukan dengan mengganti *home page* dengan pesan pro-Islam dan mengecam publikasi gambar tersebut. Kelompok pemantau serangan hacker, Zone-H yang dikutip BBC, menyatakan perusakan situs dilakukan secara kelompok maupun individu. Bentuk serangan itu adalah penggantian *home page* dengan pesan-pesan, antara lain kecaman dan peringatan terhadap publikasi surat kabar Jyllands-Posten, pemboikotan produk Denmark, dan sebagian lainnya meminta Denmark bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. ■

Google Sensor Situsnya di China

Perusahaan situs pencari Internet ternama, Google, akhir Januari lalu, menyatakan sepakat dengan pemerintah China untuk mensensor situsnya yang dianggap tidak layak oleh pemerintah. Langkah yang diambil Google adalah mengikuti jejak pesaingnya Microsoft dan Yahoo yang sudah terlebih dahulu mensensor materi sebagai ganti atas aksesnya ke pasar 110 juta pengguna Internet, yang merupakan pasar Internet terbesar kedua di dunia.

Google sekarang memiliki situs baru khusus untuk China yang akan mensensor dirinya agar selaras dengan peraturan yang ditetapkan Beijing. Selama ini, situs Google diblok oleh pemerintah China.

Topik-topik seperti kemerdekaan Taiwan atau pembantaian Lapangan Tiananmen diblok dari Google.cn. Menurut kantor berita BBC, situs mereka tidak dapat diakses dari dalam China, sementara di situs pencari Google.cn pengunjung yang mencari situs tentang gerakan spritual Falun Gong diarahkan ke tulisan-tulisan yang mengutuk gerakan itu.

Pemerintah juga melarang akses ke 20 kategori isi, termasuk pornografi dan materi-materi lain yang dilarang. Penjelajah dunia maya yang mengetikkan kata-kata kunci yang terlarang di mesin pencari di situs baru www.google.cn akan menemukan halaman ini: "Sesuai dengan hukum dan kebijakan lokal, beberapa bagian dari hasil pencarian tidak akan dipaparkan."

Keputusan Google itu dikecam aktivis. "Ironis. Kurang dari seminggu setelah kami mendengar Google siap melawan Pemerintah AS dalam rangka membela pengguna, lalu muncul kabar Google menuruti permintaan pemerintah China untuk meluncurkan situs Google China yang baru," kata Danny Sullivan editor situs Searchenginewatch.com.

Google menyatakan bila perusahaannya menarik diri dari China dampaknya akan lebih buruk. Situs baru dibuat agar dapat meraih akses lebih besar untuk masuk ke pasar Cina yang tumbuh pesat. ■

KAHARINGAN MENANTI PENGAKUAN

Sempat dikategorikan aliran kepercayaan dan belakangan diintegrasikan ke Hindu, umat Kaharingan Kalimantan Tengah menuntut agar terstruktur di Departemen Agama, seperti agama-agama yang diakui oleh negara.

Ruang rapat Komisi VIII DPR yang membidangi masalah keagamaan, Selasa (7/2) lalu, kedatangan rombongan dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurut Ketua Umum MB-AHK, Rangkap I Nau, MM., mereka datang ke Senayan menyampaikan aspirasi warga Kaharingan Kalteng kepada anggota dewan agar Hindu Kaharingan disetujui pemerintah sebagai agama tersendiri.

RITUAL UMAT KAHARINGAN

Dalam pemaparannya di depan anggota dewan, Rangkap mengatakan, di Pulau Kalimantan, Kaharingan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan ribuan tahun sebelum agama-agama lain masuk ke Indonesia.

Dia mencontohkan agama Hindu dari India masuk ke Indonesia sejak Abad ke-4 Masehi. Islam sejak Abad ke-8 Masehi dan Kristen baru masuk pada Abad ke-17 Masehi.

Bukan hanya itu, keberadaan Provinsi Kalteng, Rangkap mengingatkan, tidak

lepas dari perjuangan para tokoh Kaharingan di sana, ditandai oleh berdirinya Serikat Dayak Kaharingan Indonesia sebagai partai politik hasil Kongres I di Tangkehan pada tahun 1950. Pada Kongres II di Bahu-Palawa, peserta mengajukan tuntutan utama agar Kalimantan Tengah terlepas dari Kalimantan Selatan.

Perjuangan membentuk Provinsi Kalteng akhirnya terkabulkan menyusul keluarnya Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak itu, secercah harapan Kaharingan diakui sebagai sebuah agama yang diakui negara seperti agama-agama lainnya mulai mengemuka.

Belakangan, harapan itu pupus seketika tatkala pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (saat itu dijabat Amir Machmud), pada 1979, mengeluarkan aturan tentang pencantuman agama di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aturan itu menggariskan, pada kolom agama di KTP warga negara Indonesia yang bukan pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, diisi dengan tanda strip (-).

Puncak dari semakin mengecilnya peluang Kaharingan menjadi agama terjadi saat penyusunan Repelita III di mana Kaharingan digolongkan ke dalam Aliran Kepercayaan.

Masih kata Rangkap, para penganut Kaharingan meyakini satu filosofi bahwa Kaharingan berasal dari kata "Haring" yang berarti jalan kehidupan.

Dalam ajaran Kaharingan, Ranying Hartalla dianggap sebagai Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa). Mereka juga meyakini, manusia diciptakan oleh Ranying Hartalla. Kitab suci Kaharingan bernama Panaturan.

Umat Hindu Kaharingan di Kalteng, Rangkap mencatat, berjumlah 600.000 jiwa atau menempati urutan kedua setelah umat Islam yang tersebar di tingkat kecamatan sampai pedesaan.

Dalam persembahyangan umat Hindu Kaharingan disebut Basarah dengan selalu menggunakan kitab suci Panaturan dan kidung/lagu *kandayu*.

Selama ini Kaharingan telah berintegrasi dengan Hindu. Namun, fakta di lapangan membuatnya miris hati. Betapa tidak. Pembinaan dan pelayanan dari Departemen Agama ternyata lebih dominan diberikan kepada umat Hindu Dharma yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan kepada umat Hindu Kaharingan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan.

"Kami memerlukan pengakuan dan akuntabilitas dari pemerintah agar dalam pelayanan publik bagi umat Kaharingan dapat berjalan dengan baik seperti agama-agama lainnya. Sejauh ini kami baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Untuk itu, kami mengusulkan agar juga mendapatkan anggaran dari APBN, termasuk dalam pengadaan guru-guru agama Kaharingan dan sarana ibadah," ujarnya kepada *Berita Indonesia* usai bertemu dengan DPR.

Merespons aspirasi umat Kaharingan yang disampaikan Rangkap dan kawan-kawan, sejumlah anggota Komisi VIII DPR berpendapat sebaiknya para anggota Dewan membentuk tim yang akan dikirim ke Kalteng guna mencari masukan lanjut tentang usulan MB-AHK yang berpusat di Palangkaraya tersebut.

Baru sebatas itu? Tampaknya, perjuangan umat Kaharingan memeluk agama tersendiri dan terstruktur yang diakui negara masih panjang. ■ SB

SBY: Pemeluk Konghucu Jangan Ragu

Presiden SBY minta Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia tidak ragu-ragu mencatatkan perkawinan bagi pemeluk agama Konghucu seperti halnya pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu.

"Bagi masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Konghucu saya tegaskan agar jangan ragu-ragu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing," ujar Presiden SBY saat perayaan Tahun Baru Imlek 2557 di Jakarta (4/2).

Memboikot Asap DI IBUKOTA

Larangan merokok di ruang publik telah diberlakukan Pemerintah DKI. Sayangnya, pengelola tempat umum banyak yang belum menyiapkan tempat khusus merokok.

Meski sudah jelas-jelas ada larangan merokok di tempat-tempat umum di Jakarta sejak 4 Februari lalu, di sana-sini masih terlihat orang-orang yang merokok seenaknya. Jika ditegur, mereka beralasan tidak tahu atau belum mendengar adanya aturan itu.

Beberapa media memantau hal itu. *Kompas*, 5 Februari 2006, melaporkan tidak ada pengawasan maupun penegakan hukum yang berarti. Hal itu menunjukkan ketidaksiapan aparatur Pemprov DKI.

Ada tiga kawasan yang dijadikan percontohan yakni Jl. Sudirman, Jl. MH Thamrin, dan Kawasan Monas. Seperti dilaporkan *Media Indonesia*, 4 Februari 2006, untuk mendukung kebijakan itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) DKI akan melakukan pemantauan dan pengawasan lapangan di kawasan larangan merokok, seperti stasiun, mal, tempat kerja, lembaga pendidikan, kesehatan dan angkutan umum. Akan ada Satgas yang bertugas menegur dan menindak pelanggaran. Kasus itu nantinya akan ditangani pihak kepolisian dan jaksa selanjutnya ke pengadilan. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Trantib dan Linmas) menurunkan 1.000 petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melakukan razia.

Sebenarnya, sudah sejak tahun lalu Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara disahkan oleh DPRD DKI. Perda ini antara lain berisi larangan merokok di kawasan umum, seperti pertokoan, mal, perkantoran, sekolah dan ruang publik lainnya. Dipertegas lagi oleh SK Gubernur No. 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Konsekuensinya, pengelola tempat umum harus menyediakan ruangan khusus merokok. Pemerintah Provinsi DKI saat ini memang tengah giat mensosialisasikan aturan tersebut, tetapi dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Sutiyoso beberapa waktu lalu, masih ada pengelola tempat umum seperti mal dan hotel yang belum menyiapkan tempat khusus merokok bagi pengunjungnya.

Selain larangan merokok, Perda No.2 Tahun 2005 juga mengatur soal kewajiban uji emisi untuk kendaraan bermotor roda empat (umum dan pribadi), sedangkan untuk kendaraan roda dua akan dilaksanakan secara bertahap.

Efektivitas

Dilaporkan *Gatra* edisi 14 Januari 2006, bahwa selain kota Jakarta, Bandung dan Surabaya akan menerapkan kebijakan yang sama. Mulai April, Pemkot Bandung akan memberlakukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sementara Pemkot Surabaya sudah memberlakukan kawasan bebas asap rokok di kantor pemerintahan sejak empat bulan yang lalu.

Gubernur DKI Sutiyoso lantas menekankan bahwa Perda yang akan segera diberlakukan itu bukan berarti melarang orang merokok. Yang penting tidak di sembarang tempat. Bahkan, iklan rokok pun tetap diizinkan.

Namun *Gatra* menganggap kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menetapkan kawasan bebas rokok tidak diimbangi *political will* pemerintah pusat. Indonesia hingga saat ini belum juga menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC), sementara batas waktu hingga Desember 2005 telah terlampaui.

Meski FCTC memberikan keuntungan untuk melindungi bangsa dari bahaya kesehatan karena asap rokok, tetapi jika diratifikasi akan menyebabkan banyak pabrik rokok yang tutup lantaran tak bisa memenuhi ketentuan FCTC.

Selain ada aturan tentang kawasan bebas rokok di tempat umum dan kantor, ada juga aturan untuk mencantumkan kandungan tar dan nikotin dalam kemasan rokok. Nah, kebanyakan pabrik rokok di Indonesia tidak memiliki fasilitas canggih untuk itu. Penutupan pabrik rokok akan menyebabkan jumlah pengangguran membengkak.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyambut baik langkah sejumlah pemerintah daerah memberlakukan kawasan bebas rokok itu. Namun untuk memberlakukan secara nasional, ia mengaku harus melihat dulu efektivitasnya. Setidaknya, ia yakin adanya tempat khusus untuk merokok lambat laun menjadikan peraturan larangan merokok akan diterima secara luas.

Menurut Data Depkes, jumlah belanja rokok masyarakat di Indonesia hampir Rp 20 triliun per tahun, sementara jumlah belanja obat hanya Rp 5 triliun setahun. Setelah dikalkulasi, pemerintah justru rugi akibat rokok sebesar Rp 14,5 triliun setahun. ■ RH

JL. MH THAMRIN: Kawasan Percontohan dilarang merokok.

Menyoal Belajar Aktif

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tidak jadi diberlakukan. Ketidaksiapan perangkat dan jam pelajaran yang terlalu padat menjadi salah satu kendala.

Seorang ibu mengeluh. Anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar kelihatan seperti kura-kura dengan ransel berat penuh buku di punggungnya, yang harus disandangnya setiap pagi ke sekolah.

Ia mempertanyakan, harus sebanyak itukah buku yang dibawa anak-anak sekolah di Indonesia setiap hari ke sekolah. Sebagian sekolah memang sudah memiliki loker untuk para siswanya. Tetap saja, jumlah buku pelajaran mereka begitu banyak. Bayangkan beban yang harus dihadapi anak-anak itu dalam mempelajari isi buku-buku itu setiap hari. Sementara jumlah jam pelajaran mereka juga menjadi sangat lama.

Ada sebuah surat pembaca di *Media Indonesia*, 15 Februari 2006 yang menggugah perhatian, yang ditulis Diah Ratnadewi, seorang dosen yang tinggal di Bogor.

Saat ini, pemerintah sedang mengujicoba Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hasilnya ternyata belum memuaskan, karena sangat bergantung pada situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akhirnya, KBK urung diberlakukan.

Menurut Diah, keberhasilan KBK tergantung pada perubahan mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia mengutip pendapat Bambang Soehendro, mantan wakil RI untuk UNESCO yang kini menjabat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Berdasarkan pengalamannya di UNESCO, Bambang menilai jam belajar di Indonesia adalah yang terpadat di dunia. Ia merekomendasikan pengurangan jam belajar sekolah dasar dan menengah, yang selama ini lebih dari 1.000 jam per tahun, menjadi di bawah 1.000 jam seperti di negara-negara lain.

Di Indonesia, anak-anak sejak belia sudah dibebani sistem pendidikan formal. Sementara kemampuan kognitif anak yang berkembang sesuai usia terabaikan oleh pendidik.

Sekolah di luar negeri menerapkan lima hari sekolah dalam seminggu dengan 5-6 jam efektif setiap minggu. Satu jam pelajaran setara dengan 45-50 menit, dengan waktu jeda antar pelajaran 10 menit di AS dan lima menit di Jerman. Sehingga kesegaran otak siswa terpelihara. Berbeda dengan Indonesia yang tak ada jeda istirahat antar pelajaran dan enam hari sekolah dalam seminggu. Di Eropa dan AS, ada libur sekolah setiap enam minggu yang waktunya antara 3-15 hari.

Lebih Membebani

Harian *Kompas* tampak yang paling *concern* dengan isu KBK ini. Terlihat dari laporannya tanggal 4, 10 dan 14 Februari 2006. Dalam laporan tanggal 14 Februari, harian ini mengetengahkan kendala substansi isi kurikulum tersebut.

Senada dengan pemikiran Bambang Soehendro, beberapa guru dari SMA Negeri 46 Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Jakarta Selatan, SMA Negeri 35 Jakarta Pusat menganggap materi KBK yang memuat 16 mata pelajaran menjadi lebih banyak dari Kurikulum 1994 yang memuat 12-13 mata pelajaran.

KBK pada akhirnya hanya sebatas perubahan cara penyajian, tetapi tuntutan materi pelajaran tetap banyak dan berat. Selain itu, kebanyakan guru masih meraba-raba teknik belajar yang cocok untuk KBK. Penataran guru yang diadakan tidak efektif. Sehingga komunikasi di kelas masih cenderung searah, padahal KBK menuntut keaktifan murid.

Kompas juga menyimpulkan, selain minimnya pemahaman guru terhadap konsep KBK, tidak semua sekolah memiliki kelengkapan sarana penunjang belajar aktif ini, seperti sarana laboratorium sains, bahasa maupun komputer, akses internet maupun buku-buku. Jika SD Labschool dengan segala kelengkapan sarananya bisa melaksanakan KBK dengan baik, lain halnya dengan SD-SD negeri yang masih mengandalkan bantuan dari Diknas DKI.

Menyadari hal itu, BSNP akan melakukan pergantian kurikulum dengan kurikulum hasil kreasi guru-guru di sekolah berdasarkan standar isi dan standar kompetensi yang dikukuhkan peraturan menteri, akhir Februari. Artinya, guru punya kewenangan untuk menyusun kurikulum baru. ■ RH

Majalah Urban di Sudut Kafe

Jika Anda mengunjungi kafe-kafe, restoran atau mal atau tempat nongkrong lainnya di beberapa kota besar, terutama Jakarta, coba tengok ke pojokan, Anda akan menemukan sejumlah majalah. Dengan beragam format dan ukuran, majalah tersebut dipajang rapi dan boleh diambil tanpa harus membayar, alias gratis.

Keberadaan penerbitan gratis bukan hal yang baru lagi saat ini. Tidak cuma satu, melainkan beragam segmen. Dari gaya hidup, keluarga, makanan sampai otomotif, bahkan juga komunitas tertentu. Harian

Kompas menangkap fenomena ini untuk diulas dalam dua halaman dalam edisi Minggu, 5 Februari 2006.

Menurut harian ini, penerbitan gratis mulai marak dalam lima tahun terakhir. Perkembangannya sangat pesat, terutama di pusat-pusat pertumbuhan masyarakat urban, seperti Jakarta, Bandung dan Bali.

Kompas juga mewawancarai beberapa pemimpin redaksi dari majalah-majalah gratisan tersebut terutama yang beredar di Jakarta. Sejumlah majalah seperti *Free Magazine*, *djakarta!*, *Area* dan *Maxx-M*, bukanlah nama yang asing bagi para pengunjung kafe.

Ide awal dari para pendiri majalah itu rata-rata serupa, yakni membuat majalah yang berisi panduan bagi yang ingin menikmati hidup kota seperti Jakarta. Maka, jika Anda membuka lembar demi lembar majalah-majalah itu, Anda akan menemukan informasi seputar acara-acara heboh di berbagai kafe dan klab malam, menu andalan berbagai restoran, mode terbaru di berbagai butik, resensi CD, film dan buku paling laris, juga berbagai tips kecantikan dan psikologi.

Khusus untuk majalah bersegmen otomotif seperti *Ascomaxx*, isinya mengulas berbagai merek mobil dan motor yang sedang tren. Ada juga *Appetite Journey*, yang isinya makanan dan kuliner, *Inspire Kids* tentang kesehatan ibu dan anak, juga *Le Marriage* tentang panduan pernikahan. Sementara, *Suara BSD City* mengakomodir tali komunikasi antara penghuni Bumi Serpong Damai dan pengelola perumahan tersebut.

Setiap majalah berusaha memiliki ciri khas. Majalah *djakarta!,* menurut pemimpin umumnya, M. Rasyid Ganie, menajamkan sisi pemberitaannya, sehingga tidak dianggap majalah iklan. Awalnya, majalah ini merupakan majalah komersial. Terbit di akhir 2000 dengan bandrol Rp 27.500, kini *djakarta!* gratis. Penulis kondang seperti Seno Gumira Ajidarma dan Wimar Witoelar rutin mengisi kolom di majalah ini.

Kebutuhan informasi, terutama tentang gaya hidup metropolis, menjadikan majalah gratis menjamur. Kode etik jurnalistik tetap dipegang.

Kode Etik

Dengan menerapkan jurnalisme pelayanan (*service journalism*), awak redaksinya juga selalu menerapkan etika jurnalisme dasar seperti fakta, akurasi dan keseimbangan berita. Justru, karena memberikan panduan tentang berbagai hal, informasi yang diberikan harus bisa dipercaya.

Pemilihan kertas tidak main-main. Rata-rata tampil *full color* dengan kertas *hard paper* luks. Kontrol terhadap kualitas majalah juga diperhatikan. Pemimpin Redaksi *Appetite Journey* Marcellinus Hanjaya mengakui hal itu. Selain itu, meski sangat mengandalkan iklan, seleksi terhadap iklan-iklan yang akan dipasang di majalah juga diterapkan. Reynaldo dari *Maxx-M* menyatakan, iklan yang dipasang harus sesuai dengan target pasar majalahnya.

Para pengelolanya juga memiliki prinsip-prinsip tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya *Inspire Kids* yang menolak iklan makanan kecil untuk anak yang mengandung MSG. Sedangkan *Suara BSD City* menjaga jangan sampai ada tulisan berisi gosip antar penghuni.

Meski hidup sepenuhnya dari iklan yang memenuhi halaman per halamannya, para pengurus redaksi tetap memegang kode etik jurnalistik. Lagipula, iklan yang masuk juga dibatasi jumlahnya. Batas maksimal 30-50 persen dari jumlah halaman. Lebih dari itu, majalah akan disebut majalah iklan dan tidak akan ada yang mau membaca.

Untuk meyakinkan para pemasang iklan bukanlah hal yang mudah. Belum lagi soal distribusi, dimana harus dilakukan survei berkala untuk memastikan majalah masuk ke pasar yang benar.

Tidak dipungkiri, citra majalah gratis bagi masyarakat masih dianggap majalah yang isinya iklan melulu. Ulasan *Kompas* mengenai fenomena majalah gratis setidaknya membuka mata betapa tidak mudahnya menerbitkannya meskipun gratis. ■ RH

SERAT CENTHINI
SYAIR SAKRAL YANG BERONTAK

Kerohanian yang tinggi sekaligus syahwat yang terlalu bejat dalam tembang itu yang menyebabkan suluk ini lama sekali tidak pernah diterjemahkan.

Pangeran Anom Amengkunegara III, putera mahkota Kesultanan Surakarta Adiningrat di Jawa Tengah, menitahkan tiga pujangganya, Sastranagara, Ranggasutrasna dan Sastradipura, untuk menyusun suatu cerita berbentuk tembang yang merangkum segala ilmu Jawa dan seni kehidupan yang menjiwai masyarakatnya.

Ia memberi mereka sepuluh ribu ringgit emas dan menyuruh masing-masing mengembara ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai ke Mekah, untuk mengumpulkan semua kearifan sekaligus penyimpangannya dalam perangkap syahwat dan roh, dari berbagai kalangan, antara lain pertapa, dalang, juru kunci, penyamun, perempuan, petani, ulama, sampai kaum paria.

Tembang yang terdiri dari ribuan syair itu berjudul asli *"Suluk Tambangraras"* tetapi kemudian lebih populer dengan nama "Serat Centhini".

Penulisannya dimulai 1809 Masehi. Bercerita tentang pengembaraan tokoh utamanya, Jayengresmi alias Amongraga. Ia adalah putera Sunan Giri, yang terkenal karena berani menolak membayar upeti kepada Sultan Agung di Mataram.

Serat Centhini ditulis untuk ditembangkan. Dalam seni pertunjukan sastra Jawa kuno, penyair dengan mengagumkan menyesuaikan irama, macapat dan gema kata-kata menjadi sangat indah. Di dalam bagian-bagian syair yang cabul, kotornya kata-kata itu terhalau oleh keanggunan tembangnya. Menurut Elizabeth D. Inandiak, salah seorang penerjemah Serat Centhini versi modern, perpaduan antara lumpur dan emas itulah yang menjadikan Serat Centhini begitu khas dan luar biasa.

Kerohanian yang tinggi dan syahwat yang terlalu bejat dalam tembang itu yang menyebabkan suluk ini lama sekali tidak pernah diterjemahkan. Bagi beberapa ahli Jawa, Serat Centhini adalah karya yang terlalu suci untuk diterjemahkan, sedangkan bagi sebagian lainnya, terlalu kotor.

Sejarawan Onghokham bahkan menganggap Serat Centhini identik dengan karya Francois Rabelais, seorang pujangga Perancis mantan rahib yang lahir tahun 1494. Rabelais memperkaya bahasa Perancis dengan penemuan kosakata dan tatabahasa yang menggugah. Demikian pula Serat Centhini adalah karya sastra Jawa dengan kosakata yang sangat kaya.

Sakral Sekaligus Tabu

Pangeran Anom Amengkunagara III, si pemrakarsa suluk ini, ia disingkirkan dari Kraton saat masih remaja karena dianggap *mbalelo*. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa hidupnya yang dianggap kelewatan akan menuntunnya pada ilmu kesempurnaan, dengan mengenal kebatilan di ambang jalan kebatinan. Itu sebabnya, ia memerintahkan tiga pujangga Kraton untuk menyusun suluk ini.

Di kemudian hari, ia diangkat menjadi Susuhunan Pakubuwono V. Ia meninggal karena penyakit rajasinga di tahun ketiga pemerintahannya. Pada 1850, Sri Susuhunan Pakubuwono VII menghadiahkan suluk ini kepada Ratu Belanda lengkap dari jilid satu sampai sembilan.

Serat Centhini terdiri dari 722 pupuh. Salah satu bagian yang istimewa dan kental dengan sufisme adalah pupuh yang menceritakan sepasang pengantin baru Amongraga dan Tambangraras melewatkan 40 malam dalam kamar pengantin tanpa bersetubuh.

Nyaris seperti kisah Seribu Satu Malam, sepanjang 40 malam itu Tambangraras membungkuk dan diam. Namanya sendiri berarti tembang (*tambang*) yang merdu (*raras*). Pertanyaannya, mengapa suluk yang dinamai dirinya kemudian menjadi Serat Centhini? Centhini adalah nama abdi dalemnya yang setia dan penuh pengabdian menunggu di bawah ranjang pengantin majikannya. Ia begitu melupakan dirinya sendiri dan begitu mengabdi pada para junjungannya, sehingga dia melebur menjadi suluk itu sendiri.

Hingga saat ini, masih sedikit orang yang memahami suluk ini sebagai salah satu mahakarya kesusastraan tinggi Jawa. Meski demikian, beberapa orang telah berusaha menerjemahkan dan mengangkatnya ke dunia internasional.

Mantan Menteri Agama Prof. H. Moh. Rasjidi, mengangkat Serat Centhini sebagai disertasi doktornya di Universitas Sorbonne, Perancis, 1956. Kemudian ada H. Karkono Kamajaya, mantan wartawan era Bung Karno yang melatinkan suluk ini dengan kerja keras 20 tahun dan modal Rp 100 juta rupiah, yang 70 jutanya berasal dari kocek pribadi Presiden Soeharto kala itu. Karyanya baru diterbitkan tahun 1992 oleh Yayasan Centhini, Yogyakarta.

Elizabeth D. Inandiak adalah penerjemah Serat Centhini versi modern dengan menyusunnya bak sebuah novel filsafat. Salah satu proyeknya adalah terjemahan Serat Centhini ke dalam bahasa Perancis. ■ RH